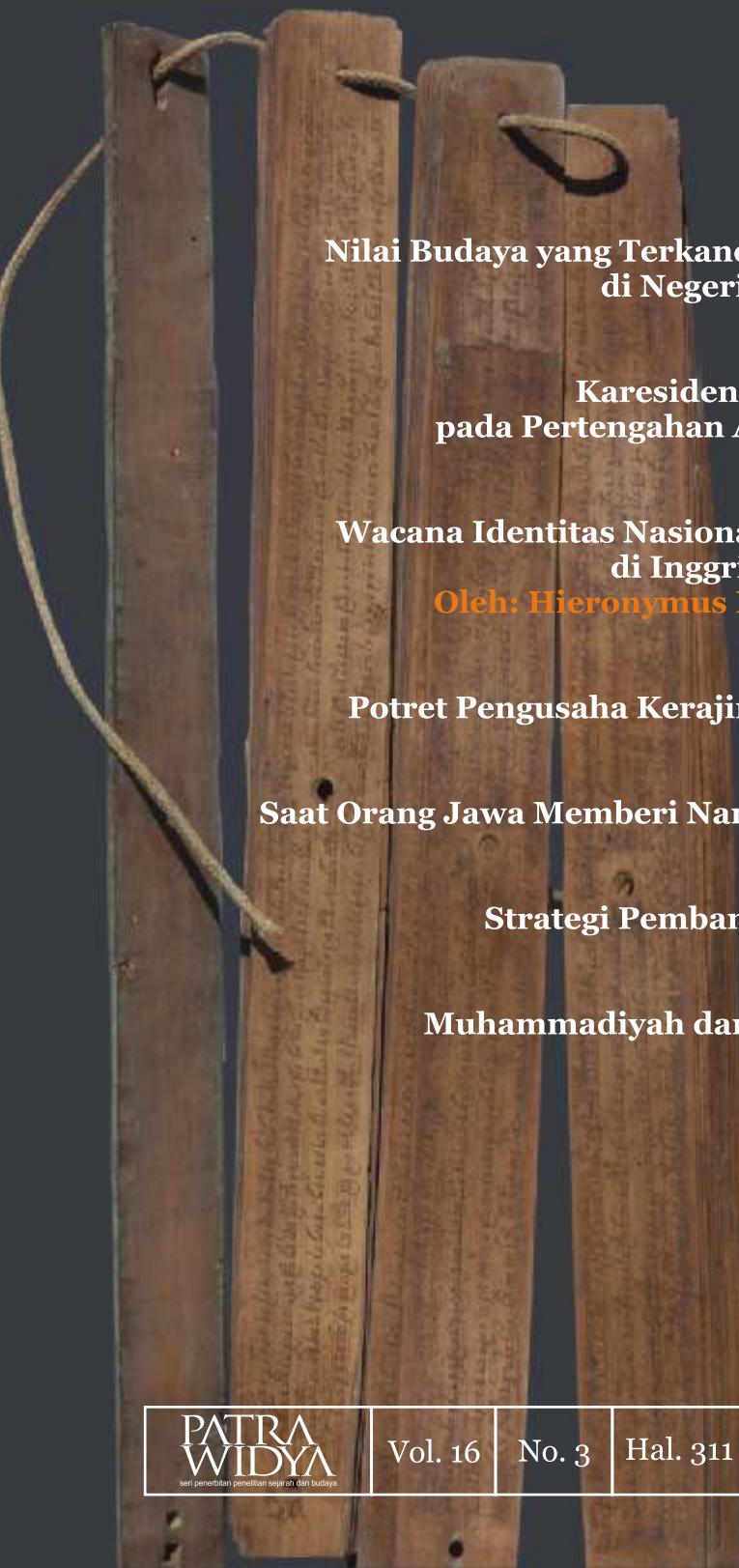


Terakreditasi No. : 605/AU4/P2MI-LIPI/03/2015

PATRAWIDYA

seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya



Nilai Budaya yang Terkandung dalam Tradisi Sasi Ikan Lompa
di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah
Oleh: Damardjati Kun Marjanto

Karesidenan Priangan di Mata Para Pelancong
pada Pertengahan Abad Ke-19 Hingga Awal Abad Ke-20
Oleh: Gregorius Andika Ariwibowo

Wacana Identitas Nasional pada Buku Teks Pelajaran Sejarah
di Inggris dan Indonesia: Kajian Komparatif
**Oleh: Hieronymus Purwanta, Heribertus Hery Santosa,
Anton Haryono**

Potret Pengusaha Kerajinan Kuningan di Bejjong Mojokerto
Oleh: Isni Herawati

Saat Orang Jawa Memberi Nama: Studi Nama di Tahun 1950-2000
Oleh: Moordiati

Strategi Pembangunan Rumah Susun Berkelanjutan
Oleh: Su Ritohardoyo

Muhammadiyah dan Masyumi di Yogyakarta, 1945-1960
Oleh: Suwarno



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
YOGYAKARTA



PATRAWIDYA seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya

Vol. 16 No. 3, September 2015

PATRA
WIDYA

seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya

Vol. 16

No. 3

Hal. 311 - 428

Yogyakarta

September 2015

ISSN 1411-5239

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenanNya Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta dapat menerbitkan hasil penelitian yang dikemas dalam jurnal *Patrawidya* Seri Sejarah dan Budaya Vol. 16 No. 3, September 2015. Jurnal *Patrawidya* edisi ini memuat tujuh artikel dalam bidang sejarah dan budaya, hasil penelitian Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, peneliti tamu, dan peneliti undangan.

Jurnal *Patrawidya* yang sampai kehadapan para pembaca berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Dewan Redaksi *Patrawidya* dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari yang telah meluangkan waktu untuk membaca semua artikel dan memberi pertimbangan terhadap isi artikel, ucapan terima kasih juga kami sampai kepada editor bahasa Inggris.

Patrawidya edisi September kali ini hadir dengan tujuh artikel yang terangkum dalam rumpun kajian tentang sejarah dan budaya. Edisi kali ini diawali tulisan Damardjati Kun Marjanto yang mengupas tradisi *Sasi ikan lompa* di Haruku Maluku Tengah. Menurut Marjanto, tradisi *sasi ikan lompa* yang menjadi kegiatan masyarakat Haruku memiliki kandungan aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi karena hasil ikan *lompa* itu sendiri, dan aspek sosial terkait dengan solidaritas antarwarga yang tampak dalam kegiatan *sasi ikan lompa*. Di samping itu *sasi ikan lompa* juga menunjukkan ketaatan warga terhadap aturan adat dan menjaga harmoni dengan alam.

Keindahan, harmoni dengan alam dan eksotisme Karesidenan Priangan pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dituliskan oleh Gregorius Andika Ariwibowo berdasarkan sumber yang didapat dari jurnal perjalanan para turis Eropa tatkala mengunjungi Priangan. Kesaksian para turis meruntuhkan stigma negatif tentang penduduk bumiputra (Hindia Belanda) yang malas dan terbelakang. Untuk mendapatkan gambaran yang rinci tentang Priangan dapat dibaca secara komplit dalam tulisan yang dimuat dalam jurnal ini.

Artikel yang cukup menarik ditulis bersama oleh tiga orang H. Purwanto, H. Hery Santosa dan Anton Haryono mengusung tentang wacana identitas nasional yang hadir melalui buku teks pelajaran sejarah yang ada Indonesia dan Inggris. Penulis menemukan bahwa di Inggris buku teks pelajaran sejarah mewacanakan bahwa bangsa Inggris adalah subjek dari berbagai peristiwa sejarah, menarasikan tentang pencapaian dan sukses yang diraih bangsa Inggris. Bahkan untuk menonjolkan wacana itu dilakukan mitologisasi pada beberapa tokoh dan peristiwa sejarah. Dalam buku teks pelajaran sejarah di Indonesia justru mewacanakan masyarakat Indonesia sebagai objek kekuatan asing khususnya bangsa Belanda.

Isni Herawati hadir melalui sumbangan artikel yang mengupas tentang potret usaha kerajinan yang dilakukan oleh para pengusaha kuntingan di daerah Bejjong, Mojokerto. Daerah Bejjong dekat atau bahkan menjadi area dari peninggalan situs Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu model-model patung Budha dan Siwa menjadi sumber inspirasi bagi para perajin kuntingan daerah Bejjong. Pengusaha di Bejjong dalam mempertahankan jaringan pasar yang telah terbentuk melalukan berbagai terobosan antara lain perbaikan kualitas, menjaga ketepatan waktu pembuatan dan pengiriman serta menjaga kepercayaan.

Apakah arti sebuah nama? Sering ada lontaran kata seperti itu. Di samping itu juga ada pendapat bahwa “di dalam nama ada sebuah doa atau pengharapan”. Menurut Moordiati nama menjadi sebuah fenomena yang unik di dalam masyarakat Jawa khususnya di wilayah Jombang. Perkembangan dan perubahan makna dalam pemberian nama untuk anak -anak yang lahir dari tahun 1950-2000 dikupas dalam artikel yang ditulis Moordiati. Menurut

Mordiati ada perubahan menarik yang terjadi di Jombang terkait dengan pemberian nama pada anak-anak yang lahir antara tahun 1950-2000, makna dan harapan tidak lagi mendominasi nama-nama anak karena ada masuk juga *trend* nama-nama yang popular pada masa itu.

Su Ritohardoyo hadir dalam artikel yang menarik tentang pembangunan rumah susun sebagai salah satu model strategi pembangunan perumahan berkelanjutan. Menurut Su Ritohardoyo pembangunan rumah susun merupakan solusi penyediaan perumahan rakyat yang tepat dan rasional bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. *Patrawidya* edisi September ini ditutup oleh artikel dari Suwarno yang membahas tentang relasi antara Muhammadiyah dengan Masyumi di Yogyakarta dari tahun 1945-1960. Suwarno menunjukkan bahwa antara tahun 1945-1960 banyak anggota Masyumi yang berasal dari Muhammadiyah. Keterlibatan Muhammadiyah baik secara organisasi maupun secara perorangan ke dalam Masyumi menjadi salah satu kekuatan utama bagi Masyumi sehingga menjadi partai yang cukup diperhitungkan di dalam arena politik di Yogyakarta.

Ibarat pepatah “tiada gading yang tak retak”, penerbitan jurnal *Patrawidya* Seri Sejarah dan Budaya Vol. 16 No. 3, September 2015 ini masih ada kekurangannya. Namun begitu kami berharap semoga hasil terbitan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Selamat membaca

DEWAN REDAKSI

Seri Sejarah dan Budaya

PATRAWIDYA

Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya

- Pengantar Redaksi
- Daftar Isi
- Abstrak

- Damardjati Kun Marjanto - Nilai Budaya yang Terkandung dalam Tradisi *Sasi Ikan Lompa* di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah (hlm. 311-326).
- Gregorius Andika Ariwibowo - Karesidenan Priangan di Mata Para Pelancong pada Pertengahan Abad Ke-19 Hingga Awal Abad Ke-20 (hlm. 327-344).
- Hieronymus Purwanta, Heribertus Hery Santosa, Anton Haryono - Wacana Identitas Nasional pada Buku Teks Pelajaran Sejarah di Inggris dan Indonesia: Kajian Komparatif (hlm. 345-362).
- Isni Herawati - Potret Pengusaha Kerajinan Kuningan di Bejjong Mojokerto (hlm. 363-380).
- Moordiati - Saat Orang Jawa Memberi Nama: Studi Nama di Tahun 1950-2000 (hlm. 381-390).
- Su Ritohardoyo - Strategi Pembangunan Rumah Susun Berkelanjutan (hlm. 391-406).
- Suwarno - Muhammadiyah dan Masyumi di Yogyakarta, 1945-1960 (hlm. 407-428).

CULTURAL VALUES CONTAINED IN SASI IKAN LOMPA TRADITION IN NEGERI HARUKU, CENTRAL MALUKU DISTRICT

Damardjati Kun Marjanto

Abstract

Man, nature, and culture are three entities that can not be separated. The natural environment as a dwelling for man shapes way of life that is known as culture. The other side, culture is also a way of human adaptation in response to its natural environment the harmony practices between man and nature in Negeri Haruku community is known as Sasi tradition for Lompa fish. The aim of this study describes Sasi tradition for Lompa fish and reveal cultural values in the tradition. The result of the study indicates that Sasi tradition for Lompa fish is one of succes model of symbiosis mutualism between man and nature. Lompa fish that is cared in Sasi tradition can be thrived and bring in human welfare. Besides it, the tradition also loaded with cultural values, i.e. respect to natural environment, adherence to customary rules, togetherness and social solidarity, and also spirit of sacrifice. This study is a qualitative approach in which techniques for data collection is obtained by observation, interview, and FGD (Focus Group Discussion), with a qualitative descriptive techniques for data analysis.

Keywords: tradition, sasi, lompa fish, cultural values

THE TRAVELERS IMPRESSIONS OF THE PREANGER REGENCY FROM THE MIDDLE OF 19th CENTURY UNTIL EARLY OF 20th CENTURY

Gregorius Andika Ariwibowo

Abstract

This study want to analized about travelogue or travellers journal which written by travellers that came from abroad to Preanger Regency in the middle of 19th century until early 20th century. Furthemore this study will describe how the impressions of the traveller about Priangan Regency in the middle of 19th century until early 20th century. Even though development of Netherland Indies tourism just started in the early of 20th century, but traveller invitation to this region just started since early of middle of 19th century. This study will use methodology of historical studies such as tittle choosing, discovering, and criticizing of source and historiography written. With travelogue studies that written by traveller that came to Netherland Indies, we will know about another perspective of daily life history from the tourist selves, colonial elite, and of course common people that lived in Preanger Regency. Furthemore this studies will be force humanism and daily life studies that sometimes “missed” from Indonesian Historiography researched.

Keyword: travel journal, traveller, Preanger Regency, daily life history

NATIONAL IDENTITY DISCOURSE ON THE HIGH SCHOOL HISTORY TEXTBOOK IN UNITED KINGDOM AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY

Hieronymus Purwanta, Heribertus Hery Santosa and Anton Haryono

Abstract

One of the most important goals of history education is to infuse national identity to young generation. Aim of this article is to explore of how British (United Kingdom) and Indonesia product their discourse of national identity through their high school history textbooks. A methods use is Critical DiscourseAnalysis (CDA) where content of history textbooks from the two countries as subject of analysis. Approach used is hermeneutics.Result shows that high school textbooks in United Kingdom discoursing British as subject of historical events, achievement and success of British people. Moreover, authors of the textbooks made heroification and mythologization. In contrast, high school textbooks in Indonesia discoursing Indonesians as object of foreign powers especially Dutch and Western civilization. From this viewpoint, Indonesian cultures as source of identity is negated and described as “oldfashion” that couldn't fit modern culture.

Keywords: discourse, national identity, textbook, history education

BRASS CRAFTSMEN POTRAIT IN BEIJJONG, MOJOKERTO

Isni Herawati

Abstract

This research aims to observe how the craftsmen get the raw brass materials, how they do the production, the end product of brass, and the market of the product, this article portrays 2 brass craftsmens from Bejjong, Mojokerto, the research was conducted with qualitative approach by doing direct interview, direct observation and literature review, the result of the research reveals that the access to raw materials, the production process, the product and it's marketing from both the craftsmen have great realization, as the proof that the brass craft products from Bejjong, Mojokerto have existence in the market until today, the largest market from these crafts is Europe, they use art shops in Bali to reach international market, even by using internet and text messages, to expand the market and the revenue, these craftsmens also active in finding new innovations and make new net workings with international market.

Keywords : brass craftsmen, Bejjong, technology

WHEN THE JAVANESE CHOOSE THE NAME: STUDY NAME YEAR 1950-2000

Moordiati

Abstract

Choosing and naming is no longer regarded as a major problem, in the end many names that actually unknown and foreign sounding. Though the elections and the naming of someone actually have the intent and specific meaning in accordance with the expectations of parents. In other words, that "the name is a prayer". This is also why the reason and the purpose of this article to see the changes of meaning in the naming in the culture of the Java community, especially when the period of the early period of independence (1950) until the 2000s. A da developments as well as interesting change from the source while there, that the names of the children of ethnic Java will become longer and unfamiliar at the hearing (even more complex and losing his Javanese). Not as a model for this method of history, through the collection of data sample of students from primary schools and one secondary school in East Java region, namely Jombang to diagnose and classify the changes from one period to the next period, as well as a comparison. Finally that the intellectual history of the Javanese can be arranged even rely on "just" a list of names, although it still requires improvement, both in terms of methodology and preparation needs to get serious attention from historians that the picture of the human past into a more whole and humanist.

Keywords: name, Java community, social changes, intellectual history

FLAT SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY

Su Ritohardoyo

Abstract

The article was purposed to discuss of the development of vertical residential for the sustainable of housing development and its impact to the housing development policy for the low income people. Secondary data analysis method used to analyze the data which were collected from literature and several documents. The result of the discussion showed that vertical residential development is the solution of people housing supply, which the most rational for low income people. Based on the several aspects whether it is land use, cost and environment sustainability, vertical residential gives several alternatives to housing and settlement developments which are fair, leisure, and sustainable.

Keywords: strategy, vertical residential, low income people, sustainable

MASYUMI AND MUHAMMADIYAH IN YOGYAKARTA, 1945-1960

Suwarno

Abstract

In the period of 1945-1960, Muhammadiyah and Masyumi have a very close relationship, both nationally and locally in the region of Yogyakarta. For Muhammadiyah, Masyumi was a container of channel their political aspirations, while for Masyumi, Muhammadiyah has been a special member of very importance. This article is part of a dissertation focused on the discussion of the relationship Masyumi and Muhammadiyah in Yogyakarta, political contribution of their leaders who had became Masyumi activists, and Muhammadiyah's involvement in the fight Masyumi win the election. The method used in this research is the method of history, which includes four steps: heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results showed that in the period 1945-1960 in Yogyakarta, Muhammadiyah was a socio-religious movement most of whose members were involved in Islamic Party Masyumi. There was a adage among residents of Muhammadiyah at the time that Masyumi as a place to struggle, while Muhammadiyah as a charity containe. In Yogyakarta, the majority of the Muhammadiyah members were Masyumi figures. The political contribution of Masyumi's political leaders came from Muhammadiyah was quite large in the government and parliament. The involvement of Muhammadiyah, institutionally or personally members have been prominent figures in Masyumi had made the Islamic party grew as a party has bargaining position in political arena at Yogyakarta, in particular at general election of 1951, 1955 and 1957.

Keywords: Muhammadiyah, Masyumi, Yogyakarta, politics

KARESIDENAN PRIANGAN DI MATA PARA PELANCONG PADA PERTENGAHAN ABAD KE-19 HINGGA AWAL ABAD KE-20

Gregorius Andika Ariwibowo

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung
JL. Cinambo No.136 UjungBerungBandung 42094
andikaariwibowo@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengupas tentang travelogue atau jurnal perjalanan para pelancong yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat yang mengunjungi Karesidenan Priangan. Di samping juga mengenai bagaimana para pelancong ini memandang Jawa, terutama Priangan, beserta alam dan masyarakatnya. Meskipun perkembangan pariwisata di Hindia Belanda baru dimulai pada sekitar awal Abad Ke-20, namun kunjungan para turis yang sengaja ingin berlibur dan menjelajahi Hindia Belanda telah dimulai pada pertengahan Abad ke-19. Kajian ini menggunakan metode penulisan sejarah seperti penentuan tema, penelusuran sumber, kritik sumber, dan pada tahap terakhir yakni penulisan karya sejarah. Melalui travelogue tampak suatu bentuk keseharian dari para turis, elit kolonial, penduduk pribumi dan Eropa, serta hal-hal yang terkadang “hilang” dalam mengangkat sisi humanisme dan keseharian dalam kajian Historiografi Indonesia.

Kata Kunci: jurnal perjalanan, pelancong, Karesidenan Priangan, sejarah sehari-hari

THE TRAVELERS IMPRESSIONS OF THE PREANGER REGENCY FROM THE MIDDLE OF 19th CENTURY UNTIL EARLY OF 20th CENTURY

Abstract

This study want to analized about travelogue or travellers journal which written by travellers that came from abroad to Preanger Regency in the middle of 19th century until early 20th century. Furthemore this study will describe how the impressions of the traveller about Priangan Regency in the middle of 19th century until early 20th century. Even though development of Netherland Indies tourism just started in the early of 20th century, but traveller invitation to this region just started since early of middle of 19th century. This study will use methodology of historical studies such as tittle choosing, discovering, and criticizing of source and historiography written. With travelogue studies that written by traveller that came to Netherland Indies, we will know about another perspective of daily life history from the tourist selves, colonial elite, and of course common people that lived in Preanger Regency. Furthemore this studies will be force humanism and daily life studies that sometimes “missed” from Indonesian Historiography researched.

Keyword: travel journal, traveller, Preanger Regency, daily life history

I. PENDAHULUAN

Eksplorasi terhadap berbagai kekayaan alam dan budaya yang ditawarkan oleh berbagai agen wisata mendorong terciptanya gaya hidup baru terutama dikalangan urban untuk mengunjungi pusat-pusat kebudayaan yang ada. Di Indonesia, pusat-pusat budaya tradisional seperti Yogyakarta, Bali, dan Lombok menjadi tujuan utama para turis baik dari kawasan Indonesia maupun mancanegara. Hal ini sangat menarik sebab melalui media komunikasi seperti ini, budaya-budaya yang hidup dan berkembang di Indonesia kini mendapatkan perhatian lebih dan menjadi komoditas ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Budaya dan masyarakat lokal telah sejak lama menjadi daya tarik bagi sektor pariwisata. Hal ini karena keunikan dan keaslian (*genuine*) pertunjukan budaya dan masyarakat lokal yang memikat dan menarik perhatian terutama dari masyarakat yang berada di luar lingkungan budaya tersebut. (Butler dan Hinch, 2007: 160). Daya tarik yang ditawarkan oleh

budaya lokal dengan menarik perhatian dari para turis ini kemudian ditanggapi oleh pemerintah, agen perjalanan, dan oleh masyarakat lokal sendiri mengemas budaya dan mengembangkan fasilitas semakin mempermudah perjalanan ke daerah budaya tersebut.

Turis atau pelancong sebagai “penikmat” pertunjukan budaya dan aktivitas budaya lokal tentu memiliki kesan atas kunjungan yang ia lakukan. Kesan ini tentu sayang untuk dilewatkan atau dipendam sebagai pengalaman. Di masa kini banyak ditemui berbagai *blog*, situs, media sosial, buku, foto album, dan berbagai dokumentasi yang merekam suatu aktivitas perjalanan wisata, bahkan tak jarang hasil dokumentasi ini menjadi suatu panduan perjalanan. Buku atau media yang merekam perjalanan seorang turis atau pelancong ini dikenal dengan nama “travelogue” atau jurnal perjalanan. (Burke, 1997:94).

Travelogue atau jurnal perjalanan selama ini hanya digunakan sebagai sumber pelengkap dalam kajian historiografi. Para sejarawan cenderung mengecilkan peran dari jurnal perjalanan dalam kajian historiografi yang mereka buat. Jurnal perjalanan dinilai kurang memiliki unsur fakta yang kuat dan hanya dilihat sebagai cerminan persepsi dan opini dari penulisnya, sehingga dianggap kurang mampu keutuhan fakta dan kejadian yang berlangsung pada masa itu.

Kajian ini ingin menggambarkan mengenai kondisi di Karesidenan Priangan baik alam, dan masyarakatnya dari sudut pandang para pelancong yang mengunjungi wilayah ini. Seperti yang disampaikan oleh Burke (1997), bahwa para pelancong ini menampilkan secara spontan dari suatu keadaan yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Mereka merekam lalu menuliskan pengalaman mereka dalam suatu bentuk tulisan yang dikenal sebagai *travelogue*. Tulisan-tulisan yang mereka buat memberikan suatu sudut pandang baru dari suatu bentuk keseharian dari peristiwa dan aktifitas yang sedang berlangsung disekitar mereka.

Kajian ini mencoba membahas sudut pandang para turis asing yang mengunjungi Priangan pada sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang terekam melalui “travelogue” atau jurnal perjalanan mereka. Pada abad ke-19, Indonesia (Hindia Belanda ketika itu) telah menjadi tujuan wisata dari para pelancong yang memiliki hasrat mengeksplorasi “dunia timur” yang eksotis. Dalam kajian ini lebih lanjut secara terperinci dibahas mengenai bagaimana para pelancong ini memandang Jawa, terutama Priangan, beserta alam dan masyarakatnya. Di samping itu kajian ini juga akan melihat perkembangan pariwisata yang telah ada dan berkembang di Karesidenan Priangan ketika itu.

Hal yang menarik adalah ketika sebelum memulai perjalanan, terutama ke daerah-daerah terasing atau daerah jajahan. Masyarakat Barat di abad ke-19 percaya kepada mitos “pemakan manusia”. Mereka memandang daerah-daerah ini dikuasai oleh “manusia-manusia liar” yang memakan daging (kanibalisme) dan memburu kepala manusia (*head hunters*). Di samping itu juga adanya pandangan bahwa penduduk asli di daerah jajahan adalah orang-orang yang pemalas, hal ini terutama untuk mengidentifikasi penduduk di kawasan Timur Jauh, Malaysia, Filipina, dan Jawa (Burke, 1997: 95).

Hal ini menarik terutama untuk melihat pandangan atau citra dari masyarakat barat atau kulit putih di Abad Ke-19 ketika mereka melihat masyarakat bumiputera sebagai *the other* atau “yang lain”.¹ Namun rupanya mitos mengenai “Timur” memberikan energi dan hasrat yang lebih terutama bagi para turis yang gemar bertualang dan penasaran dengan eksotisme budaya timur.

Rujukan utama dari kajian ini ialah artikel yang ditulis oleh Peter Burke mengenai kisah

¹ Hal ini menarik mengingat di Abad XIX merupakan puncak dari dominasi pengetahuan dan kekuatan barat atas Timur. Barat terutama masyarakat kulit putih merupakan “pemimpin” peradaban yang menguasai segala hal mulai dari kekuasaan politik, sumber daya alam, ilmu pengetahuan, bahkan kebudayaan. Sehingga budaya-budaya yang “lain” dari mereka dianggap rendah, bahkan tidak berbudaya. Lebih lanjut dalam membahas mengenai ini bisa membaca buku Edward Said, *Orientalism*, (New York: Random House, 1979).

pengalaman yang diambil dalam jurnal perjalanan para turis Inggris ketika mereka mengunjungi Italia pada Abad ke-17 (Burke. 1997:94). Dalam artikel ini Burke menampilkan mengenai pandangan orang Inggris yang mengunjungi Italia pada Abad ke-17. Italia pada abad ke-17 merupakan pusat perdagangan, politik, agama, seni dan ilmu pengetahuan utama di belahan dunia barat. Italia yang ketika itu berada dalam puncak masa renaisans menjadi daya tarik terutama bagi negara-negara lain yang secara ekonomi dan budaya masih berada di bawah Italia, salah satunya Inggris. Italia ketika itu telah menjadi tujuan para wisatawan di kawasan Eropa.

Turisme menurut Cohen (dalam Wearing, dkk., 2010: 23) diartikan sebagai perwujudan dari keinginan seseorang untuk mengunjungi, menelusuri, dan mencari suatu pengalaman budaya dan sosial, serta menjelajahi kehidupan alam yang berbeda di tempat-tempat yang lain di dunia. Dalam kajian yang sama Cohen juga menyampaikan mengenai empat tipe turis yakni, turis yang bepergian secara berkelompok, turis yang bepergian secara individu, penjelajah, dan *backpacker* atau *drifter*.

Secara khusus kajian ini lebih menampilkan pengalaman para turis yang datang secara individual dan sebagai seorang penjelajah, terutama mereka yang datang atas keinginan sendiri. Turis sebagai seorang pribadi dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni *flaneur* dan *choraster*. *Flaneur* adalah turis yang datang mengunjungi daerah hanya untuk *cuci mata* dan sekedar jalan-jalan untuk menikmati keindahan alam, mengagumi budaya dan masyarakat lokal, berbelanja produk-produk dari suatu daerah, atau sekedar merasakan kehidupan perkotaan dari suatu wilayah. Sedang *choraster* adalah seseorang yang dengan sengaja mengunjungi suatu daerah kemudian ia akan berinteraksi dengan tempat, masyarakat, serta budaya dari daerah tersebut, lalu kemudian mempelajarinya. Karakteristik para pengunjung pada awal turisme di Hindia Belanda sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yakni sebagai *flaneur* atau *chorister* diuraikan secara detail dalam artikel ini. (Wearing, dkk., 2010: 7, 9-10).

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penulisan sejarah seperti, penentuan tema, penelusuran sumber, kritik sumber, dan pada tahap terakhir yakni penulisan karya sejarah mengenai "Karesidenan Priangan Di Mata Para Pelancong Pada Pertengahan Abad Ke-19 Hingga Awal Abad Ke-20". Kajian ini menggunakan Jurnal-jurnal perjalanan dari para pelancong yang mengunjungi Priangan. Beberapa jurnal yang digunakan antara lain ditulis oleh Elizah R. Scidmore (1897), Augusta de Wit (1905), A.J. Barnouw (tt), dan James Rush (2013) Melalui jurnal-jurnal ini akan dilihat mengenai kesan para pelancong ini ketika mereka mengunjungi Karesidenan Priangan. Selain itu akan digunakan juga buku-buku manual mengenai pariwisata di Jawa yang dikeluarkan oleh Michel's Java Motoring Co. (1897) dan Official Tourist Beareu (1910) yang berisi tentang fasilitas-fasilitas wisata beserta tempat-tempat menarik yang dapat dikunjungi dan ditawarkan kepada para pelancong.

Burke (1997:94) mengatakan bahwa *travelogue* atau jurnal perjalanan para turis berisi mengenai kisah perjalanan, terutama bagi mereka yang telah menempuh perjalanan ke luar negeri. Jurnal ini merupakan rangkaian pengalaman, kesan, dan hasrat dari seorang turis ketika mereka mengunjungi suatu daerah yang baru atau asing bagi mereka. Melihat kisah yang ditampilkan oleh para turis melalui jurnal perjalanan sangat menarik terutama bagi para sejarawan. Penggunaan *travelogue* sama seperti melihat sebuah otobiografi sebuah perjalanan dari kisah seseorang, namun ditulis dengan begitu spontan. Hal ini karena si penulis secara jujur mengungkapkan apa yang ia lihat, dengar dan rasa dari kunjungannya ke suatu daerah.

III. PEMBAHASAN

A. Kemajuan di Hindia Belanda pada Akhir Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20

Kemajuan Hindia Belanda, terutama Jawa, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 tidak bisa dilepaskan dari reformasi birokrasi dan sistem perekonomian kolonial pada awal abad ke-19. Masa Pemerintahan H.W. Daendles (1808-1811) dan T.S. Raffles (1811-1816) memberikan tonggak bagi kemajuan Jawa pada masa sesudahnya. Daendles dan Raffles melakukan restrukturisasi dalam sistem birokrasi dengan menggabungkan sistem pemerintahan kolonial dan tradisional sehingga pemerintah kolonial memiliki sistem birokrasi yang terstruktur sehingga mempermudah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan kolonial mereka di Hindia Belanda (Houben dalam Dick, 2002: 59).

Dalam bidang ekonomi terjadi beberapa perubahan dan kebijakan yakni: 1) memperkenalkan sistem persewaan tanah; 2) pembangunan Jalan Raya Pos; 3) penghapusan perbudakan dan menggantinya dengan sistem perburuhan; dan 4) membuka perkebunan-perkebunan baru terutama di sekitar *Ommelanden* dan Priangan. Melalui kebijakan-kebijakan ini maka terjadi pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman Jawa yang memunculkan kota-kota baru seperti Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Bandung di wilayah Karesidenan Priangan (Houben dalam Dick, 2002: 60, 62-64).

Perkembangan dalam sistem birokrasi dan ekonomi di Jawa pada awal abad ke-19 kemudian juga ditunjang oleh pertumbuhan industri dan sarana transportasi pada masa sesudahnya. Sistem Tanam Paksa (*Cultivation System*) yang diperkenalkan pada tahun 1830 di satu sisi memberikan pengaruh positif dalam perkembangan kehidupan sosial ekonomi di Jawa. Sistem Tanam Paksa berhasil meningkatkan pertumbuhan komoditas perkebunan di Jawa pada level yang sangat luar biasa (Houben dalam Dick, 2002: 65; Kartodirdjo, 2014, jil. 1: 371-378).

Pulau Jawa pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menjadi pusat agro ekonomi dunia. Kopi, gula, kina, indigo, dan teh menjadi andalan ekspor pemerintah kolonial Hindia Belanda. Untuk mempermudah distribusi komoditas-komoditas ini, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda membangun berbagai fasilitas seperti pelabuhan, jalur kereta api, dan perkapalan (Houben dalam Dick, 2004: 65; Kartodirdjo, 2014, jil. 1: 412-418).

Pembangunan Jalan Raya Pos telah mengubah struktur tata ruang Jawa secara revolusioner. Jalan yang awalnya dibangun untuk mempermudah akses pos dan militer kolonial Belanda, pada pertengahan abad ke-19 menjadi jalur penting bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa. Di sepanjang jalur ini berkembang berbagai kota-kota baru yang mendukung perkembangan perkebunan, industri dan ruang-ruang komersil di Hindia Belanda sepanjang pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Menurut Nas dan Pratiwo (2002:718) Jalan Raya Pos menjadi penghubung dari kota-kota di Jawa yang menciptakan kesinambungan dan mobilisasi antar kawasan. Selanjutnya di sepanjang kota-kota ini muncul kota-kota yang lebih kecil yang menampilkan karakteristik dari masing-masing wilayah, seperti daerah perkebunan, pelabuhan, industri, pasar, dan pemukiman. Hal ini kemudian berakibat berkembangnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Meningkatnya hasil perkebunan selama masa Sistem Tanam Paksa dan meningkatnya mobilitas penduduk untuk kebutuhan tenaga kerja, membuat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda membangun jalur kereta api. Pembangunan jalur kereta api pertama menghubungkan Semarang dan Yogyakarta pada 1863. Sementara di Jawa bagian barat jalur kereta api Batavia-Bogor-Sukabumi-Bandung baru terhubung pada tahun 1884 (Kartodirdjo, 2014, jil. 1: 422;

Kunto, 1989: 16).

Pembukaan Terusan Suez pada 1869 dan penemuan kapal uap telah mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari Belanda ke Hindia Belanda, serta terbukanya perjalanan dari Hindia Belanda ke Benua Amerika. Waktu tempuh yang dibutuhkan dari Belanda ke Batavia kini hanya ditempuh dalam waktu sekitar empat minggu. Maka tidak mengerankan mulai dari paruh kedua Abad ke-19 mobilitas bisnis dan perdagangan menjadi lebih mudah dan singkat. Produk-produk Eropa dengan mudahnya dapat ditemukan di Hindia. Disamping mobilitas ekonomi juga terjadi migrasi keluarga-keluarga Eropa ke Hindia Belanda dengan membawa nuansa modern dan glamor ke Tanah Hindia. Pada tahun 1871 juga telah terhubung telegram antara Eropa dan Batavia. Hal ini kemudian mempermudah terjalannya komunikasi antara Hindia dan Eropa. Sebuah kemajuan luar biasa yang akan mendorong modernisasi di Hindia (Ricklefs, 2001: 169; Taylor, 2004: 282; Kartodirdjo, 2014, jil 1: 219).

Kehadiran orang-orang Eropa yang semakin meningkat di Hindia Belanda pada pertengahan Abad ke-19 telah menciptakan suatu perubahan kecenderungan gaya hidup. Ricklefs dan Jean Gelman Taylor (Ricklefs, 2001: 169; Taylor, 2004: 282) mencatat terjadi pertumbuhan orang-orang Eropa di Hindia dari hanya sekitar 17.825 pada tahun 1852 menjadi sekitar 62.447 pada tahun 1900, serta meningkat menjadi 225.000 pada tahun 1930. Akibat dari pertumbuhan komunitas Eropa ini adalah bahwa kota-kota besar di Jawa seperti Batavia, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya banyak bermunculan ruang-ruang publik yang menawarkan berbagai sarana hiburan, hotel, pertokoan dan hal-hal yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti layaknya di Eropa.

Disamping kemajuan dan modernisasi dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Hindia Belanda rupanya telah cukup dikenal akan kekayaan alam, budaya, dan tradisinya. Publikasi-publikasi tentang Hindia telah lama tersebar baik di Eropa maupun Amerika. Memoir-memoir tentang Hindia dari penerbitan ulang kisah-kisah Marcopolo, Tome Pires dan lainnya telah membuat penasaran publik di Eropa dan Amerika. Namun diantara berbagai penerbitan memoir-memoir tersebut, penerbitan buku Alfred Russel Wallace “The Malay Archipelago” cukup memberikan pengaruh besar dikenalnya alam dan budaya Hindia di Eropa (Stepan, 2001: 68-69).

Dalam bukunya ini Wallace menampilkan keragaman kondisi alam, kehidupan penduduk, tradisi, budaya, dan berbagai aspek kehidupan tropika Hindia. Di dalam buku ini Wallace juga menampilkan sekitar 51 gambar sketsa mengenai flora, fauna, dan kehidupan manusia di Hindia Belanda pada sekitar pertengahan Abad ke-19. Buku inilah yang menjadi salah satu pendorong yang membuat rasa penasaran dari para pelancong Eropa untuk mengunjungi dan mengeksplorasi budaya dan kondisi alam tropis yang ada di Hindia Belanda (Stepan, 2001: 74-76).

Pada tahun 1883 Kerajaan Belanda mengadakan Pameran Kolonial Pertama di Dunia di Amsterdam. Pameran ini pada awalnya ditujukan untuk menarik investasi ke Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam pameran ini menawarkan beragam hasil kekayaan alam, serta fasilitas yang mendukung pengembangan industri dan perkebunan di Hindia Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata pameran ini justru menarik minat para pengunjung akan penampilan budaya yang berasal dari Hindia Belanda. Paviliun Hindia Belanda dirancang dengan konsep ala perkampungan di Jawa. Mereka membawa berbagai hasil karya berupa pertunjukan budaya dan kerajinan tangan dari Hindia Belanda (Bloembergen, 2006: 59-62).

Konsep dengan menggabungkan hasil budaya dan promosi investasi ke Hindia Belanda ini rupanya terus dikembangkan dalam setiap pameran kolonial internasional yang diikuti

oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hal ini nampak seperti di Paris pada 1889, Paris pada 1900, Brusel pada 1910, dan Paris 1931. Paviliun Hindia Belanda ini terus berkembang dari waktu ke waktu dengan menambah beragam atraksi, sajian, dan berbagai produk kebudayaan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. (Bloembergen, 2006).

Melalui pameran inilah Hindia Belanda mulai dikenal akan keindahan alam dan budayanya oleh masyarakat Eropa. Dalam usahanya untuk meningkatkan kunjungan baik dalam pengembangan industri dan ekonomi, serta pada tahap selanjutnya pariwisata, pemerintah kolonial Belanda menjadikan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) bukan saja berfungsi sebagai transportasi perdagangan juga sebagai transportasi penumpang.²

KPM melayani transportasi di seluruh perairan Hindia Belanda dan perjalanan dari Eropa ke Hindia Belanda. Selain melayani langsung perjalanan dari Amsterdam, KPM juga singgah di pelabuhan Inggris seperti di Liverpool untuk melayani penumpang dari Inggris yang hendak bepergian ke Singapura atau Hindia Belanda. Perjalanan yang ditempuh dari Amsterdam ke Batavia pada akhir abad ke-19 sekitar 40 hingga 60 hari. KPM telah berjasa besar dalam membangun jaringan antar benua dan pulau di Indonesia sehingga dapat terjalin hubungan ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia pada masa sesudahnya (van de Weijde, 2012: 14-15).



Foto 1: Brosur perjalanan yang dikeluarkan KPM

Sumber: Holland's Call

Hindia Belanda telah menarik hati para pelancong untuk mengunjungi wilayah ini. Terbukanya jalur menuju Hindia Belanda dan semakin mudahnya akses transportasi menuju ke wilayah pedalaman, terutama di Jawa telah menjadi wilayah ini untuk dieksplorasi dan dipelajari secara budaya maupun akademis. Para pelancong-pelancong yang datang pada pertengahan hingga akhir Abad Ke-19 begitu terkesan dengan pemandangan alam tropis,

² Pelayaran penumpang dengan menggunakan kapal uap dari Belanda ke Batavia sebelumnya telah dimulai pada 1870 oleh Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) dari Amsterdam dan 1875 oleh Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (KRL) dari Rotterdam. Pada tahun 1888 Pemerintah Kerajaan Belanda mendirikan Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). KPM pada awalnya merupakan perusahaan pelayaran milik Kerajaan Inggris yang bernama Koninklijke Indische Paket Maatschappij (KIPM) yang melayani rute di sekitar perairan Nusantara hingga India. KIPM berpusat di Singapura sebelum dibeli oleh Pemerintah Kerajaan Belanda. Dalam usaha menguasai jalur pelayaran ke dan di dalam perairan Hindia Belanda, pemerintah menggabungkan KPM dengan perusahaan yang telah ada sebelumnya yakni SMN dan KRL. (Van de Weijde, 2012: 15).

kehidupan sosial masyarakat, kekayaan sejarah dan budaya masyarakat Hindia Belanda. Bagi orang Belanda sendiri mengunjungi Hindia adalah sebuah bentuk “penaklukan” alam dan budaya Hindia karena mereka merasa menjadi “pemilik” dari Hindia yang eksotis (van de Weijde, 2012: 19).

B. Berwisata di Bumi Parahyangan pada Masa Kolonial

Sejarah awal perkembangan Karesidenan Priangan tidak bisa dilepaskan dari perkebunan-perkebunan yang ada di wilayah ini serta pembangunan Jalan Raya Pos oleh Gubernur Jenderal Deandles pada 1809. Perkebunan-perkebunan yang ada di wilayah Priangan mulai dirintis sejak awal Abad ke-18 oleh Johann van Hoorn dan Hendrik Zwandercoen yang mulai menanam kopi di sekitar *Ommelanden* (daerah luar Batavia) dan Priangan, namun usaha ini menemui kegagalan dan hasilnya kurang baik (Kunto, 2014: 33).

Pada sekitar tahun 1789, Pieter Engelhard mulai membuka perkebunan kopi di sekitar lereng selatan Gunung Tangkuban Perahu. Usaha yang dilakukan oleh Engelhard ini kemudian memperoleh hasil yang baik sehingga *Javakoffie* mulai memperoleh pengaruh di Pasar Eropa, serta menjadi cikal bakal perkebunan kopi di Jawa terutama pada masa Tanam Paksa, (Kunto, 2014: 34).

Tokoh lain yang berperan penting dalam merintis pembangunan dan kemajuan di Karesidenan Priangan adalah Dr. Andries de Wilde. De Wilde awalnya merupakan seorang dokter yang bekerja untuk Deandles. Ketika Raffles di Jawa ia diangkat menjadi pengawas penanaman kopi (*Kopi Opziener*) di wilayah Sukabumi hingga Garut. Selain sebagai pengawas perkebunan kopi, de Wilde rupanya juga memiliki perkebunan yang sangat luas yang pada masa kini meliputi setengah dari Kabupaten Bandung Barat (Kunto, 2014: 36-37).

Daerah yang subur dan letaknya yang berada di wilayah pegunungan inilah yang membuat Priangan menjadi pusat pengembangan agrikultura terutama untuk tanaman industri. Setelah tanaman kopi yang memperoleh hasil yang sangat baik, pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian mulai mencoba membudidayakan tanaman teh dan kina di wilayah ini.

Pada masa Tanam Paksa 1830 hingga dikeluarkannya undang-undang agraria 1870, perkebunan teh, kopi, dan kina tersebar luas di seluruh wilayah Karesidenan Priangan. Tercatat setelah 1870 terdapat lebih dari 150 perkebunan kopi, teh, dan kina yang tersebar di seluruh Karesidenan Priangan. Perkebunan-perkebunan ini dimiliki oleh pemerintah maupun swasta (Kunto, 2014: 25).

Pengusaha-pengusaha besar di wilayah Priangan ini disamping Pieter Engelhard dan Andries de Wilde, juga terdapat nama-nama seperti Junghun, Eduard Kerkhoven, K.A.R Bosscha, Willem van der Hucht, Andrian Holle dan beberapa lainnya. Disamping membangun perkebunan-perkebunan mereka juga membangun rumah-rumah peristirahatan. Rumah-rumah peristirahatan yang pada awalnya untuk kalangan sendiri pada masa kemudian juga disewakan kepada para pengunjung yang ingin mengetahui kehidupan di perkebunan, mempelajari budidaya tanaman, atau sekedar untuk berlibur (Kunto, 2014: 42-44).

Berkembangnya wilayah Priangan sebagai daerah perkebunan juga didukung oleh perbaikan fasilitas seperti jalan raya dan jalur kereta api yang melintasi wilayah ini. Di wilayah Priangan, kota-kota dan perkebunan-perkebunan yang berada di wilayah ini terletak segaris dengan Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Gubernur Jenderal H.W. Deandles pada 1809.

Jalan Raya Pos telah membuka wilayah pedalaman Jawa akan kemajuan-kemajuan yang berjalan seiring dengan perkembangan revolusi industri di Jawa pada abad ke-19. Kombinasi antara pengembangan sektor agrikultura dan industri yang terjadi di wilayah pedalaman Jawa, terutama Karesidenan Priangan telah menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang

sangat pesat di wilayah ini. Kopi, Kina, dan Teh menjadi komoditas yang merajai pasar ekspor hortikultura Hindia Belanda sepanjang Abad ke-19 hingga awal Abad ke-20 (Houben dalam Dick, 2002: 70-72; Linbald dalam Dick, 2002:125-126).

Seiring dengan kemajuan dan peningkatan ekspor tanaman ekspor dan industri yang ada di Jawa pada Abad ke-19, Pemerintah kolonial Belanda melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur. Fasilitas jalan raya yang sebelumnya mengandalkan fasilitas jalan raya peninggalan Deandles kemudian membangun ulang lagi dengan menambahnya dari sekitar 7600 km pada 1872 menjadi 20.500 km pada 1892 (Knapp, 1989: 91 dalam Houben, 2002: 76). Pemerintah kolonial juga membangun dan mengembangkan kota-kota terutama yang menjadi pusat dari daerah-daerah perkebunan dan industri. Di Priangan kota-kota yang telah ada seperti Cianjur, Sukabumi, Bandung, dan Garut dilakukan perbaikan sarana dan fasilitas sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan ekonomi kolonial.

Perubahan yang paling berpengaruh di Karesidenan Priangan adalah dibangunnya rel kereta api yang menghubungkan Batavia hingga Cicalempo ke pada tahun 1884, serta dilanjutkan hingga ke Tasikmalaya pada tahun 1899 (NISM, 1927; Reitsma, dalam Holland Colonial Call, 1930: 29; Kunto, 2014: 93). Pembangunan rel kereta api di Karesidenan Priangan tidak bisa lepas dari perkebunan-perkebunan yang ada di wilayah ini. Hayoto Kunto mengatakan bahwa pembangunan rel kereta api di priangan didasari untuk mempermudah pengangkutan hasil produksi perkebunan yang ada di sekitar wilayah ini (Kunto, 2014: 103).

Pada akhir Abad ke-19 disamping menjadi pusat perkebunan, Priangan, khususnya Bandung telah menjadi rencana pengembangan Ibukota dan pusat pengembangan agrikultura Hindia Belanda maka sangat perlu dibangun rel kereta api sebagai rencana upaya pengembangan wilayah ini. Sebelum pembangunan rel kereta api di wilayah ini. Pengangkutan hasil perkebunan terutama teh, kopi, dan kina memerlukan waktu yang sangat lama serta melalui daerah yang berbahaya serta memakan biaya yang sangat tinggi. Bahkan untuk membawa teh dari proses pengemasan dari wilayah Waspada (Garut) hingga ke Batavia membutuhkan waktu hingga 10 bulan. Hal ini karena sulitnya proses pengangkutan yang meskipun telah ada Jalan Raya Pos, namun harus melewati sungai dan medan pegunungan yang sangat berat. (Reitsma, 1930: 28-29).

Pada tahun 1926 setelah adanya rel kereta api proses yang sama dari pengemasan hingga tiba di Tanjung Priuk hanya memakan waktu sekitar dua hari. Selain sangat penting untuk transportasi hasil industri dan perkebunan, jalur kereta api Batavia-Bandung juga sangat penting dalam mobilitas penduduk. Reitsma mencatat terjadi peningkatan pengguna kereta api dari 182.481 orang pertahun pada 1892 menjadi 2.312.190 orang pertahun pada tahun 1922. Pengguna kereta api yang menuju dan dari wilayah Priangan sangat beraneka ragam mulai dari urusan ekonomi, urbansasi, hingga pariwisata (Reitsma, 1930: 28-29).

Jalur kereta api antara Batavia hingga Tasikmalaya merupakan sebuah jalur kereta yang mampu menghadirkan pengalaman tersendiri bagi para turis. Hal ini karena di jalur kereta api ini terdapat lintasan-lintasan kereta yang dikelilingi oleh pegunungan, lembah serta perkebunan kopi dan teh di sepanjang perjalanan. Para turis pun juga akan disuguhkan pengalaman mendebarkan ketika mereka harus melewati terowongan yang panjang dan gelap, serta jembatan kereta yang tinggi dan curam, sehingga perjalanan ini menjadi sensasi tersendiri bagi para turis ketika mengunjungi Priangan dengan menggunakan kereta api (Rush, 2013: 240).

Seiring dengan terbukanya wilayah Priangan yang kini telah dihubungkan dengan fasilitas jalan raya dan kereta api, maka transportasi menuju dan dari wilayah ini menjadi semakin mudah. Daya tarik alam dan suasana pegunungan yang sejuk dan nyaman menjadi

tujuan utama dari para turis ketika mengunjungi Priangan. A.J. Barnouw seorang pelancong yang mengunjungi Bandung medio antara 1920 hingga 1930 mencatat bahwa Priangan adalah surga bagi para orang-orang Eropa yang ada di Batavia, dan sekitar Jawa Barat. Para penduduk Batavia pada akhir pekan kerap kali mengunjungi daerah Priangan untuk berlibur dan mencari udara segar yang tidak jauh berbeda ketika mereka berada di Eropa (Barnouw, tt: 42).

Masyarakat Eropa yang sebagian besar berasal dari Batavia ini biasanya akan menghabiskan waktu akhir pekan mereka di Priangan. Selama di Priangan mereka menghabiskan waktu dengan menikmati suasana alam dan pegunungan; menikmati keindahan dan udara yang sejuk di perkebunan kopi dan kina; menjelajahi gunung-gunung seperti Gunung Gede, Gunung Papandayan, dan Gunung Pangrango; merasakan kehidupan peternak Sapi di daerah Pengalengan; mempelajari berbagai kajian mengenai gunung api dan agrikultura; atau merasakan kehidupan urban masyarakat Eropa di Bandung; dan lainnya (Barnouw, tt: 43; Kunto, 2015: 275).

Kehidupan pariwisata di Priangan sangat ditunjang oleh kehadiran *Preangerplanters* (Tuan tanah Priangan) yang banyak mendirikan rumah, bungalow, dan villa di sekitar perkebunan milik mereka. Villa-villa ini kemudian disewakan kepada para pelancong, terutama yang berasal dari Batavia sebagai rumah singgah sementara ketika mereka mengunjungi Priangan (Scidmore dalam Rush, 2013: 216). Dalam booklet perjalanan ke Priangan yang dikeluarkan oleh *Official Tourist Bureau* tercantum hotel-hotel yang

menawarkan keindahan panorama dan suasana perkebunan yang ada di sekitar Karesidenan Priangan. Beberapa diantaranya seperti Hotel Villa-Dolce di Garut, Grand Hotel Slabatoe di Sukabumi, dan Hotel Beau-Sejour dan Hotel Villa Isola di Lembang, selain itu juga diitawarkan tempat peristirahatan yang juga menawarkan berbagai sarana rekreasi seperti “Sanatorium Garoet Ngemplang” di Garut (*Official Tourist Bureau*, tt).



Foto 2: Para turis Belanda yang mengunjungi Situ Bagedit, Garut, Sumber: KITLV.nl



Foto 3: Brosur Hotel Villa Dolce di Garut, Jawa Barat
Sumber: Picture of Nederland East Indies

Para *Preangerplanters* juga berperan besar dalam pengembangan pariwisata dan perhotelan di Kota Bandung. Bandung merupakan ibukota dari Karesidenan Priangan, Bandung pada awalnya merupakan sebuah desa kecil mulai berkembang semenjak Deandles memindahkan Ibukota Kabupaten Bandung dari Daeyueh Kolot ke wilayah ini pada Tahun 1810, serta ditetapkannya Bandung sebagai Ibukota Karesidenan Priangan pada Tahun 1864 (Kunto, 2015: 12, 13, 17).

Bila orang-orang Eropa yang tinggal di luar Priangan lebih menyukai suasana alam dan perkebunan di wilayah ini, maka para *Preangerplanters* ini pada akhir pekan akan mengunjungi Bandung untuk mencari suasana kehidupan sub urban. Di Bandung terdapat beberapa hotel yang telah berdiri semenjak pertengahan Abad ke-19 serta menjadi primadona bagi para *Preangerplanters* dan para pelancong yang berkunjung ke Bandung. Salah satu hotel yang sangat terkenal pada periode pertengahan Abad ke-19 hingga awal Abad ke-20 di wilayah ini adalah Hotel Savoy Homann

(Kunto, 1989: 16).

Hotel Savoy Homann awalnya adalah sebuah rumah penginapan milik keluarga Homann, seorang imigran dari Jerman yang mencoba mengadu peruntungan di Tanah Hindia. Bangunan hotel yang pada awalnya hanya sebuah bangunan bambu ini kemudian direnovasi pada tahun 1880 menjadi sebuah bangunan berarsitektur *art deco* pada sekitar tahun 1880. Semenjak masa itulah Savoy Homann menjadi hotel terkemuka yang terdapat di wilayah Karesidenan Priangan (Kunto, 1989: 15)

Seiring dengan dibukanya rel kereta api yang menghubungkan Batavia dan Bandung pada tahun 1884, maka Hotel Savoy Homann semakin ramai oleh para turis dan pengunjung yang datang ke Bandung. Selain sebagai tempat menginap dari para pelancong yang mengunjungi Bandung. Hotel Savoy Homann dan Kota Bandung juga kerap kali digunakan untuk mengadakan berbagai kegiatan seperti Kongres Pengusaha Gula (*Suikerplanters*) Hindia Belanda pada tahun 1887, Kongres Teh Sedunia pada tahun 1924, dan Kongres Ilmu Pengetahuan Asia-Pasifik ke-4 pada tahun 1929 (Kunto, 1989: 16).

Pada tahun 1906 atau 96 tahun setelah pembangunan Jalan Raya Pos, Karesidenan Priangan telah berubah dari sebuah daerah yang sebelumnya dikenal sebagai *schoone slaapter* (putri tidur) atau *paradise in exile* (surga dalam pengasingan) menjadi wilayah yang begitu sibuk dengan aktivitas ekonomi, pariwisata, dan menjadi salah satu pusat aktivitas kehidupan masyarakat kolonial. Wilayah ini memang diberikan kesuburan dan keindahan alam yang luar biasa. Berada di dataran tinggi yang sejuk, Priangan bukan saja menjadi surga bagi perekonomian kolonial di Abad ke-19, namun juga menjadi “rumah” bagian orang-orang Eropa di Jawa. Seperti yang disampaikan oleh van Hoevel “Hanya alamlah kemudian yang memiliki kekayaan dan keindahan tak terhingga di sini akan dapat mewujudkan angan-angan yang kelak bakal dikenang dan dihargai orang!” (Kunto, 2014: 15-16).

C. Priangan Di Mata Para Pelancong pada MedioAbad ke-19 Hingga Awal Abad Ke-20

Para pelancong biasanya menjadikan Batavia sebagai tempat singgah sementara untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh ke pedalaman Jawa. Sebelum abad Ke-20 memasuki daerah pedalaman Priangan bukan merupakan hal yang mudah. Para pelancong dan pengunjung yang hendak melanjutkan perjalanan ke daerah pedalaman Priangan harus mengurus *toelatings-kaart* atau “karcis masuk”, sebab kalau tidak mereka hanya boleh mencapai daerah Bogor. Peraturan ini diberlakukan pertama kali pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal G.A. Baron van der Capellen pada tahun 1821 yang membatasi pergerakan orang Eropa untuk mengeksploitasi daerah ini. Meskipun telah dicabut pada tahun 1852, namun tetap bukan merupakan hal yang mudah untuk masuk ke wilayah Karesidenan Priangan (Scidmore, 1897: 23; Rush, 2013: 62; Kunto, 2014: 16-17).

Peraturan ini rupanya sangat dikeluhkan oleh para pelancong. Elizah R. Scidmore dalam *travelogue*-nya mengatakan bahwa banyak pelancong yang mengeluhkan hal ini. Ia menceritakan bahwa Alfred Russel Wallace pada sekitar tahun 1860an mengeluhkan akan sulit dan mahalnya pengurusan administrasi untuk menjelajahi Jawa. Hal ini pun masih ditambah dengan sulitnya medan serta tingginya biaya transportasi di wilayah ini. Sementara Charles W. Kinloch yang mengunjungi Priangan pada sekitar tahun 1850an mengatakan bahwa ia harus mengurus izin untuk memasuki wilayah pedalaman Jawa di kantor Gubernur Jenderal. Ia harus mengisi formulir yang berisi tujuan dia mengunjungi Jawa. Setelah mengurus formulir serta menjawab beberapa pertanyaan yang sulit ia akan mendapatkan izin perjalanan yang berlaku selama 12 bulan (Scidmore, 1897: 23-24; Rush, 2014: 62).

Sebelum adanya rel kereta api yang baru terhubung dari Batavia hingga Bandung pada tahun 1884, para pelancong menggunakan kereta kuda dengan menelusuri Jalan Raya Pos

yang dibuat pada masa Daendles. Charles W. Kinloch mengisahkan bahwa perjalanan ke Priangan sangat sulit dan mahal. Biaya sewa kereta kuda untuk menempuh jalan raya pos sekitar f 0,2/mil, namun bila melihat barang bawaan penumpang ongkos ini tidak begitu mahal, karena meskipun kecil kuda-kuda ini mampu membawa beban yang sangat besar (Rush, 2013: 64).

Kinloch (Rush, 2013: 65-69) menceritakan bahwa perjalanan melalui Jalan Raya Pos antara Batavia hingga Cisarua begitu menyenangkan karena kereta melaju dengan sangat cepat ditambah kesejukan udara dan pemandangan alam selama dalam perjalanan. Dalam perjalanan selama dua hari ini ia menginap di rumah peristirahatan yang cukup baik di dekat pos penggantian kuda. Setelah melewati Cisarua perjalanan baru terasa sulit karena ia harus berpindah ke kereta yang ditarik oleh kerbau, karena jalan yang menanjak disertai dengan hujan deras. Sekali lagi Kinloch mengagumi keindahan alam di wilayah ini terutama ketika ia melewati Puncak Pas menuju Cianjur. Di Cianjur ia beristirahat di penginapan yang dikelola oleh seorang wanita Belanda. Dari Cianjur ia harus melewati Sungai Citarum dengan *gethek* untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung yang dilanjutkan kembali dengan kereta kuda hingga tiba di Bandung yang kala itu masih ia sebut sebagai sebuah desa.

Bandung pada tahun 1850an tidak ubahnya seperti sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perkebunan kopi dan teh. Ibukota Karesidenan Priangan pun ketika itu masih berada di Cianjur. Di Bandung Kinloch beristirahat di rumah seorang pemilik perkebunan teh yang ia sebut sebagai Tuan L. Di perkebunan teh ini ia begitu mengagumi suasana dan kehidupan seorang pemilik perkebunan. Tuan L memiliki sekitar 350 Bau atau sekitar 245 hektar dengan pekerja sekitar 1700 orang (Rush, 2013: 68-69).

Kehidupan di perkebunan-perkebunan Priangan rupanya begitu menarik bagi para pelancong ini. Kinloch mengisahkan udara yang sejuk, hujan ringan setiap hari, serta pemandangan alam yang indah, merupakan hal yang bisa memulihkan kepenatan pikiran yang didapat dari kehidupan di kota. Maka tidak mengherankan bila daerah Sukabumi, Bandung, dan Garut kemudian banyak dibangun berbagai rumah-rumah penginapan (Rush, 2013: 68-69).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Elizah R. Scidmore ketika tinggal pada sebuah keluarga perkebunan teh di Sinagar, Sukabumi. Selama di perkebunan ini ia tinggal dalam sebuah bungalow yang sangat besar yang ia katakan mampu bertahan hingga 20 sampai 30 tahun. Di sekitar perkebunan ini selain udaranya yang sejuk sang tuan rumah menanam berbagai jenis pohon buah, bunga-bunga dan memelihara sapi di sekitar bungalow tersebut. Keluarga ini hampir setiap malam mengundang kerabat-kerabat mereka dari Batavia, Bogor, ataupun Bandung untuk larut dalam pesta dansa. Para pemusik dan teater pun sengaja mereka datangkan dari Eropa. Di dalam buku tamu keluarga ini terekam mengenai asal dari para tamu dan undangan yang mengunjungi bungalow dan larut dalam pesta yang keluarga ini adakan sebagian besar berasal dari negara-negara di Eropa, Amerika Sirikat, Singapura, dan Australia (Scidmore, 1897: 128-129).

Scidmore (Rush, 2013: 164-166) melihat hubungan antara keluarga di perkebunan ini dengan para pekerja-pekerja mereka. Ia terkejut dengan sikap yang ditampilkan oleh para pekerja dan tuan-tuan mereka. Ia melihat bahwa apa yang ia bayangkan dengan sistem tanam paksa pada masa sebelumnya tidak pernah benar-benar terjadi. Scidmore menyaksikan para pekerja di perkebunan teh ini menjalankan rutinitas keseharian biasa, seakan mereka tidak tinggal dalam alam kolonialis Eropa. Ibu-ibu ini menampilkan suatu pertunjukan indah ketika mereka memetik teh dan mengumpulkan daun teh dengan dipayungi embun pagi di hamparan hijau kebun teh yang asri.

Hubungan antara orang Eropa dan masyarakat bumiputera yang “terlihat” harmonis

inipun juga disaksikan oleh J.W.B Money seorang pengacara Inggris yang mengunjungi Cianjur pada sekitar tahun 1860an. Dalam sebuah permainan balap kuda dan perburuan rusa yang ia ikuti nampak sekali keakraban antara orang bumiputera dengan orang Eropa. Ia menyaksikan suatu relasi hangat antara pemimpin bumiputera seperti para bupati dan kepala suku di sekitar Cianjur dengan residen dan tuan-tuan tanah Eropa, demikian juga ketika dalam perburuan tidak ada suatu kecanggungan relasi antara orang bumiputera dari kelas bawah dengan orang-orang Eropa yang notabene adalah tuan mereka. (Rush, 2013: 84-88).

Money (Rush, 2013: 88-89) juga terkesan dengan pembagian kekuasaan di Jawa antar pemimpin bumiputera dengan orang Eropa, bagi dia yang merupakan pejabat kolonial Inggris di India hal ini sangat menarik, sebab harmonisasi yang terjalin antar pemimpin lokal dan Eropa di Hindia telah menciptakan suatu kesinambungan politik dan ekonomi di wilayah ini. Hal ini masih ditambah dengan kemampuan para pemimpin dan tuan-tuan tanah Eropa dalam hal penguasaan bahasa lokal. Maka tidak mengherankan apabila penduduk bumiputera kerap kali meminta bantuan pada orang-orang Eropa bila mereka mengalami kesulitan. Menurut Money ini menunjukkan rasa hormat pada satu pihak dan kebaikan hati pada pihak yang lain (Rush, 2013: 89-90).

Pendapat Scidmore dan Money mengenai relasi antara kaum bumiputera dan orang Eropa di Hindia seakan menjungkirbalikan pandangan umum pada masa itu mengenai kolonialisme dan hubungan antara penjajah dan yang terjajah. Mengenai bagaimana hubungan relasi ini dapat terjalin antara penjajah dengan pihak yang terjajah, dimana hal ini sangat tidak mungkin berlaku di India, dimana Inggris selalu menghadapi gejolak-gejolak perlawanan dari orang-orang India.

Hal yang sama pun juga diungkapkan oleh H.W. Ponder ketika mengunjungi Hindia Belanda pada sekitar tahun 1935. Ia membandingkan antara kehidupan orang-orang Inggris di Melayu dengan orang-orang Belanda di Hindia. Bagi dia orang Belanda telah menganggap Hindia sebagai rumahnya dan mereka “nyaman akan rumahnya”. Orang-orang Eropa yang ada di Hindia ini tanpa ragu untuk membiarkan anak-anak mereka bermain-main di bawah terik matahari ataupun bergaul dengan anak-anak bumiputera. Orang-orang Eropa ini juga telah beradaptasi dengan segala sesuatu yang ada di Hindia seperti dalam hal berpakaian, makanan, perilaku dan kebiasaan, bahasa, dan segala hal yang terkait dengan kehidupan bumiputera di koloni ini. Ponder secara tegas mengatakan bahwa “Bangsa Belanda telah sangat paten dan teratur (...) menjadikan Jawa sebagai sebuah koloni yang nyaris sempurna. Semacam negeri tropis Belanda” (Rush, 2013: 215-216, 222).

Disamping mengamati keindahan alam dan kehidupan orang-orang Eropa di Priangan, beberapa pelancong juga mengamati kehidupan masyarakat bumiputera yang ada di Priangan. Elizah R. Scidmore dalam bukunya membahas mengenai kehidupan sebuah pedesaan yang terletak di sekitar Perkebunan Sinagar. Ia mengamati kehidupan pedesaan di Sinagar yang di sekeliling desa tersebut di kelilingi oleh pohon-pohon asam dan kenari. Di desa tersebut ia juga menyaksikan pertunjukan wayang dan gamelan yang berisi kisah-kisah kejayaan masa lampau penduduk bumiputera. Penduduk Desa Sinagar rata-rata bekerja di perkebunan dan pabrik teh, serta menjadi petani. Gambaran mengenai pedesaan di Sinagar ini mirip dengan apa yang ditampilkan dalam Pameran Kolonialisme Internasional di Chicago pada tahun 1889. Pameran ini juga menjadi salah satu pendorong Scidmore untuk mengunjungi Hindia Belanda (Scidmore, 1897: 143-144).

Sementara A.J. Barnouw terkesan dengan nilai-nilai tradisi dari masyarakat di sekitar perkebunan kina musim tanam padi. Para petani tersebut mengedakan *slametan* atau persembahan untuk mendoakan kelancaran proses penanaman hingga masa panen tiba. Ia menceritakan para petani mendoakan bibit padi yang hendak ditanam yang diletakkan

diantara dua buah lampu yang menjadi simbol matahari dan bulan. Barnouw juga menyinggung nilai “semangat” yang menjadi nilai pendorong bagi para petani untuk selalu bekerja keras (Barnouw, tt: 46).

Hal yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Augusta de Wit ketika mengunjungi sebuah desa di Priangan. Jalan menuju desa ini adalah sebuah jalan tanah yang halus dengan sepanjang perjalanan terdapat pohon-pohon bambu, pohon rasamala, pohon kamboja, dan tanaman-tanaman lain. Selama perjalanan ke desa dengan menggunakan kuda ia berpapasan dengan seorang anak kecil yang melintas dengan kerbaunya, seorang perempuan yang membawa bakul nasi sedang menuju ke sawah, dan sekelompok petani yang hendak bekerja, de Wit melihat ini sebagai keharmonisan kehidupan masyarakat desa di Hindia (De Wit, 1907: 236, 239, 243-244).

Dalam perjalanannya De Wit singgah di sebuah desa. Keadaan di desa ini pada pagi hari sangat sepi karena para lelaki sedang berada di sawah, para peerempuan sendiri sedang sibuk di dapur atau sedang menenun. Ia menyaksikan anak-anak yang sedang bermain, orang tua yang begitu bahagia bermain dengan cicitnya. Ia begitu terkesan dengan keadaan di pedesaan ini. Menurutnya mereka adalah para penduduk bumiputra yang belum terpengaruh oleh ego dan sombongnya orang-rang Eropa yang merubah kebiasaan dan perilaku mereka seperti yang terjadi di kota-kota Hindia (De Wit, 1907: 253-254).

Kehidupan masyarakat pedesaan menjadi daya tarik bagi para pelancong yang mengunjungi Hindia. Keramahan dan kehidupan masyarakat menjadi ciri khas yang menunjukkan “keaslian kehidupan Hindia. Hal inipun ditambah dengan promosi Hindia pada setiap pameran kolonial yang kerap kali menampilkan suasana kehidupan di pedesaan (Bloembergen, 2006).



Foto 4: Suasana pasar di sekitar Jalan Raya Pos
Sumber: Official Tourist Bureau

Desa kemudian juga dimanfaatkan oleh *Official Tourist Bureau* sebagai suatu tujuan dari promosi wisata mereka. Dalam panduan perjalanan wisata ke Cianjur, para turis dapat mengunjungi sebuah desa dan pasar yang berada di daerah Pacet. Mereka mempromosikan bahwa di pasar terdapat suatu pemandangan kehidupan masyarakat bumiputra yang penuh senyum dan bahagia (Official Tourist Bureau, tt, 43).

Dibangunnya jalur kereta api dari Batavia hingga Bandung pada tahun 1884, menambah daya tarik dan mempermudah kunjungan ke wilayah Karesidenan Priangan. Kereta api pun juga menjadi primadona baru dari atraksi perjalanan wisata ke wilayah Priangan. Dari Batavia para penumpang yang akan menuju Priangan akan berangkat dari Stasiun Koningsplein (Gambir). Biaya perjalanan kereta api untuk gerbong kelas pertama berkisar antara f0,45 sampai f0,55 per kilometer, untuk gerbong kelas dua berkisar antara f0,3 sampai f0,4 per kilometer, dan terakhir untuk gerbong kelas tiga berkisar f0,15 untuk 250 km pertama, serta f0,5 untuk 250 km berikutnya. (Scidmore, 1897: 50-51; Official Tourist Bureau, tt: 13; Reitsma, 1930: 31).

Scidmore mengisahkan perjalanannya dengan menggunakan kereta api menuju Bandung. Ia naik kereta api dari Stasiun Bogor, karena sebelumnya ia baru saja mengunjungi Kebun Raya Bogor. Dari Bogor ia berangkat pada pagi hari. Daerah pertama yang ia lewati adalah daerah sekitar punggung Gunung Salak. Di tempat ini ia mengagumi keindahan

perkebunan kopi, teh, dan kina yang menghampar hijau luas. Ia pun membayangkan kehidupan seorang *Preangerplanters* yang kaya dan memiliki banyak pekerja. Dalam perjalanan antara Sukabumi-Bandung, Scidmore terkesan pada hamparan sawah, saluran irigasi, dan para petani di Tanah Pasundan. Ia terkesan bagaimana sebuah bangsa yang terjajah ini masih mampu merekam pengetahuan tentang agrikultura yang sangat luar biasa. Ia menyebut wilayah ini sebagai salah satu “The Granary of The East”. Hal ini karena meskipun daerah ini berpenduduk padat, namun berkat pengetahuan mereka tentang agrikultura, mereka menghasilkan panen yang berlimpah, serta mampu mengekspor beras mereka keluar daerah, sesuatu yang tidak terbayangkan olehnya (Scidmore, 1897: 147-148).

Setiba di daerah sekitar Cianjur kereta akan berhenti sejenak untuk memberi waktu bagi para penumpang untuk makan siang. Makanan untuk para penumpang di gerbong kelas 1 dan 2 biasanya telah dipesan lebih dahulu di beberapa stasiun sebelum tiba di Cianjur. Jadi begitu tiba di Cianjur penumpang akan langsung disuguhi oleh aneka jenis makanan yang telah di pesan. Makan siang yang biasa disajikan biasanya adalah *rijstaffel* atau sesuai pesanan, seperti *steak* atau *bifsteak* (Scidmore, 1897: 149; Ariwibowo, 2011: 180-181).

Setelah makan siang para penumpang ini akan melanjutkan perjalanan menelusuri hutan-hutan antara Cianjur hingga Padalarang. Bila beruntung para penumpang akan berpapasan, dengan harimau atau badak yang sedang melintasi hutan, serta melihat aliran Sungai Citarum yang mengalir deras. Perjalanan ini pun semakin seru ketika melewati beberapa jembatan dan terowongan kereta api. Memasuki Bandung akan terlihat sekali lagi hamparan perkebunan kopi dan Gunung Tangkuban Perahu yang nampak dari Kejauhan (Scidmore, 1897: 149-151).

Setiba di Bandung para turis biasanya akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke Garut atau Tasikmalaya. M.A.J. Keling menyebut Bandung pada masa kolonial sebagai *Europa in de Tropen* (Eropa di daerah tropis). Hal ini karena udara Bandung yang sejuk dan dipenuhi oleh villa-villa yang berdiri megah dan indah hampir di seluruh penjuru kota ini. A.J. Barnouw mengatakan bahwa udara Bandung sangat cocok dan sehat untuk orang-orang Eropa. ia mengatakan Bandung dapat menjadi rumah permanen bagi orang-orang di Hindia (Scidmore, 1897: 150; Barnouw, tt: 43; Kunto, 2014: 265).

Di Bandung para pelancong dapat mengunjungi berbagai obyek wisata menarik seperti menuju ke Lembang untuk mengunjungi perkebunan kopi, teh dan kina; mengunjungi observatorium Bosscha yang hingga awal Abad Ke-20 hanya ada tiga di Dunia; atau menikmati permandian air panas, mengunjungi kolam sulfur, atau air terjun yang tersebar di kota ini. Bagi para *Preangerplanters* Bandung menjadi tempat berakhir pekan untuk menikmati suasana *urban culture*. Di Bandung mereka yang sehari-hari hidup di perkebunan

ini akan memanfaatkan akhir pekan mereka untuk berbelanja, pergi ke klub (*societiet*), menyaksikan pertunjukan *toneel*, berjalan-jalan menikmati sore di alun-alun dan sekitar kota Bandung, dan berbagai aktivitas lain yang tidak mereka dapatkan di area perkebunan (Kunto, 2014: 268-282).

Bandung ketika itu juga dikenal akan festival balap kuda. Balapan kuda yang biasa diadakan setiap tahun di Lapangan Tegallega Bandung ini biasanya diadakan bersama dengan Pameran Tahunan Bandung yang biasa dikenal sebagai *Jaarbeurs* yang diadakan pada sekitar bulan Juni-Juli. Festival ini menjadi ajang *showoff* orang-



Foto 5: Liburan sebuah keluarga Eropa di Gunung Tangkuban Prahu
Sumber: collectie.wereldculturen.nl

orang Eropa ketika itu untuk menunjukkan kekayaan dan mode terbaru yang mereka kenakan. Elizah Scidmore dalam bukunya juga mencatat ajang balap kuda ini. Ia mengatakan bahwa kuda Bupati Bandung ketika itu selalu menjadi juara setiap tahunnya. Ia juga memberi penilaian tentang Bupati Bandung ketika itu. Menurutnya meskipun ia memiliki kekuasaan dan tinggal dalam sebuah istana yang ia sebut *dalem* yang terletak di tengah kota, namun ia tak ubahnya seperti boneka pemerintah kolonial Belanda. Bupati ini juga mengenakan gaya hidup barat dan memiliki sebuah villa besar seperti layaknya orang Eropa yang terletak di wilayah suburban Bandung (Scidmore, 1897: 150).

Seperti yang dikatakan oleh M.A.W. Brouwer seorang Belanda yang sempat tinggal di Bandung yang mengatakan bahwa “Bumi Pasundan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum”. Hal itu dirasa tidaklah terlalu berlebihan. Di masa awal berdirinya, kemajuan Karesidenan Priangan memang sangat didukung oleh pesatnya pertumbuhan perkebunan dan pariwisata. Keindahan alam dan kesejukan alamnya telah menjadikan Priangan sebagai destinasi utama orang-orang kulit putih baik yang berada di Batavia ataupun penjuru dunia untuk mengunjungi wilayah tropis yang sejuk dan jelita ini. Bahkan sejarah pun mencatat bahwa aktor legendaris Charlie Chaplin pun sempat singgah di wilayah ini (Kunto, 1989: 23-25; Kunto, 2014: 57).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hindia Belanda terutama Karesidenan Priangan menampilkan sesuatu yang menarik bagi para turis yang mengunjungi wilayah ini. Dalam benak para turis ini sebelum mereka melakukan perjalanan ke Jawa yang nampak hanyalah bayangan sebuah daerah yang jauh dari nilai-nilai keadaban dan budaya yang berkembang di barat ketika itu. Sama seperti pandangan kaum orientalis pada masa itu yang memandang masyarakat timur hanya memiliki pemahaman nilai dan budaya yang rendah. Stigma yang tertangkap mengenai “Dunia Timur” yang berkembang dalam benak dan pikiran mereka seakan berubah ketika mereka pada akhirnya mengunjungi, menjelajah, dan mengeksplorasi kehidupan alam dan budaya masyarakat Timur. Perubahan persepsi ini muncul ketika mereka mulai bertemu dan berinteraksi dengan alam, budaya, dan masyarakat setempat. Stigma tentang Timur yang tidak beradab dan terbelakang seakan sirna dan berubah menjadi kekaguman akan keragaman, kekayaan, keindahan, dan harmoni yang ditampilkan oleh alam, budaya, dan masyarakat Timur, terutama di Karesidenan Priangan.

Pada akhirnya ada suatu kekaguman dan keterkejutan para pelancong ini mengenai Hindia. Di tengah kuatnya pandangan rasisme dan kolonialisme kulit putih, kondisi Hindia tidaklah sejauh yang mereka pikirkan. Persepsi tentang Hindia pun pada akhirnya berubah dengan kekaguman akan kekayaan peninggalan sejarah dan budaya; kehidupan penduduk asli yang terlihat bahagia dengan segala keterbatasan mereka, terutama di wilayah pedesaan; harmonisnya hubungan sosial dan budaya antara masyarakat bumiputera dan Eropa. Interaksi yang terjalin selama dalam perjalanan mereka dengan penduduk bumiputera pada akhirnya juga meruntuhkan citra masyarakat Hindia Belanda yang malas dan terbelakang.

Para pelancong yang didominasi oleh para *flaneur* yang hanya ingin melihat-lihat Hindia, ternyata mampu menuangkan pengalaman mereka dalam suatu tulisan yang menarik. Meskipun terkadang ditemukan pandangan-pandangan negatif mengenai Hindia dan masyarakatnya, namun suatu bentuk penulisan yang spontan ini justru menjadi kekuatan dalam melihat sisi humanis dari masyarakat bumiputera serta kepolaan peristiwa yang berlangsung pada masa itu.

B. Saran

Penggunaan *travelogue* sebagai sumber utama dalam kajian sejarah memang bukan merupakan hal yang mudah. Dibutuhkan suatu perbandingan antara kisah yang dihadirkan oleh para pelancong ini dengan sumber sejarah formal yang terkait dengan tema yang ditampilkan. Namun, melalui *travelogue* sejarawan akan mampu mengulas sejarah sehari-hari yang selama ini tersisih dari sumber-sumber primer dalam kajian historiografi. Diharapkan pada masa yang akan datang semakin banyak sejarawan yang menggunakan berbagai jurnal atau berita perjalanan, buku harian, memoir, serta berbagai catatan yang bersifat pribadi untuk dapat digunakan dalam kajian historiografi terutama terkait dengan tema kajian sejarah sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Sunjayadi, 2007. *Vereeniging toeristen verkeer Batavia 1908-1942: Awal Turisme di Hiindia Belanda*. Jakarta: FIB UI.
- Ariwibowo, G. A., 2011. "Pendidikan Selera: Perkembangan Budaya Makan di Perkotaan Jawa pada Periode Akhir Kolonial". *Thesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Barnouw, A. J., tt. *A Trip Through The Dutch East Indies*. Gonda: Knuch and Knuttel.
- Buntler, Richard dan Tom Hinch, 2007. *Tourism and Indigenous People: Issues and Implication*. Oxford: Elsevier.
- Burke, P., 1997. *Varieties of Cultural Histories*. New York: Cornell University Press.
- Bloembergen, M., 2006. *Colonial Spectacle: The The Netherlands and The Dutch East Indies at The World Exhibition 1883-1931*, Singapore: NUS Press.
- De Wit, A., 1905. *Java Fact and Fancies*. London: Chapman and Hall Ltd.
- De Boer, M. G., "Het Scheepvaartveerker in den Indieschen Archipel" dalam *Holland Colonial Call*, 1930. he Hague: Dutch-British Publishing Companny, ltd.
- Dick, H. (eds), 2002. *The Emergence of National Economy: An Economic History of Indonesia 1850-2000*. Honolulu: University of Hawai Press.
- Haryanto Kunto, 1989. Savoy Homann: *Persinggahan Orang Penting*, Bandung: Bidakara Hotel Savoy Homann.
- _____, 2014. *Wajah Bandoeng Tempo Dulu*, Granasia: Bandung.
- Holland Colonial Call, 1930. *Holland Colonial Call*. The Hague: Dutch-British Publishing Companny, ltd.
- Houben, V. J. H., 2002. "Java in The 19th Century: Consolidation of a Colonial State" dalam Dick, Howard. (eds), 2002, *The Emergence of National Economy: An Economic History of Indonesia 1850-2000*. Honolulu: University of Hawai Press.
- Java Motor Club, 1918. *See Java Garden of The East*. Soerabaja: Michael Java Motor Touring Co.
- Kartodirjo, S., 2014. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium Ke Imperium*, Jil. 1. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lindbald, T. J., 2002. "The Late Colonial State and Colonial Expansion, 1900-1930s" dalam Dick, Howard. (eds), 2002, *The Emergence of National Economy: An Economic History of Indonesia 1850-2000*. Honolulu: University of Hawai Press.
- Museum Volkekunde, tt. *De Mens in Beeld: Verzamelde Colectieprofielen*, Leiden: Museum Volkekunde.
- Nas, P. J. M dan Pratiwo, 2002. "Java and de groote postweg, la grande route, the great mail road, Jalan Raya Pos" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, On the roadThe social impact of new roads in Southeast Asia* 158 (2002), no: 4, Leiden, 707-

- 725.
- Official Tourist Bureau, tt. *Java The Wonderland*, Batavia: Official Tourist Beareau.
- Raffles, T. S., 1830. *The History of Java*, Vol. 1-2, London: John Murray.
- Reitsma, S. A., 1930. "De Spoor en Tramwegen in Nederlansche Indie" dalam Holland Colonial Call, Holland Colonial Call. The Hague: Dutch-British Publishing Company, ltd.
- Ricklef. M.C., 2001. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Hampshire: Palgrave.
- Rush, J. R., 2013. *Jawa Tempo Dulu: 650 Tahun Bertemu Dunia Barat 1330-1985*. Depok: Komunitas Bambu.
- Scidmore, E. R., 1897. *Java: The Garden of East*. New York: The Century Co.
- Stepan, N. L., 2001. *Picturing Tropical Nature*. London: Reaktion Book Ltd
- Taylor, J. G., 2003. *Indonesia: People and History*. New York: Yale University Press.
- Van der Weide, Eifje, 2012. Changing Relevance Of Space In Time: Colonisation, Globalisation And The Significance Of Connectivity. *Thesis*. Utrecht: University of Utrecht, the Netherlands.
- Vickers, A., 2005. *A History of Modern Indonesia*. Cambrigde: Cambridge University Press.
- Wearing, S. (eds.), 2010. *Tourist Culture: Identity, Place, and The Traveler*, London: Sage Publishing.

Internet:

kitlv.nl
collectie.wereldculturen.nl

WACANA IDENTITAS NASIONAL PADA BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH DI INGGRIS DAN INDONESIA: KAJIAN KOMPARATIF

Hieronymus Purwanta, Heribertus Hery Santosa dan Anton Haryono

Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma,
dan Fakultas KIP, Universitas Sanata Dharma
Email: purwantah@gmail.com

Abstrak

Salah satu tujuan terpenting pendidikan sejarah adalah untuk menumbuhkan identitas dalam diri generasi muda. Artikel ini bermaksud untuk meneliti bagaimana bangsa Inggris dan Indonesia memproduksi wacana identitas nasional mereka melalui buku teks pelajaran sejarah SMA. Metode yang digunakan adalah Critical Discourse Analysis (CDA) terhadap narasi yang terdapat pada buku teks pelajaran sejarah dari kedua negara sebagai subjek kajian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks pelajaran sejarah di Inggris mewacanakan bahwa bangsa Inggris (British) merupakan subjek dari berbagai peristiwa sejarah yang terjadi, serta menarasikan pencapaian dan sukses yang diperoleh masyarakat Inggris. Bahkan, untuk menonjolkan wacana itu, pengarang buku teks pelajaran sejarah melakukan heroifikasi dan mitologisasi berbagai tokoh dan peristiwa sejarah. Sebaliknya, buku teks pelajaran sejarah di Indonesia justru mewacanakan masyarakat Indonesia sebagai objek dari kekuatan bangsa asing, khususnya bangsa Belanda dan peradaban Eropa. Dari sudut pandang ini, kebudayaan Indonesia sebagai sumber identitas masyarakat dinegaskan dan digambarkan sebagai “kuno” dan “kolot” yang tidak cocok dengan kebudayaan modern.

Kata kunci: wacana, identitas nasional, buku teks, pelajaran sejarah

NATIONAL IDENTITY DISCOURSE ON THE HIGH SCHOOL HISTORY TEXTBOOK IN UNITED KINGDOM AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY

Abstract

One of the most important goals of history education is to infuse national identity to young generation. Aim of this article is to explore of how British (United Kingdom) and Indonesia product their discourse of national identity through their high school history textbooks. A methods use is Critical DiscourseAnalysis (CDA) where content of history textbooks from the two countries as subject of analysis. Approach used is hermeneutics.Result shows that high school textbooks in United Kingdom discoursing British as subject of historical events, achievement and success of British people. Moreover, authors of the textbooks made heroification and mythologization. In contrast, high school textbooks in Indonesia discoursing Indonesians as object of foreign powers especially Dutch and Western civilization. From this viewpoint, Indonesian cultures as source of identity is negated and described as “oldfashion” that couldn't fit modern culture.

Keywords: discourse, national identity, textbook, history education

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pendidikan sejarah adalah untuk membentuk atau membangun kesadaran identitas sosio-kultural nasional. Secara etimologis, identitas nasional merupakan penggabungan dua kata, yaitu “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang dapat dimaknai sebagai ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Ditinjau dari perspektif asal usul, identitas bermula dari pernyataan diri atau pemberian. Identitas yang merupakan pernyataan diri hanya berlaku pada manusia. Melalui refleksi panjang, akhirnya manusia menyadari siapa dirinya, baik ciri fisik maupun kepribadian. Kesadaran akan identitas tersebut kemudian dinyatakan kepada pihak lain ketika bersosialisasi. Di lain pihak,

identitas yang berasal dari pemberian adalah penamaan yang dilakukan manusia terhadap segala sesuatu yang diketahuinya (Glaserfeld, 1984).

Identitas memiliki fungsi sangat penting, karena memberikan penjelasan yang relatif benar dan tepat. Tanpa identitas, sesuatu akan sulit diidentifikasi dan digali informasi yang jelas, benar dan tepat. Sartono menjelaskan pentingnya identitas dengan menganalogikan pada orang yang kehilangan ingatan:

Tanpa identitas, sukar bahkan mustahil melakukan komunikasi dalam masyarakat. Identitas mendefinisikan status dan peran seseorang, mencakup ciri-ciri pokok seseorang baik yang fisik maupun sosial-budaya. Jika seseorang kehilangan memori, antara lain karena senilitas atau penyakit syaraf, timbulah pada dirinya kekacauan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kecuali tidak mampu mengenal identitas dirinya sendiri, dia juga tidak dapat menentukan identitas orang lain. Akibatnya ialah miskomunikasi terus menerus. (Kartodirdjo, 2005: 114-115)

Analogi yang dikemukakan Sartono tersebut berlaku tidak hanya pada tataran individual atau perseorangan, tetapi juga pada tataran kolektif, baik keluarga, etnis maupun bangsa. Dari sudut pandang ini, tanpa memiliki identitas, bangsa akan tidak memiliki akar untuk menghidupi aktivitas, vitalitas dan kreativitasnya. (Wiriaatmadja, 1992: 68)

Kata kedua adalah “nasional” yang merujuk pada konsep kebangsaan. Anderson (1991: 6) menempatkan negara kebangsaan sebagai *imagined community* yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi komunitas imajiner. Berbeda dengan komunitas yang nyata dimana anggotanya saling kenal dan secara intensif saling berinteraksi, *imagined community* merupakan komunitas yang anggotanya secara garis besar dapat dikatakan tidak saling kenal serta tidak pernah saling bertemu dan berinteraksi secara langsung. Dari sudut pandang inilah maka negara kebangsaan ditempatkan sebagai komunitas yang “tercita dan tercitra” kan.

Penempatan negara kebangsaan sebagai komunitas yang tercitra, karena keberadaannya dicita-citakan bersama oleh komunitas-komunitas di bawahnya. Renan (1996: 51) mengajukan pandangan bahwa terdapat dua unsur yang menjadi prinsip spiritual negara bangsa. Pertama adalah sejarah yang berisi pengalaman-pengalaman bersama dan menjadi ingatan kolektif, sehingga menumbuhkan solidaritas sebagai pewaris berbagai nilai yang dihidupi sampai sekarang dan pemilik nasib yang sama. Unsur kedua adalah keinginan untuk hidup bersama, kehendak untuk secara bersama mempertahankan dan mengembangkan berbagai warisan masa lampau:

The nation, like the individual, is the outcome of a long and strenuous past of sacrifice and devotion. Of all cults, the cult of ancestors is the most legitimate, since our ancestors have made us what we are. A heroic past of great men, of glory (I mean genuine glory): this is the social capital on which a national idea is established. To have common glories in the past and common will in the present; to have done great things together and to will that we do them again: these are the conditions essential to being a people... (Renan, 1996: 58)

Pada kutipan di atas, Renan secara jelas menyatakan bahwa bangsa, sebagaimana perseorangan, merupakan hasil dari masa lampau yang panjang dan berat dari pengorbanan dan kebaktian. Diantara semua kebudayaan, budaya para leluhur adalah yang paling sah, karena para leluhurlah yang membuat kita seperti sekarang ini. Masa lampau orang-orang besar yang heroik merupakan modal sosial tempat bersemainya gagasan tentang negara bangsa. Memiliki kebesaran masa lampau dan semangat untuk secara bersama membuat keberhasilan besar merupakan hal yang mendasar sebagai rakyat.

Selain sebagai cita-cita bersama, negara kebangsaan juga menjadi citra bersama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 286) kata citra diartikan sebagai gambaran atau rupa.

Gambaran tersebut bukan dalam arti nyata, tetapi lebih merupakan aktivitas mental. Pada Webster Dictionary penjelasan lebih detail diberikan untuk kata “*image*” sebagai “*a mental conception held in common by members of a group and symbolic of a basic attitude and orientation*” atau “*a popular conception (as of a person, institution, or nation) projected especially through the mass media*”. (<http://www.merriam-webster.com>) Dalam konteks ini, citra merupakan gambaran yang mengendap pada pikiran warga bangsa tentang negara bangsa Indonesia dan dibangun melalui informasi dari media.

Media berperan sangat penting dalam penumbuhkembangan identitas nasional. Anderson (1991: 18) yang mengkaji tentang peran media cetak dalam nasionalisme Eropa, antara lain menjelaskan sebagai berikut:

...the development of print-as-commodity is the key to the generation of wholly new ideas of simultaneity, still, we are simply at the point where communities of the type 'horizontal-secular, transverse-time' become possible. Why, within that type, did the nation become so popular? The factors involved are obviously complex and various. But a strong case can be made for the primacy of capitalism.. (Anderson, 1991: 37)

Dari kutipan tersebut dapat dipahami penjelasan Anderson bahwa perkembangan komoditas cetak merupakan kunci lahirnya generasi yang memiliki gagasan yang sungguh-sungguh baru, yaitu komunitas bertipe “horizontal-sekuler, melintang waktu”¹ menjadi mungkin diwujudkan. Faktor yang menjadikan gagasan tentang negara bangsa sangat populer pada masyarakat tipe tersebut adalah kompleks, tetapi terutama oleh keunggulan kapitalisme.

Tentu saja media cetak bukan merupakan faktor penyebab tunggal lahir dan berkembangnya nasionalisme. Dalam kasus nasionalisme pada wilayah yang sebagian besar rakyatnya tidak media cetak *minded*, komunikasi terjadi dalam berbagai cara, antara lain melalui media cetak, radio, rapat-rapat akbar dan berita dari mulut ke mulut.

Kesadaran sebagai warga bangsa merupakan sumber bagi lahir dan berkembangnya identitas nasional. Oleh karena negara bangsa merupakan *imagined community*, maka identitas nasional pada umumnya bersifat abstrak dan berkembang dari waktu ke waktu. Kartodirdjo (1990: 56) berpedapat bahwa identitas nasional memiliki ciri pokok: historisitas, keunikan dan partikular. Dijelaskan bahwa:

Historisitas sebagai ciri utama sebenarnya inheren pada identitas sebagai tumpuan pengalaman kolektif, tidak lain karena pengalaman itu berakumulasi lewat proses historis atau perkembangan. Proses itu terjadi secara unik yaitu bagaimana sebenarnya terjadi dan menghasilkan produk yang kita kenal sebagai identitas. Hasil itu mau tidak mau merupakan hal yang khusus atau partikularitas. Subjektivitas menonjol apabila identitas itu ditempatkan dalam hirarkhi identitas humanitas universalitas. (Kartodirdjo dalam Depdikbud, 1990: 56)

Produk cetak tidak hanya penting pada tahap lahirnya nasionalisme, tetapi juga pada pewarisan identitas nasional kepada generasi baru. Salah satu bentuk produk cetak yang berperan penting dalam mewariskan identitas nasional adalah buku teks pelajaran sejarah. Sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan sejarah, yaitu mewariskan identitas nasional, buku teks pelajaran sejarah disusun dengan cermat untuk mewujudkan tujuan pewarisan tersebut.

Banyak ahli berusaha menjelaskan pengertian buku teks, antara lain Warrant (dari Mahmood, 2006: 3) menjelaskan bahwa “*A textbook is printed instructional material in bound form, the contents of which are properly organized and intended for use in elementary or high school curricula*”. Maksudnya, buku teks merupakan bahan instruksional yang bentuknya sudah tersatukan, isinya sudah terorganisasi secara baik dan diarahkan untuk

¹ Masyarakat horizontal-sekuler adalah masyarakat yang menghargai akan kesederajatan antar sesama manusia dan memfokuskan energi untuk mengembangkan peri kehidupan dunia. Di pihak lain, melintang waktu menunjukkan hubungan atau keterkaitan temporal antara masyarakat masa kini dan masa lalu. Bandingkan dengan Vessey, 2011: 27.

digunakan bagi kurikulum Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Atas.

Ahli lain memahami buku teks dari perspektif fungsinya, yaitu sebagai media pembelajaran (instruksional) yang dominan peranannya di kelas; media penyampaian materi kurikulum; dan bagian sentral dalam suatu sistem pendidikan (Suryaman, 2007: 3). Bahkan buku teks juga dikategorikan sebagai alat bantu siswa memahami dan belajar dari hal-hal yang dibaca. Buku pelajaran juga merupakan alat bantu memahami dunia (di luar dirinya).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil pemahaman bahwa buku pelajaran merupakan buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang pendidikan tertentu sebagai media pembelajaran (instruksional), berkaitan dengan suatu bidang studi. Buku pelajaran merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya, biasa dilengkapi sarana pembelajaran (seperti pita rekaman), dan digunakan sebagai penunjang program pembelajaran.

Materi pembelajaran yang terdapat pada buku teks diorganisasi sesuai dengan tahapan-tahapan pencapaian tujuan yang terdapat dalam kurikulum. Dari sudut pandang ini, buku teks pelajaran sejarah dipandang mampu menanamkan nasionalisme apabila berisi uraian fakta historis dan interpretasi yang menumbuhkan kesadaran diri sebagai warga bangsa dan mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral bagi pembaca. Pada tingkat kurikuler, buku teks pelajaran sejarah dituntut untuk memuat uraian yang membangun karakter atau identitas kultural nasional yang kuat, memberi dorongan untuk menjaga kohesivitas dan progresivitas masyarakat dan mengembangkan kemampuan akademik yang tinggi bagi siswa sebagai pembaca.

Dari kajian tentang fungsi dan peran penting buku teks dalam mencapai tujuan pendidikan sejarah di sekolah, tulisan ini diarahkan untuk mencermati isi buku teks pelajaran sejarah di Inggris dan Indonesia.

II. KAJIAN LITERATUR

A. Pelajaran Sejarah di Inggris

Secara kurikuler tujuan pelajaran sejarah di Inggris adalah untuk melengkapi siswa agar mampu berpikir kritis, mempertimbangkan bukti, menyaring pernyataan dan argumen, serta mengembangkan perspektif dan penilaian. Selain itu, siswa diarahkan untuk mengetahui masa lampau dan posisi Inggris di dunia internasional untuk memahami tantangan masa kini. Selanjutnya, sasaran kurikulum nasional pelajaran sejarah adalah untuk memastikan bahwa semua siswa, antara lain mengetahui serta memahami kisah negeri itu: bagaimana masyarakat Inggris mengembangkan bangsanya dan bagaimana Inggris mempengaruhi dunia. Selain itu siswa juga diarahkan untuk mengetahui serta memahami sejarah Inggris sebagai satu proses yang saling terkait, kisah kronologis dari penghuni pertama kepulauan ini sampai perkembangan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan hari ini. Dari tujuan dan sasaran tersebut, terlihat bahwa nasionalisme Inggris diusahakan untuk diwariskan terutama melalui narasi tentang “bagaimana masyarakat Inggris mengembangkan bangsanya dan bagaimana Inggris mempengaruhi dunia”. Pengutamaan atau dalam istilah van Dijk (Rosidi, 2007) sebagai struktur supra terlihat dari penempatannya sebagai yang pertama dalam Sasaran Kurikulum.

Ditinjau dari pendekatan yang digunakan oleh pengarang, historiografi pendidikan di Inggris menggunakan pendekatan narratif modern. Salah satu buku teks yang membahas tentang sejarah Inggris dengan menggunakan pendekatan narratif adalah *British Empire* (Levine, 2007). Penggunaan pendekatan narratif modern antara lain dapat dilihat dari uraian

pembukanya untuk bab III yang membahas tentang *Britain in India* sebagai berikut:

In the colonial scheme of things, Britain's imperial interests in India were among its most important as early as the seventeenth century. It would, of course, be the middle of the nineteenth century before the British government laid formal claim to ruling large parts of India, but that did not mean that British India was not central to Britain's Empire at a far earlier date.

India was not a single country or entity, but rather a collection of states ruled in different ways, and frequently with markedly different languages and customs. There was no single Indian language or religion. Small and large areas were governed by local dynasties, and by the eighteenth century much of northern and central India was ruled by the powerful Moguls. British imperial influence in the subcontinent came on the heels of this empire. The last wave of Muslim Moguls had arrived in India from central Asia in the sixteenth century, cleverly forging alliances with powerful Hindu elites in India and rapidly establishing significant control. Mogul power and wealth was considerable and early British traders were obliged to pay homage to the Mogul rulers. In the seventeenth century European merchants typically traded in Asia by permission of local rulers whose power and military might were at least the equal of the Europeans.

The dominating British enterprise in India was the East India Company (EIC), launched in London in 1600 by a powerful financial elite. The EIC was a chartered company, enjoying a monopoly over British trade with the east. The chartered company was an economic and political device of mutual benefit to a company and its backers and to the government of the country in which the company was established. The position of such corporations changed over time, and by the eighteenth century, in return for a share of the profits (and sometimes also favourable loans), the government granted the companies tremendous political and military as well as economic freedom in a given area. The EIC enjoyed not only a trade monopoly but the government's agreement that it might directly negotiate with local rulers, and might engage in warfare to defend company privileges (though it was forbidden to initiate hostilities). It also enjoyed the right to control British citizens within company territory. As a joint-stock enterprise, the EIC was well suited to expensive long-distance trade, for its size meant it could raise more money and spread the risk involved over a larger group of investors, a strategy unavailable to small traders.

Pada kutipan di atas, diberikan gambaran umum tentang aktivitas kolonialisasi Inggris di India yang berlangsung sejak abad XVII. Diuraikan bahwa India bukan sesuatu yang tunggal, tetapi terdiri dari beberapa negara dengan berbagai model pemerintahan dan masyarakat yang menganut berbagai macam agama serta menggunakan berbagai bahasa. Kedatangan bangsa Inggris terjadi saat India tengah dan utara berada di bawah kekuasaan Mogul.

Selain menggambarkan kondisi India, pengarang juga menguraikan posisi *East India Company* (EIC) yang didirikan pada tahun 1600 sebagai perusahaan yang mendominasi kegiatan kepentingan Inggris di India. Dijelaskan bahwa EIC sebagai perusahaan *chartered* memegang hak istimewa seperti monopoli perdagangan, mengusahakan aktivitas ekonomi dan militer di daerah yang dikuasai, serta membuat perjanjian politik dengan penguasa lokal.

Ditinjau wacana yang diproduksi melalui buku teks pelajaran sejarah SMA, khususnya dalam rangka penanaman identitas nasional, narasi yang paling menonjol adalah menempatkan bangsa Inggris sebagai bangsa yang hebat dan memperoleh banyak kesuksesan serta memiliki peran besar dalam percaturan dunia. Wacana itu dapat diketemukan hampir pada setiap topik yang dibahas oleh buku teks pelajaran sejarah, dari zaman kuno sampai kontemporer. Salah satu topik yang menampilkan penonjolan peran dan kehebatan Inggris adalah Perang Dunia II. Fenomena historis itu melibatkan berbagai negara dan berlangsung di berbagai kawasan. Dalam penelitian Foster terhadap empat buku teks pelajaran sejarah yang membahas tentang zaman modern ditemukan bahwa para pengarang menempatkan Perang Dunia II sebagai peristiwa yang cukup penting. Pentingnya fenomena historis itu dapat dilihat antara lain pada pemberian porsi uraiannya yang berkisar antara 7,32% - 12,5% atau dalam bentuk jumlah halaman antara 20 sampai dengan 38 halaman. Selain pemberian ruang yang

relatif besar terhadap topik Perang Dunia II, Foster juga menemukan bahwa para pengarang menceritakan fenomena historis itu dari perspektif Eropa Barat:

Although the textbooks vary in their respective portrayals of the war, two areas of emphasis appear most salient. First, all four of the English textbooks principally view the war from a western European or British perspective. Accordingly generous coverage is given to various topics including Blitzkrieg and the German army's rapid advance through Europe, the fall of France, the evacuation at Dunkirk, the Battle of Britain, the Blitz, the Battle of the Atlantic, the bombing of Germany, D-Day and the Allied advance towards Berlin in 1944 and 1945. Three books devote on average 14 pages to the span of events listed above. In contrast, attention to the war in the Pacific constitutes four pages in Todd, two pages in Walsh, a few paragraphs in McAleavy, and is entirely absent from the book authored by Ferriby and McCabe. Similarly, although events on the Eastern Front receive attention in every book, their portrayal varies from a maximum of four pages in Walsh to a few sentences in both Ferriby and McCabe and McAleavy. Significantly, apart from mention of military campaigns in North Africa, no other aspect of war receives more than a few sentences. Overall, therefore, textbooks concentrate detailed attention on conflicts in Western Europe with the war in the Pacific, in North Africa, and on the Eastern front generally receiving very cursory portrayal. Involvement of peoples and nations beyond these geographical areas is almost entirely ignored in contemporary history textbooks (Foster, 2005: 4).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa Foster menemukan para pengarang buku teks menggambarkan perang yang terjadi di Eropa Barat, khususnya Inggris, dengan relatif detail. Sebaliknya, perang yang terjadi di Pasifik memperoleh perhatian minimal, bahkan buku karangan Ferriby and McCabe sama sekali tidak menyunggungnya. Nasib yang hampir sama juga dialami dengan penjelasan Perang Dunia II di Afrika Utara yang disinggung hanya dalam satu dua kalimat.

Dalam menguraikan peran Inggris, para pengarang buku teks berusaha menyembunyikan sumbangsih dan pengalaman warga masyarakat dalam perang, baik masyarakat Inggris maupun *Commonwealth*. Mereka menekankan bahwa perang dilakukan oleh tentara Inggris dan beberapa kali menyebut tentara Sekutu dengan menonjolkan peran Amerika, dan Inggris. Keberadaan dan peran Soviet dalam Sekutu jarang sekali disebut, itu pun hanya ketika menjelaskan Perang Dingin. Perang Dunia II di Eropa Barat hanya digambarkan sebagai perang Inggris dan Amerika Serikat melawan Italia dan Jerman (Foster, 2005: 5).

Banyaknya penonjolan kesuksesan dan peran tentara Inggris dalam Perang Dunia II menunjukkan bahwa buku teks pelajaran sejarah Inggris menempatkannya sebagai pemeran utama dalam sejarah. Penempatan sebagai pemeran utama terhadap tentara Inggris dan tentu saja para pemegang kekuasaan dalam pemerintahan menunjukkan bahwa telah terjadi proses heroifikasi terhadap kelompok kepentingan. Pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang buku teks kepada para siswa sebagai audien bahwa tentara dan pemimpin Inggris memiliki sumbangsih yang sangat besar terhadap eksistensi dan berbagai pencapaian yang telah diraih oleh bangsa Inggris.

Heroifikasi tentara dan pemimpin politik Inggris dilakukan dengan menegasikan peran berbagai pihak yang sumbangsinya terhadap berbagai kemenangan pihak Sekutu tidaklah dapat dikatakan kecil. Pasukan Afrika Utara, India, Selandia Baru, Australia memiliki peran besar dalam mengalahkan Jepang dan negara-negara musuh lainnya. Akan tetapi peran mereka sangat sedikit disinggung, bahkan berbagai buku sama sekali tidak menyebutnya. Penegasian terhadap “*others*” itu merupakan representasi ketidakbersediaan para pengarang untuk mengakui peran penting mereka dan sekaligus sebagai usaha untuk menonjolkan kelompok kepentingan yang didukungnya sebagai satu-satunya pihak yang layak disebut pahlawan.

Penonjolan atau heroifikasi terhadap kelompok kepentingan semakin terlihat ketika membahas situasi Perang Dunia II di dalam negeri Inggris. Salah satu peristiwa historis di Inggris yang terkait dengan Perang Dunia II adalah Blitz. Secara leksikal, blitz artinya kilatan cahaya. Dalam sejarah Inggris, Blitz adalah istilah untuk menamakan perang antara Inggris dan Jerman, atau lebih tepatnya serangan Jerman ke Inggris. Serangan terjadi antara tanggal 7 September 1940 sampai dengan 21 Mei 1941. Selama hampir 37 minggu itu pasukan Jerman menjatuhkan kurang lebih 100 ton bom di 16 kota di Inggris. London memperoleh serangan 71 kali, Brimingham, Liverpool, dan Plymouth sebanyak 8 kali, kota Bristol 6 kali, Glasgow 5 kali, Southampton 4 kali, Portmouth dan Hull tiga kali, dan delapan kota lainnya minimal 1 kali memperoleh serangan besar-besaran.

Di kota London, sekitar 1 juta rumah hancur dan rusak parah serta kurang lebih 20.000 korban meninggal. Berbagai pelabuhan dan pusat-pusat industri juga mendapat serangan hebat. Pelabuhan Liverpool misalnya mengalami rusak berat dan hampir 4.000 orang meninggal. Tidak jauh berbeda dengan itu adalah pelabuhan di kota Hull, dengan korban mencapai 1.200 orang korban meninggal dan 95% barang-barang mengalami rusak berat. Pelabuhan lain, seperti Bristol, Cardiff, Portsmouth, Plymouth, Southampton, dan Swansea juga menjadi target serangan udara pasukan Jerman. Hal yang sama juga terhadap kota-kota industri seperti Birmingham, Belfast, Coventry, Glasgow, Manchester, dan Sheffield. Bahkan Kota Coventry dapat dikatakan mengalami kehancuran total.

Blitz secara garis besar dapat dikatakan sebagai waktu yang penuh penderitaan bagi bangsa Inggris, karena secara bertubi-tubi memperoleh serangan udara dari Jerman tanpa mampu memberikan banyak perlawanan yang berarti. Akan tetapi, ketika peristiwa sejarah itu ditulis dalam buku teks pelajaran sejarah terlihat sangat berbeda. Crawford (2001: 328) menjelaskan sebagai berikut:

Lying at the heart of UK textbook treatment of the Blitz are unembellished images of heroic sacrifice, courage and a classless "togetherness". Built upon descriptive commentaries of the effect of air raids on Coventry, Liverpool, Southampton and London which" ... did not break the will of the people", the notion of the indomitable spirit of the British people is strongly portrayed. The Modern World, by Kelly and Rees, claims that despite the bombing "Britain's will to fight had not been broken:" A section called "Pulling Through" Britain and the World, claims that "During the war, everyone was equal and there was a community spirit" and "Some people say that the Blitz brought out the best in people". Suggest reasons for this?" The Teachers' Resource book for The Twentieth Century World by Shephard and Moore states that "Britain's cities were hit by the Blitz which killed hundreds of thousands of people. Yet despite that, the morale of people at home did not collapse. Many talk about the War as a good time, when families and communities worked together to help one another and defeat the Germans?" In a chapter called "Blood, Toil, Tears and Sweat", The Twentieth Century World acknowledges the importance of British propaganda in "keeping spirits up?' It is claimed that "The BBC did a great deal to keep the nation's spirits up. Its news reports were thought to be honest and fair, so the people trusted what they heard".

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa para pengarang buku teks pelajaran berusaha mengambil sisi positif dari serangan udara Jerman, seperti lahirnya semangat berkurban dan berkembangnya kebersamaan antar warga. Kelly dan Rees dalam bukunya yang berjudul *The Modern World* mengklaim bahwa meski memperoleh serangan bom bertubi-tubi, "semangat tempur bangsa Inggris tidak menjadi patah". Hal yang hampir sama ditulis oleh Shephard dan Moore dalam buku guru *The Twentieth Century World*. Mereka berdua menyatakan bahwa meski kota-kota di Inggris diserang dengan bom dan ratusan ribu terbunuh, tetapi moral penduduk tidak kemudian hancur.

Kesan yang sama diberikan oleh Clive Ponting dalam bukunya *1940: Myth and Reality* terhadap cerita yang disampaikan isi buku teks pelajaran Inggris. Dia antara lain

menggambarkan isi buku teks sebagai berikut:

I can still remember the impact that reading Churchill's history of the Second World War had on me many years ago; its wonderful language redolent of Macaulay and Gibbon, its dramatic story so clearly told... The old policy of appeasement and British weakness disappeared under Churchill's inspiring leadership. Immediately on taking office he had to face the collapse of France caused by the numerically superior and highly mechanized German army using waves of modern tanks in a new style of blitzkrieg warfare. The British army, let down by the French and betrayed by the Belgians, fought its way back to the coast, where it was evacuated by a fleet of small boats from the beaches of Dunkirk. Left alone, the British government, refusing even to entertain the possibility of peace with Germany, decided to fight on to final victory. Facing a determined threat to invade Britain, brilliant direction of the RAF defeated a German air force that held all the advantages in the Battle of Britain. Morale in Britain remained high, as the country, united as never before and inspired by Churchill's regular radio broadcasts, was guided by a benevolent government which had great faith in the strength and steadfastness of the British people. The Blitz, one of the heaviest bombing campaigns ever mounted, began when Hitler started the policy of bombing major cities. Well-prepared and efficiently organized emergency services ensured that there were few problems in dealing with the results of the Blitz. Churchill, working closely with his friend President Roosevelt and taking advantage of the strong identity of interest between Britain and the United States, brought the Americans to the brink of entering the war. By the end of 1940, Britain was still a great power and firmly established on the road to victory.

When we examine the historical record, however, not one of these statements turns out to be true. (Ponting, 1991: 1).

Pada kutipan di atas, Ponting sebagai pembaca isi buku teks pelajaran sejarah Inggris memperoleh pesan bahwa Inggris ditinggalkan oleh Perancis dan dikhianati Belgia, sehingga harus bertempur sendiri melawan Jerman. Meski demikian, pemerintah sama sekali tidak mau menyerah. Semangat bangsa Inggris tetap tinggi, bahkan persatuan menjadi sangat kokoh berkat pidato rutin Churchill di radio serta menjadikan semangat perang terbakar. Churchill juga menjalin kerjasama dengan Presiden Roosevelt untuk memperjuangkan kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Pada akhir tahun 1940, Inggris tetap menjadi negara super power dan dengan sangat meyakinkan menuju ke kemenangan. Pada alinea terakhir, Ponting menutup uraiannya dengan menyatakan bahwa ternyata semuanya tidak sesuai dengan sumber-sumber sejarah yang ada. Dari sudut pandang ini, telah terjadi mitologisasi fenomena historis yang dilakukan oleh pengarang buku teks pelajaran sejarah.

Ingatan kolektif yang bermuansa mitologisasi dinarasikan dan ditanamkan kepada generasi muda tidak hanya melalui buku teks, tetapi juga melalui film, untuk tujuan kelompok kepentingan:

... Because of newly available Ministry of Information funding, to boost civilian morale and to promote Britain's cause to undecided neutrals, Jennings found a focus for his disparate talents and influences as the GPO was reformed as the Crown Film Unit. Jennings's output is regarded as among the best records of this 'People's War' in any national cinema (Aitken, 2013: 453).

Pada kutipan di atas pemerintah melalui Departemen Penerangan menggunakan fenomena historis untuk mengembangkan kepribadian nasional Inggris, seperti tahan banting, keberanian, heroik, teguh, taat, mampu mengendalikan emosi dan memiliki selera humor. Bahkan usaha mitologisasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui pelajaran sejarah di sekolah, tetapi Departemen Penerangan juga menggunakan media film dokumenter yang dibuat oleh Jennings.

Selain tentang peperangan, ingatan kolektif lain yang diwariskan melalui buku teks pelajaran sejarah, seperti dialami ole Ponting, adalah peran besar Perdana Menteri Churchill.

Churchill is presented as the central figure in the construction of national morale. Britain and the World: the 20th Century, by Lancaster and Lancaster, provides three pages on his life and career and The Era of the Second World by Lancaster and Peaple four pages. Key Themes of the 20th Century, by Sauvain, quotes extracts from some of Churchill's speeches, which have a key place in the mythology of the Blitz, urging " ... his fellow countrymen to stand firm" (1996: 121). Twentieth Century World, by Robson evokes the memory of Churchill as a "Great War leader"30 and as a role model for resistance (Crawford, 2001: 329).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa pengarang buku teks menempatkan Churchill sebagai tokoh panutan saat bangsa Inggris menghadapi masa-masa sulit saat Perang Dunia II meletus. Heroifikasi terhadap Chruchill juga dapat ditemukan pada buku karangan Addison (2005) yang berjudul *Churchill: The Unexpected Hero*. Pada buku itu, Addison (2005: 170-171) antara lain menuliskan sebagai berikut:

How representative Mass-Observations respondents were of the public in general is impossible to say. But they do suggest that most people regarded Churchill first as a truly great man, and secondly as the right man for the job (with the strong implication that he might not be the right man in peacetime). Churchill breathed a fighting spirit that inspired confidence, but he did so as an intensely human being who awoke love and respect rather than fear. Tom Harrisson was present when Churchill, accompanied by Clementine, visited Plymouth immediately after the bombing of the city in May 1941:

Wacana kesuksesan dan kehebatan Inggris yang diproduksi melalui buku teks pelajaran sejarah bukan tanpa tantangan. Era keterbukaan informasi dewasa ini sangat memungkinkan bagi setiap orang untuk mengakses informasi yang diperlukan dan menemukan kebenaran masing masing. Sealur dengan itu, sumber-sumber sejarah, termasuk dokumen-dokumen pemerintah yang pada zaman dahulu dikategorikan sebagai rahasia negara, tidak sedikit yang sekarang ini telah dibuka untuk umum. Akibatnya banyak perspektif dan interpretasi narasi sejarah yang dikritik serta didekonstruksi. Salah satu yang memperoleh kritik adalah mitifikasi Blitz dan heroifikasi Churchill. Crawford (2001: 331) mencatat bahwa dampak serangan Jerman mengakibatkan masyarakat Inggris panik dan histeris. Jiwa mereka tergoncang dan semangat mereka rapuh. Bahkan berbagai kalangan memilih untuk meninggalkan kota dan mengungsi ke daerah-daerah yang aman. Gambaran itu jauh dari apa yang diuraikan dalam buku teks pelajaran sejarah.

Selain perbedaan klaim akibat dari perbedaan sumber sejarah yang digunakan, permasalahan lain yang cukup pelik adalah memperkokoh persatuan nasional bangsa Inggris. Realitas politik masa lalu menunjukkan bahwa integrasi nasional menjadi Kerajaan Inggris Raya tidaklah berlangsung dengan damai dan dikehendaki oleh semua pihak yang berkepentingan, tetapi melalui jalan pemaksaan menggunakan kekerasan. Realitas politik masa lalu itu sebenarnya sudah diperhalus dan diperlunak oleh para pengarang buku teks pelajaran sejarah. Usaha itu antara lain dapat disimak pada uraian Levine sebagai berikut:

Three Acts of Union from the sixteenth to the very start of the nineteenth century cemented the legal, political and economic relationships between dominant England and the so-called Celtic fringe of Wales, Scotland and Ireland. These relationships, which by the nineteenth century saw all these regions directly ruled from the Westminster parliament, are often dubbed 'internal colonialism'. Bringing Wales, Scotland and Ireland within a broader British realm represents some of England's earliest forays into colonial rule, for though the formal statutes linking these countries take us through to the nineteenth century, English interest in and often coercion of these neighbouring regions has a very much longer history.

Pada kutipan di atas Levine menjelaskan bahwa tiga undang-undang tentang Union (Penyatuan) dari abad ke-17 sampai awal abad ke-19 diperkokoh dengan hubungan legal, politik dan ekonomi antara England yang dominan dengan Wales, Scotlandia dan Irlandia. Pada abad XIX semua wilayah itu secara langsung diperintah oleh Parlemen Westminster

yang sering dijuluki sebagai kolonialisme internal. Lebih lanjut Levine menguraikan proses penyatuhan dengan Wales sebagai yang pertama berada di bawah kontrol England, yaitu pada tahun 1536 dengan munculnya Undang-Undang Penyatuhan yang melahirkan 27 pemilih parlemen dari Wales.

Integrasi yang terjadi secara “tidak alamiah” yang diwariskan melalui buku teks menjadi salah satu penyebab penting munculnya fragmentasi identitas nasional, yaitu sebagai bangsa Inggris. Pada penelitian Ipsos Mori tahun 2006 yang dilakukan untuk yayasan Camelot terhadap generasi muda di London, Birmingham, Plymouth, Cardiff, Belfast dan Glasgow menemukan fenomena yang berbeda, bahkan bertentangan, dengan tujuan pendidikan sejarah.

The research uncovers a fundamental lack of emotional resonance amongst young people with the concept of Britishness which is seen as a static attribute that cannot be changed or re-configured. The findings suggest strongly that current notions of Britishness go against the 'project of being young' and the state of flux that comes with adolescence.

Spontaneous associations with Britishness amongst young people include the Queen, tea and crumpets, and Big Ben etc, which are rather “old world” versions and do not reflect a contemporary Britain or social reality. For many young people Britain represents an old, hierarchical, traditional, political discourse that does not fit with the fresh, inventive, messy and often chaotic world of a teenager(Ipsos Mori, 2006: 3).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa generasi muda memandang konsep tentang *Britishness* atau Bangsa Inggris sebagai hal yang terkait dengan zaman kuno, seperti ratu, acara minum teh, Big Ben dan sebagainya. Pandangan yang semakin keras ditemukan pada generasi muda dari Wales, Skotlandia, dan generasi muda Katolik di Irlandia Utara, yaitu Inggris identik sebagai arrogan, superior dan agresif.

In Wales, Scotland and for Catholic participants in Northern Ireland they see the English as arrogant, superior and aggressive. Their opposition to the English means that they are hesitant in accepting a British identity because they think it places them in the same camp as the English. These nations want to be recognised as culturally and attitudinally different from the English. They also want to be seen as distinct and rich cultures in themselves. For Catholic participants in Northern Ireland the political, religious and historical associations that accompany the 'British' cannot be overstated (Ipsos Mori, 2006: 3).

Hasil penelitian Ipsos menggambarkan terjadinya konflik identitas nasional Inggris dengan berbagai negara bagian yang pada masa lampau merupakan bangsa merdeka. Bahkan Di Skotlandia berkembang wacana untuk memisahkan diri dari Inggris dan kembali menjadi negara merdeka. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan menteri pertama dari Skotlandia, yaitu Alex Salmond, pada 15 Oktober 2012 menandatangani persetujuan pengadaan Referendum Kemerdekaan Skotlandia (Pedersen, 2013: 3). Akhirnya pada tanggal 18 September 2014 referendum dilaksanakan dengan hasil 2,001,926 orang memilih “Tidak” dan 1,617,989 orang memilih “Ya” untuk merdeka. BBC melaporkan bahwa “from all 32 council areas, the “No” side won with 2,001,926 votes over 1,617,989 for “Yes” (BBC 19 September 2014). Meskipun hasilnya dimenangkan oleh kelompok *unionist*, yaitu kelompok yang menghendaki tetap bergabung dengan Inggris, tetapi referendum itu menunjukkan adanya keterpecahan identitas nasional.

B. Pelajaran Sejarah di Indonesia

Buku karangan Tarunasena M., 2009, *Sejarah SMA/MA*. Jilid 2 merupakan satu-satunya yang lolos seleksi BSNP untuk kelas 11. Dalam buku itu digunakan pendekatan struktural. Hal itu terlihat dari susunan bab 7 yang secara khusus dialokasikan untuk membahas pergerakan nasional. Bab 7 dibagi menjadi tiga sub bab, yaitu (a) Paham-paham baru di Eropa, (b)

Perkembangan nasionalisme di Asia dan pengaruhnya terhadap perkembangan nasionalisme di Indonesia, dan (c) Keragaman ideologi pergerakan kebangsaan Indonesia. Dari susunan sub bab tersebut tampak bahwa sub bab terakhir, yaitu keragaman ideologi pergerakan kebangsaan Indonesia (struktur lokal), ditempatkan sebagai akibat dari sub bab pertama (struktur dunia) dan kedua (struktur regional dan kolonial).

Dalam uraian, penggunaan pendekatan struktural terlihat antara lain pada pembukaan bab 7 sebagai berikut:

Pada abad ke-19, di kawasan Eropa muncul berbagai pemikiran yang berkenaan dengan kehidupan umat manusia. Lahirnya pemikiran pada abad tersebut tidak hanya berpengaruh di kawasan Eropa saja, tetapi mampu memberikan kekuatan yang besar bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai asasi kemanusiaan, terutama yang berhubungan dengan kemerdekaan hidup manusia. Adapun pemikiran yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pemikiran nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi (Tarunasena, 2009, jilid 2: 200).

Pada kutipan di atas uraian buku teks secara jelas menempatkan hasil pemikiran Eropa sebagai faktor yang memberi kekuatan kepada masyarakat Indonesia untuk mewujudkannya, terutama dalam masalah kemerdekaan hidup manusia. Meskipun demikian, pada uraian selanjutnya tidak dijelaskan bentuk keterkaitan antara paham-paham baru tersebut dengan pergerakan nasional Indonesia. Pada sub bab paham-paham baru, buku teks hanya menjelaskan pengertian dan dinamika historis paham-paham tersebut di Eropa.

Pada sub bab kedua, yaitu tentang nasionalisme Asia, dijelaskan kemajuan Jepang akibat restorasi Meiji dan pada bagian penutup diuraikan sebagai berikut:

Keberhasilan bangsa Jepang mengadakan Restorasi dengan memodernisasi diri dan keberhasilan mengusir bangsa Barat dari dalam negeri dapat mendorong bangsa-bangsa Asia untuk berbuat seperti Jepang, khususnya bangsa-bangsa di Asia yang mengalami penjajahan dari bangsa Barat seperti Indonesia yang dikuasai oleh Belanda (Tarunasena, 2009, jilid 2: 208).

Pada kutipan di atas terlihat bahwa kata kunci yang mengindikasikan adanya hubungan atau keterkaitan antara nasionalisme Jepang dengan Indonesia adalah “dapat mendorong”. Dari sudut pandang ini, penggunaan kata “dapat” di depan kata kerja “mendorong” menunjukkan bahwa buku teks masih ragu terhadap ada tidaknya keterkaitan, karena makna kata “dapat” dalam konteks itu adalah mungkin mendorong atau mungkin tidak mendorong.

Meski bernuansa kekurangpastian, usaha untuk memberi keterkaitan antara nasionalisme Jepang dengan Indonesia merupakan hasil terbaik. Apabila disimak lebih lanjut, terutama ketika membahas dinamika nasionalisme di Cina, India, Filipina, Vietnam, dan Myanmar, buku teks karangan Tarunasena sama sekali tidak menyenggung keterkaitannya dengan pergerakan nasional di Indonesia. Dengan kata lain, uraian tentang nasionalisme Asia yang memakan cukup banyak halaman tersebut nasibnya sama dengan penjelasan paham-paham baru di Eropa, yaitu sama sekali tidak memberi penjelasan terhadap kelahiran pergerakan nasional Indonesia.

Permasalahan ketiadaan penjelasan yang memadai tentang keterkaitan topik yang dibahas dengan lahirnya pergerakan nasional juga ditemukan pada uraian sub bab terakhir bab 7. Dalam sub-sub bab “Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya pergerakan nasional” diuraikan kondisi dalam struktur kolonial, antara lain kondisi politik sebagai berikut:

Kondisi politik yang dimaksud adalah kondisi yang berhubungan dengan masalah kekuasaan pemerintahan Kolonial. Sejak Kolonial menanamkan kekuasaannya di Indonesia, kekuasaan pribumi tradisional yang berada dibawah seorang raja atau sultan sedikit demi

sedikit mulai dihapus dan akhirnya hilang sama sekali. Kekuasaan mulai berganti kepada tangan Kolonial. Raja-raja diangkat dan diberhentikan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kolonial. Setiap penguasa lokal yang diangkat dan diberhentikan oleh Kolonial pada dasarnya telah terikat oleh kontrak politik yang menyatakan bahwa daerah yang mereka kuasai harus diakui sebagai bagian dari kekuasaan Kolonial Belanda. Begitu pula dengan para Bupati dan Lurah, mereka dijadikan sebagai pegawai negeri yang mendapat gaji dan harus taat terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Kolonial. Dalam kondisi yang demikianlah wibawa seorang raja, sultan, bupati, dan juga lurah menjadi merosot di mata rakyat. Mereka dipandang lemah dan tidak mempunyai kekuatan, sehingga menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan pemerintah Kolonial (Tarunasena, 2009, jilid 2: 214-215).

Pada kutipan di atas dijelaskan terjadinya kemerosotan kekuasaan politik pemimpin pribumi hingga posisinya sekedar menjadi kepanjangan tangan struktur kolonial. Akan tetapi, buku teks sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan kemerosotan kekuasaan itu dengan kelahiran pergerakan nasional Indonesia. Dengan kata lain, kemerosotan kekuasaan pemimpin pribumi dan kelahiran pergerakan nasional Indonesia merupakan dua fenomena historis yang tidak saling berkaitan.

Penjelasan yang menunjukkan keterkaitan kuat terletak pada uraian tentang kondisi pendidikan. Buku karangan Tarunasena (2009, jilid 2: 215-216) antara lain menuliskan sebagai berikut:

Pada awal abad ke-20 dengan penerapan *politik etis*, barulah pendidikan mendapat perhatian dari Pemerintah Hindia-Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan disesuaikan dengan status sosial yang ada dalam masyarakat dengan sistem pendidikan yang tidak jauh dari kepentingan Kolonial. Melalui pendidikan, para pelajar memperoleh banyak wawasan, terutama mengenai perkembangan yang terjadi di Barat, kemudian dibandingkan dengan kondisi bangsa Indonesia. Dari perbandingan itulah lahir kesadaran untuk mengadakan perbaikan nasib bangsa melalui berbagai pergerakan nasional seperti yang terdapat di beberapa negara terjajah lainnya.

Selama menjalani proses pendidikan, para golongan terpelajar ini mendapat wawasan baru tentang berbagai paham-paham baru yang berkembang dan berpengaruh kuat di kawasan Eropa dan Asia-Afrika, seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Melalui media pendidikan, wawasan para pelajar mengenai berbagai hal menjadi semakin terbuka, termasuk wawasan tentang berbagai pergerakan nasionalisme yang terjadi di berbagai negara. Selanjutnya para pelajar ini mencoba mencontoh dan menerapkan semangat paham-paham baru tersebut, terutama paham nasionalisme yang telah diperjuangkan oleh negara-negara lain ke dalam perjuangan Indonesia. Melalui paham nasionalisme ini, para pelajar sebagai golongan elit berusaha untuk mengubah pandangan masyarakat yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Hal tersebut didorong adanya keyakinan bahwa untuk mencapai keberhasilan cita-cita kemerdekaan Indonesia, hanya dapat dicapai apabila ada persatuan dan kesatuan bangsa. Keyakinan akan semangat persatuan dan kesatuan bangsa tersebut kemudian mereka wujudkan dalam Pergerakan Nasional, yaitu suatu pergerakan yang bertujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka.

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa pendidikan Barat berhasil menginfuskan “*banyak wawasan, terutama mengenai perkembangan yang terjadi di Barat*”. Dari informasi tersebut, para pelajar kemudian membandingkan dengan “*kondisi bangsa Indonesia*” dan berpuncak pada lahirnya “*kesadaran untuk mengadakan perbaikan nasib bangsa melalui berbagai pergerakan nasional*”. Bahkan pada alinea kedua, dijelaskan kehebatan sistem pendidikan Barat sebagai berhasil membuka wawasan para siswa tentang “*paham-paham baru yang berkembang dan berpengaruh kuat di kawasan Eropa dan Asia-Afrika, seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi*”, sehingga mereka “*mencontoh dan menerapkan semangat paham-paham baru tersebut*” dalam wujud

“perjuangan Indonesia”. Dari sudut pandang ini, buku teks menjelaskan bahwa pendidikan Barat sebagai satu-satunya institusi yang melahirkan pergerakan nasional Indonesia.

Ditinjau wacana yang diproduksi melalui buku teks pelajaran sejarah, khususnya dalam rangka penanaman identitas nasional, narasi yang paling menonjol adalah menempatkan kebudayaan Barat pada umumnya dan struktur kolonial sebagai determinan. Pola pemikiran itu dapat disimak pada buku teks karangan Tarunasena. Penempatan kebudayaan Barat sebagai kekuatan determinan tidak hanya tampak pada uraian, tetapi juga pada kegiatan atau tugas yang diberikan kepada siswa. Pada uraiannya tentang paham nasionalisme dijelaskan:

Pada dasarnya semangat nasionalisme di satu sisi mampu mewujudkan kehidupan negara dengan semangat kebangsaan yang tinggi, namun di sisi lain semangat nasionalisme yang dilandasi sikap berlebihan menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya semangat kolonialisme yang merugikan bangsa-bangsa di kawasan Asia-Afrika, termasuk di Indonesia. Namun pada perkembangannya, kita dapat melihat bahwa melalui nasionalisme ini pula bangsa-bangsa terjajah seperti Indonesia dapat bangkit, menentang, dan melepaskan diri dari para penjajah (Tarunasena, 2009, jilid 2: 203).

Pada halaman 206, dalam buku teks dicantumkan kegiatan siswa sebagai berikut:

Kegiatan 7.1

Cari di internet atau di media surat kabar atau sumber lain yang berhubungan dengan paham-paham tersebut di atas. Selanjutnya, jelaskan hubungan paham-paham tersebut dengan munculnya pergerakan nasional di Indonesia?

Dari kedua kutipan di atas kiranya dapat diambil pemahaman bahwa kebudayaan Barat merupakan sumber pemikiran atau inspirasi bagi dinamika historis dunia non Barat, termasuk Indonesia. Pada kutipan pertama, nasionalisme ditempatkan sebagai “salah satu faktor pendorong lahirnya semangat kolonialisme yang merugikan bangsa-bangsa di kawasan Asia-Afrika, termasuk di Indonesia”. Dari sudut pandang itu, kebudayaan Barat dipandang sebagai sumber kemalangan dunia non Barat, yaitu Asia dan Afrika. Akan tetapi, pada kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa “melalui nasionalisme ini pula bangsa-bangsa terjajah seperti Indonesia dapat bangkit, menentang, dan melepaskan diri dari para penjajah”. Kalimat itu menunjukkan bahwa kemampuan untuk bangkit, menentang, dan melepaskan diri dari para penjajah yang berkembang di antara bangsa non Barat adalah bersumber dari kebudayaan Barat. Dengan berlandas pada uraian yang telah diberikan, kegiatan siswa yang diberikan lebih merupakan usaha menginternalisasi pandangan deterministik yang dimiliki pengaruh kepada para siswa, daripada memberi kesempatan kepada mereka untuk mengkritisinya.

Pandangan deterministik yang menempatkan Barat sebagai sumber kemajuan Indonesia bukan sesuatu yang aneh dan hanya dimiliki Tarunasena. Pandangan itu sudah cukup lama menjadi *mainstream* di Indonesia, terutama di kalangan sejarawan dan guru sejarah. Salah satu kajian sejarawan Barat yang banyak dirujuk oleh sejarawan Indonesia, termasuk di dalamnya para pengarang buku teks, yaitu karya Robert van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite* yang terbit pada tahun 1960 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1984. Tesis yang diangkat Niel adalah bahwa semua elite modern Indonesia merupakan hasil didikan Barat dan paling sedikit telah mengadopsi beberapa aspek kebudayaan Barat. Mereka digambarkan sebagai “lebih bersifat Barat dalam pendidikan dan pengajarannya dan dalam konsepsinya mengenai negara dan masyarakat” (Niel, 2009: 43). Oleh karena itu, menjelaskan kebijakan pemerintah kolonial sebagai *trigger* munculnya elite modern Indonesia merupakan konsekuensi logis dari posisi yang diambilnya. Pada tahap selanjutnya Achmad dan Hoessein Djajadiningrat yang menjadi anak asuh Snouck Hurgronje

menjadi ikon sukses proyek westernisasi pemuda pribumi Indonesia:

Snouck merupakan alat dalam menguasai sebagian kaum ningrat Banten (Jawa Barat) untuk mengikuti pendidikan cara Barat dan telah berhasil dengan menggembirakan pada anak didik percobaannya Achmad Djajadiningrat, belakangan menjadi *regen* di Serang dan pegawai tinggi pemerintah, yang telah ditolongnya masuk dan menyelesaikan Sekolah Menengah Belanda di Batavia... Adik Achmad, Huessein, juga mengikuti cara pendidikan Barat dan malah lebih sukses lagi bagi Snouck Hurgronje, Hoessein mengikuti tradisi akademis penuntunnya, yang berakhir dengan menamatkan studinya dalam bidang sastra dan ilmu pengetahuan liberal di Universitas Leiden (Niel, 2009: 77-78).

Untuk memperkuat tesisnya, Niel berusaha mem-Barat-kan semua fenomena historis yang terkait dengan muncul dan berkembangnya nasionalisme Indonesia. Salah satu analisisnya terhadap berdirinya Sarekat Dagang Islam yang notabene berjiwa bukan Barat adalah sebagai berikut:

Karena Samanhudi sendiri tidak mempunyai waktu maupun bakat untuk membentuk suatu organisasi, ia pun berusaha mencari seorang direktur-organisator. Pilihannya jatuh pada seorang yang telah mempunyai pengalaman dalam organisasi perdagangan: Raden Mas Tirtoadisuryo... Tirto telah mendapat pendidikan sekolah administratur (OSVIA) (Niel, 2009: 135)

Di kalangan sejarawan Indonesia yang sepemahaman dengan Robert van Niel adalah pandangan Kartodirdjo (2005: 197) yang menempatkan bangsa Barat sebagai tipe ideal:

...di lingkungan peradaban Barat modern bersama dengan tumbuhnya rasionalisme dan individualisme, tumbuh pula *ascetisme* intelektual, yang mampu menciptakan motivasi yang kuat untuk berilmu dan berfilsafah. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat terjadi tanpa adanya *ascetisme* itu, suatu unsur pokok dalam kebudayaan akademis dan *expertise*.

Kebudayaan industrial sudah barang tentu memerlukan dukungan kebudayaan akademis tersebut beserta *ascetismenya*, rasionalitas serta individualitasnya...

Norma-norma yang diinstitusionalisasikan perlu untuk dilegitimasikan oleh nilai-nilai tersebut di atas. Hal itu berlaku juga bagi konsep kerja serta nilai kerja seperti termaktub dalam etos kerja.

Pada kutipan di atas, Kartodirdjo, sejarawan yang sangat disegani dan pemikirannya banyak diikuti oleh sejarawan lain pada zamannya, menjelaskan bahwa kebudayaan akademis Barat dengan ascetisme, rasionalitas serta individualitasnya menjadi pendukung penting dari berkembangnya kebudayaan industrial.

Kekaguman terhadap kebudayaan industrial Barat melahirkan keinginan agar bangsa Indonesia menyerap berbagai unsurnya. Mereka berkeinginan agar Indonesia berubah menjadi berbudaya industrial seperti Barat. Kelompok ini dalam masyarakat luas menyebut diri sebagai “*agent of change*”, dan dalam komunitas sejarawan dinamakan oleh Sutherland sebagai “Sejarawan Profesional Modern” (SPM). Karakteristik SPM adalah usaha untuk menampilkan sejarah sebagai kemajuan yang berpuncak pada kejayaan “modernitas” negara-bangsa sebagai narasi utama atau *grand narration*.

Narasi besar SPM bersifat teleologis dalam arti menyajikan semua bergerak ke arah satu tujuan tertentu, sebagai perkembangan dari hal yang sederhana dan tidak sempurna ke hal yang kompleks, rasional dan efisien. Oleh sebab itu, Francis Fukuyama (1992) dapat mengatakan keruntuhan Uni Soviet sebagai pertanda dari “akhir sejarah” karena jika model demokrasi pasar bebas Barat, atau Amerika, telah menjadi pola yang diterima seluruh umat manusia, maka sejarah sudah hampir sampai pada tujuan akhirnya. (Sutherland dalam Nordholt, Purwanto dan Saptari, ed., 2008: 34-35).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa SPM menampilkan sejarah Indonesia sebagai dinamika perubahan/kemajuan sebagai akibat penyerapan unsur-unsur Barat dalam masyarakat. Dengan kata lain, konstruksi sejarah yang dihasilkan SPM berpola pada pergerakan masyarakat meninggalkan tradisinya untuk diganti dengan nilai, norma, dan institusi Barat. Kartodirdjo, sebagai tokoh utama SPM, menjelaskan bahwa nilai-nilai tradisional masyarakat mengalami proses disfungsional sebagai berikut:

Tidak dapat disangkal, bahwa nilai-nilai tradisional berfungsi penuh dalam konteks zamannya, yaitu sewaktu tingkat ekonomi masih bercorak agraris dan sistem politik masih bersifat feodal. Dengan perkembangan ekonomi serta meningkatnya menjadi semi-industrial, maka nilai-nilai menjadi disfungsional. Masyarakat agraris dengan produksi tradisional lebih mengutamakan nilai-nilai kolektivitas, solidaritas komunal, ikatan primordial, seperti ikatan keluarga, suku, kepercayaan, lokasi dan sebagainya.

Tanah dan tenaga sangat terikat pada sistem sosial desa dan kekuatan feodal, belum terarah kepada kekuatan ekonomi pasar. Kehidupan di desa lebih terarah ke dalam dan tingkat kehidupan ada pada taraf subsistensi. Dalam situasi ekonomi sosial seperti itu, timbul sindrom kemiskinan yang mencakup pasivism, fatalisme, familisme, indolensi dan lain sebagainya. Kesemuanya itu menciptakan karakteristik yang stereotipikal rakyat pedesaan yang serba malas (Kartodirdjo, 2005: 199).

Dari kutipan di atas dapat disimak bahwa SPM menempatkan kebudayaan Barat dan kebudayaan Indonesia dalam oposisi biner. Dalam konteks ini, penempatan kebudayaan Barat sebagai *term superior* dipandang “*not only the object of a particular knowledge, but also the object of a vision*” (Spivak dalam Derrida, 1997: lviii). Sebaliknya, pernyataan bahwa masyarakat desa, simbol kebudayaan Indonesia tradisional (turun temurun), oleh Kartodirdjo dinegasikan sebagai diwarnai pasivism, fatalisme, familisme, indolensi dan serba malas. Pandangan itu menjadikan konstruksi sejarah Indonesia tidak lagi menarasikan *change and continuity* secara seimbang, tetapi diarahkan untuk menonjolkan perubahan atau *change* serta meminimalisasi dan bahkan mengeliminasi *continuity*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian yang telah dilakukan terhadap buku teks pelajaran sejarah di Inggris dan Indonesia dapat diambil pemahaman bahwa antarkeduanya memiliki kemiripan, yaitu secara teleologis keduanya digerakkan oleh kepentingan untuk mengembangkan generasi muda pada kehidupan ideal menurut perspektif pengarang. Di Inggris kehidupan ideal itu diformulasikan dalam kata *Britishness* atau keinggrisan, yaitu karakter ideal yang menjadi ciri khas bangsa Inggris. Di pihak lain, di Indonesia kehidupan ideal itu diformulasikan dalam kata “Kebudayaan industrial Barat”, yaitu karakter rasionalisme dan individualisme yang menjadi ciri khas bangsa-bangsa Barat.

Dari sudut pandang pendekatan yang digunakan, buku-buku teks pelajaran sejarah di Inggris menggunakan narratif modern. Pendekatan itu dipandang memiliki banyak keunggulan, antara lain fleksibilitas gaya bahasa dengan tetap mentaati berbagai kaidah keilmuan dari sejarah. Penggunaan pendekatan narratif menjadikan buku teks dimungkinkan disusun dengan gaya bahasa yang sesuai usia siswa. Melalui gaya bahasa narratif yang sesuai usia audience, siswa mampu lebih mudah memahami berbagai uraian sejarah yang disusun oleh pengarang buku teks. Di pihak lain, pengarang juga lebih mudah menyesuaikan uraian buku teks pelajaran sejarah dengan tujuan kognitif yang telah ditentukan oleh kurikulum.

Penggunaan gaya bahasa yang sesuai dengan usia siswa lebih memungkinkan untuk mencapai tujuan afektif kurikulum pelajaran sejarah. Siswa menjadi tidak hanya mampu

memahami fenomena historis, tetapi juga simpati terhadap berbagai kejadian yang dialami oleh bangsanya di masa lampau. Pengarang buku teks pelajaran sejarah juga lebih leluasa menggunakan gaya bahasa yang dipandang mampu membangun *linguistic connection* antara generasi pelaku sejarah dengan generasi siswa yang hidup di zaman sekarang, sehingga antarkeduanya terjadi dialog reflektif.

Secara garis besar, pendekatan yang digunakan oleh para pengarang buku teks pelajaran sejarah di Indonesia adalah pendekatan ilmu sosial. Keunggulan dari pendekatan itu adalah kemampuannya menjelaskan latar belakang terjadinya fenomena sejarah. Dengan bantuan konsep dan teori dari ilmu sosial, sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa sejarah dapat dijelaskan dengan sangat mendalam. Permasalahannya adalah pendekatan itu hanya mampu digunakan secara baik oleh sejarawan akademik dan hampir tidak mungkin digunakan oleh para guru sejarah, pengarang buku teks, apalagi siswa SMA. Pengarang buku teks hanya menduplikasi dan mereproduksi hasil rekonstruksi sejarah yang dilakukan sejarawan akademik. Siswa SMA hampir tidak mungkin memahami teori dan konsep ilmu sosial yang digunakan sejarawan akademik, sehingga hampir pasti sebaik apapun eksplanasi yang tertuang dalam buku teks, akan jatuh menjadi hafalan tak bermakna bagi mereka. Dengan kata lain, penggunaan pendekatan ilmu sosial lebih merupakan *show off force* sejarawan akademik di dunia pendidikan.

Selain eksplanasi latar belakang peristiwa sejarah secara mendalam, karakter lain dari pendekatan ilmu sosial adalah digunakannya gaya bahasa ilmiah dan banyaknya istilah-istilah teknis. Dari sudut pandang tujuan pendidikan, penggunaan gaya bahasa ilmiah dan istilah teknis itu menunjukkan bahwa tujuan utama pembelajaran sejarah adalah pengembangan aspek kognitif. Oleh karena itu, akibat atau konsekuensi logis dari penggunaan pendekatan ilmu sosial adalah terabaikannya aspek afektif.

Dari perspektif wacana identitas nasional yang dikembangkan, Inggris memproduksi narasi sejarah yang menempatkan bangsa Inggris subjek sejarah atau pemeran utama dalam peristiwa sejarah. Dengan narasi itu diharapkan siswa mampu terinspirasi untuk menjadi manusia independen yang berani mengambil berbagai keputusan bagi hidupnya sendiri dan bagi kemajuan masyarakat.

Selain sebagai subjek, buku teks pelajaran Inggris juga didominasi oleh narasi tentang peristiwa sejarah yang membanggakan, yaitu kesuksesan, kemenangan dan peran besar yang dimainkan bangsa itu dalam mempertahankan kepentingan nasional dan percaturan internasional. Melalui narasi itu, diharapkan para siswa mampu terinspirasi berbagai kerja keras yang dilakukan oleh para tokoh/pelaku sejarah dalam berjuang meraih kemenangan atau kesuksesan.

Di pihak lain, buku teks pelajaran sejarah Indonesia menempatkan bangsa Indonesia sebagai objek kekuatan asing, terutama Barat. Hal itu antara lain dimanifestasikan dalam bentuk dominasi narasi sejarah tentang semakin meluasnya pengaruh Barat yang menghancurkan struktur masyarakat tradisional Indonesia. Melalui narasi itu diharapkan siswa bersedia dan mampu meninggalkan karakter asli yang diwarisi dari nenek moyangnya serta menyerap nilai-nilai utama kebudayaan Barat, yaitu rasionalisme dan individualisme, untuk mengembangkan kehidupan diri maupun masyarakat menuju negara industri. Permasalahannya adalah narasi yang dikembangkan dalam buku teks melawan kodrat alam bahwa kehidupan merupakan mata rantai yang saling terkait. Usaha gunting putus itu justru melahirkan generasi baru yang berhasil, meski tidak sepenuhnya, meninggalkan karakter tradisional, tetapi gagal menyerap karakter Barat.

B. Saran

Dengan berdasar pada kajian tentang historiografi pendidikan di kedua bangsa, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Buku teks pelajaran sejarah Indonesia perlu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan narratif modern. Selama ini, penulisan buku teks pelajaran sejarah Indonesia menggunakan pendekatan ilmu sosial, terutama ketika menjelaskan masa penjajahan dan lahirnya nasionalisme Indonesia. Bahasa ilmiah dan teknis yang digunakan dalam pendekatan ilmu sosial sangat sulit diterima oleh siswa yang belum banyak memiliki kekayaan konsep dari ilmu sosial yang memadai. Selain itu, bahasa ilmiah yang digunakan kurang menarik dan sesuai dengan usia siswa yang masih tergolong remaja.

Pengembangan ini tidak mudah dilakukan, karena pendekatan ilmu sosial sangat kuat mendominasi perkembangan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan penggunaan pendekatan narratif modern bagi penulis/pengarang buku teks pelajaran sejarah, dan guru sejarah. Bahkan pada jangka panjang, pendekatan narratif perlu dijadikan mata kuliah, baik di program studi sejarah maupun pendidikan sejarah.

2. Buku teks pelajaran sejarah Indonesia perlu dikembangkan dengan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemeran utama. Selama ini telah diusahakan untuk mengembangkan Indonesiasentrisme yang digagas oleh Kartodirdjo, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Penempatan bangsa Indonesia sebagai pemeran utama selama ini masih terbatas pada usaha memperbanyak jumlah orang Indonesia dalam pembahasan fenomena historis. Oleh karena itu, ke depan usaha perlu diarahkan untuk menempatkan ideologi dan kepentingan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan sebagai jiwa dari narasi buku teks pelajaran sejarah. Dengan demikian, buku teks pelajaran sejarah Indonesia sungguh-sungguh berisi perjuangan dan kerja keras bangsa Indonesia untuk mewujudkan tata kehidupan ideal yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Addison, P., 2005. *Churchill: The Unexpected Hero*. Oxford: Oxford University Press.
- Aitken, I., 2013. *The Concise Routledge Encyclopedia of the Documentary Film*. Oxon: Routledge.
- Anderson, B., 1991. *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.
- Crawford, K., 2001. Constructing national memory: The 1940/41 Blitz in British history textbooks. *Internationale Schulbuchforschung* 23. Verlag Hahnsche Buchhandlung .ISSN 0172-8237.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Seminar Sejarah Nasional V: Sub Tema Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional.
- Derrida, J., 1997. *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. London: The Johns Hopkins University Press.
- Foster, S., 2005. “The British Empire and Commonwealth in World War II: Selection and Omission in English History Textbooks”. *International Journal of Historical Learning Teaching and Research* No. 5 pp. 1-19. ISSN 1472-9466.
- Glaserfeld, E. von., 1984. “Thoughts about Space, Time, and the Concept of Identity” dalam Pedretti A. (ed.) *Of of: A book conference*. Zürich: Princelet Editions.
- Ipsos Mori. (2006) *Young People and British Identity*. London: Ipsos Mori.
- Kartodirdjo, S., 2005. *Sejak Indische sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Levine, P., 2007. *The British Empire: Sunrise to Sunset*. Harlow: Pearson Education Limited.

- Mahmood, K., 2006. "The Process of Textbook Approval: A Critical Analysis" pada *Bulletin of Education & Research June 2006, Vol. 28, No. 1, pp.1-22.*
- Niel, R. van., 2009. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Terjemahan Zahara Deliar Noer. Cetakan kedua. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ponting, C., 1991. *1940: Myth and Reality*. London: Hamish Hamilton.
- Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Renan, E., 1882. "What is A Nation?" dalam Wolf, Stuart, ed..(1996). *Nationalism in Europe, 1815 to Present*. London: Routledge.
- Rosidi, S., 2007. *Analisis Wacana Kritis Sebagai Ragam Paradigma Kajian Wacana*. Makalah disajikan pada Sekolah Bahasa, atas prakarsa Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Bahasa, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 15 Desember 2007.
- Suryaman, M., 2007. Dimensi-Dimensi Kontekstual di Dalam Penulisan Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia. Paper diunduh dari <http://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/147>.
- Sutherland, H., 2008. "Meneliti sejarah penulisan sejarah" dalam Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari, ed. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tarunasena, 2009. *Sejarah SMA/MA*. Jilid 2. Jakarta: Depdiknas.
- Vessey, M., 2011. *The Calling of the Nations: Exegesis, Ethnography, and Empire in a Biblical-historic Present*. Toronto: University of Toronto Press.
- Wiriaatmadja, R., 1992. *Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia Dalam Pembentukan Identitas Nasional*. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.

Internet

- BBC* 19 September 2014 pada <http://www.bbc.com/news/uk-scotland-29270441>.
<http://www.merriam-webster.com/dictionary/image?show=0&t=1286555314> diunduh pada 4 November 2015.

POTRET PENGUSAHA KERAJINAN KUNINGAN DI BEJJONG MOJOKERTO

Isni Herawati

Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
Jl. Brigjen Katamso 139 Yogyakarta 55152
e-mail:isniherawati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengusaha kuningan memperoleh bahan baku kuningan, proses produksinya, hasil yang diperoleh, dan pemasaran hasil supaya kerajinan itu tetap eksis di pasaran. Dalam tulisan ini menampilkan 2 pengusaha kerajinan kuningan di Bejjong, Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian terungkap bahwa cara memperoleh bahan baku, proses produksi, hasil produksi, pemasaran dari kedua pengusaha kerajinan kuningan itu semuanya dapat terealisasi dengan baik. Sebagai bukti bahwa kerajinan kuningan di Bejjong tetap eksis sampai sekarang justru pasarnya yang terbesar adalah di Eropa dan sekitarnya. Pemasaran dapat sampai ke mancanegara dengan melalui perantara artshop-artshop yang ada di Bali, bahkan dengan melalui internet dan SMS. Pengusaha juga aktif melakukan terobosan-terobosan baru dan membuat jaringan dengan pihak luar.

Kata Kunci: kerajinan kuningan, Bejjong, teknologi

BRASS CRAFTSMEN POTRAIT IN BEJJONG, MOJOKERTO

Abstract

This research aims to observe how the craftsmen get the raw brass materials, how they do the production, the end product of brass, and the market of the product, this article portrays 2 brass craftsmen from Bejjong, Mojokerto, the research was conducted with qualitative approach by doing direct interview, direct observation and literature review, the result of the research reveals that the access to raw materials, the production process, the product and it's marketing from both the craftsmen have great realization, as the proof that the brass craft products from Bejjong, Mojokerto have existence in the market until today, the largest market from these crafts is Europe, they use art shops in Bali to reach international market, even by using internet and text messages, to expand the market and the revenue, these craftsmen also active in finding new innovations and make new net workings with international market.

Keywords : brass craftsmen, Bejjong, technology

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, baik mengolah sawah maupun tegalan untuk ditanami tanaman yang menghasilkan maupun bekerja di bidang peternakan. Di Indonesia dari tahun ke tahun jumlah penduduknya selalu bertambah yang membawa konsekuensi pada penyediaan kesempatan kerja terutama di daerah pedesaan yang ada di Jawa. Disebutkan oleh Sumintarsih (2003:141), bahwa melimpahnya angkatan kerja di pedesaan,karena ada pergeseran penggunaan lahan pertanian, kemajuan teknologi mekanisasi pertanian, akan berpengaruh pada daya tampung di sektor pertanian. Berdasar pada kenyataan itulah, maka peran non-pertanian menjadi semakin penting dan alternatif yang paling cocok adalah usaha di sektor industri kecil dan industri rumah tangga.

Kerajinan kuningan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Menurut Sumiyati (2001:132), kriya logam dikenal sejak manusia mempunyai kemampuan mengelola api serta mengolah bijih logam yang terdiri atas peleburan, percampuran, penempaan, serta pencetakan berbagai jenis benda. Benda-benda tersebut diperkirakan muncul pertama kali di Indonesia sekitar

2.500 atau 2.000 tahun yang lalu. Kerajinan kuningan Bejjijong Mojokerto, mulai dikenal sejak zaman Majapahit (Kompas, 2012: 14). Usaha ini berkembang yang akhirnya Desa Bejjijong menjadi kampung perajin sekaligus sebagai ikon kerajinan khas Majapahit mulai tahun 1965 (Kompas, 2013:37). Pada waktu itu proses produksinya kebanyakan menggunakan peralatan yang sederhana atau tradisional dan hasilnya dijual keberbagai daerah seperti Surabaya, Bali bahkan sampai ke manca negara, yaitu ke berbagai daerah di Eropa.

Usaha kerajinan cor kuningan di Mojokerto terdiri dari usaha skala kecil dan menengah. Usaha tersebut ada yang sempat kolaps karena terimbas resesi ekonomi Eropa (Kompas, 2012:14). Sekarang ini usaha kerajinan kuningan mulai bangkit kembali seiring dengan membaiknya permintaan global. Kerajinan kuningan Bejjijong memiliki pangsa pasar hingga ke Eropa dan sebagian kecil Asia, khususnya Asia Tenggara. Hampir 95 persen hasil produk kerajinan cor kuningan dan perunggu yang dihasilkan pasar terbesarnya adalah negara-negara Eropa.

Terkait dengan ini, maka permasalahan yang diangkat adalah bagaimana para pengusaha tersebut mencari bahan baku dan bahan pembantunya, bagaimana proses produksi dan strategi pemasaran hasilnya, dan bagaimana gambaran/potret pengusaha kerajinan kuningan yang masih tetap eksis usahanya. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana pengusaha tersebut memperoleh bahan baku dan bahan pembantunya, teknologi dalam proses produksinya, hasil yang diperoleh, dan strategi pemasarannya. Selain itu juga untuk mendeskripsikan strategi pengusaha tersebut agar dapat mempertahankan hubungan kerja dengan pihak luar. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk melestarikan dan menyebarluaskan informasi tentang kerajinan kuningan Bejjijong. Hasil Tulisan ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan memperkaya khasanah budaya yang terkait dengan kerajinan kuningan. Selain itu, untuk memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan dan bagi masyarakat Mojokerto sendiri menjadi bangga dengan produknya sebagai ikon daerahnya.

Di Indonesia secara umum usaha kecil memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah homogenitas. Menurut Haryadi dkk (1998), homogenitas usaha kecil itu dapat terlihat pada beberapa hal yaitu: sebagian besar industri kecil terkonsentrasi di sektor makanan, minuman, tekstil dan pakaian serta kayu lapis. Kedua, sebagian besar pengusaha kecil membiayai usaha mereka dengan uang sendiri atau dari sumber informal. Ketiga, sebagian besar usaha kecil berada di pedesaan dan keempat, pada umumnya usaha kecil memakai teknologi sangat sederhana. Dari masing-masing jenis usaha itu masih dibedakan lagi menurut tingkat perkembangan usaha.

Saptandari dan Budiono (1994), kegiatan industri kecil dan kerajinan rumah tangga Indonesia umumnya terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Usaha ini memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja di pedesaan. Sebagai contoh adalah tenaga kerja yang terserap dalam industri rumah tangga kerajinan anyaman bambu di Mandirejo yang bervariasi, yaitu dari tenaga kerja muda hingga lanjut usia.

Beberapa tulisan tentang kerajinan rumah tangga yang lain seperti Siasat Usaha Kaum Santri yang ditulis oleh Desta T (2003). Raharjana. Buku tersebut mengupas tentang strategi produksi dan strategi penjualan yang digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha konfeksi. Dari kedua pola strategi tersebut tersirat perilaku ekonomi moral dan rasional. Tulisan tersebut sama-sama mengulas tentang kerajinan, namun tulisan ini akan mengulas tentang teknologi dan proses produksi pada usaha kerajinan.

Sarmini (2003) menyebutkan bahwa industri kecil dan kerajinan rumah tangga mampu

membantu kelangsungan hidup para petani di desa. Munculnya industri tersebut berawal dari tradisi kerajinan industri rumah tangga yang menggunakan bahan, ketrampilan dan keahlian setempat. Sumijati dkk (2001:133), menyebutkan bahwa *pande gangsa* adalah orang yang membuat benda-benda dari kuningan. Bahan kuningan yang digunakan dapat berupa biji logam ataupun materi daur ulang, yaitu benda logam yang sudah tidak terpakai dilebur atau ditempa kembali untuk dibentuk menjadi baru. Bahan-bahan ini diperdagangkan dalam bentuk *ingot* hasil cetakan biji logam sesudah dilebur. Secara garis besar teknik pembuatan benda-benda logam dapat dibedakan menjadi teknik cetak dan teknik tempa. Bagi yang menggunakan cetakan, yaitu cetakan tunggal (*single mould*) maupun cetakan setangkap (*bivalve*), ini digunakan untuk membuat benda-benda logam yang tidak memerlukan detail rumit. Teknik cetak yang menggunakan model lilin (*lost wax casting* atau *a cire perdue*) biasanya digunakan untuk membuat benda-benda logam yang memerlukan detail rumit, misalnya arca logam. Di Desa Bejjong, perajin juga menggunakan model lilin untuk mencetak arca Budha yang terbuat dari logam kuningan.

Prasasti (Raharjana, 2003:17), menyebutkan bahwa ada dua faktor yang dapat mendukung perkembangan usaha kecil, yaitu pertama, dari dalam (*internal*) yang berupa kemampuan pada diri seorang pengusaha untuk mengembangkan suatu usaha. Kedua, faktor dari luar (*eksternal*) yang berupa kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi usaha yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor internal adalah kemampuan pada diri seseorang untuk maju, misalnya etos kerja yang tinggi, kemampuan manajemen yang baik, serta keberanian untuk berinovasi, sedangkan faktor yang eksternal adalah berupabantuan modal dari pemerintah atau lembaga, luasnya akan permintaan barang, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan sebagainya. Raharjana (2003:69) juga menyimpulkan bahwa eksistensi industri kecil ditentukan oleh etos kerja pengusaha meliputi sikap disiplin, kerja keras, memiliki pandangan ke depan, kreatif, bertanggung jawab serta memiliki sikap hidup hemat. Hal ini akan dapat menghasilkan sebuah industri kecil yang memiliki produktivitas tinggi, baik kuantitas maupun kualitas, yang di kemudian hari akan turut menentukan luasnya pemasaran. Namun perlu didukung oleh kebijakan dan pembinaan dari pemerintah yang berupa bimbingan dan penyuluhan dan pemberian bantuan.

Menurut Sumintarsih (2003:145), bahwa pengusaha industri dan rumah tangga pada umumnya dihadapkan pada berbagai kendala yang sebenarnya bersifat klasik, yaitu modal, pemasaran, dan manajemen. Untuk mengatasi masalah ini salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengaitkan mereka dengan eksportir dalam hubungan subkontrak. Sistem subkontrak menciptakan suatu kaitan antara pihak pemesan (*principal*) dengan pihak produsen (*subkontraktor*). Keterkaitan ini antara lain ditunjukkan dalam kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak *principal* maupun produsen. Untuk pihak *principal*, misalnya harus menyediakan modal, bahan baku, dan melaksanakan pemasaran, sedangkan pihak produsen melaksanakan proses produksi dan menyediakan tenaga kerja.

Menurut Saleh (1986:18) industri kecil didefinisikan sebagai unit-usaha industri yang mempekerjakan antara 5 sampai dengan 19 orang tenaga kerja. Di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, industri kecil memiliki ciri antara lain: a) skala usahanya kecil (baik modal, tenaga kerja, maupun potensi pasarnya); b) berlokasi di pedesaan dan kota-kota kecil atau pinggiran kota besar; c) status usahanya adalah milik keluarga/pribadi; d) tenaga kerja diambil dari daerah sekitar dan direkrut lewat proses magang atau pihak ketiga; e) pola bekerja *part-time*; f) ada keterbatasan dalam adopsi teknologi; g) pengelolaan usaha dan administrasi masih sederhana; h) modal tergantung pada modal sendiri; i) ijin usaha tidak dimiliki; dan j) strategi usaha dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berubah-ubah dengan cepat (Sadoko, 1995 dan Raharjana, 2003).

Mengingat potensi yang dimiliki industri kecil untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat di suatu daerah, maka langkah pengembangan berbagai industri kecil yang telah ada, khususnya di daerah pedesaan, semakin dirasa penting (Raharjana, 2003: 64). Hal ini perlu ditekankan karena makin kecilnya kemampuan sektor pertanian untuk menyerap tambahan tenaga kerja. Dengan demikian adanya industri kecil di pedesaan akan membantu petani berlahan sempit untuk menambah penghasilan.

Suatu usaha produksi dapat sukses kalau hasil produksinya itu berkualitas dan mendapat pasar yang menjanjikan. Pemasaran suatu produksi industri ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan atau menjual ke tangan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung (Winardi, 1977:23). Pemasaran produk industri yang bersifat langsung dilakukan dari produsen ke konsumen atau penerima jasa tanpa melalui perantara, sedangkan pemasaran tidak langsung merupakan penjualan barang produksi ke konsumen melalui perantara, misalnya tempat pameran, agen, tengkulak, dan sebagainya (Sumardi; 2000: 121).

Penelitian ini dilakukan di Desa Bejjong, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap para informan yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Guna mendukung data yang berhubungan dengan permasalahan perlu juga menggunakan beberapa sumber kepustakaan baik dari buku, surat kabar, serta literatur lainnya. Data yang terkumpul, diinterpretasi dan dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif dalam bentuk uraian.

II. DESKRIPSI DESA BEJJONG

Bejjong merupakan sebuah desa termasuk dalam wilayah Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Menurut monografi desa Tahun 2012 luas wilayah Desa Bejjong tercatat 283,25 hektar yang terbagi menjadi 2 dukuh, yaitu Dukuh Bejjong dan Dukuh Kedungwulan. Desa Bejjong dikenal sebagai desa pengrajin kuningan karena di tempat ini penduduknya banyak yang menggeluti kerajinan kuningan. Desa Bejjong dekat dengan ibukota Kecamatan Trowulan, sehingga fasilitas yang ada lebih baik dibanding dengan desa-desa lainnya.

Penduduk di wilayah Bejjong yang bekerja ada 1217 orang diantaranya ada yang matapencarhianya sebagai buruh tani 311 orang menduduki urutan tertinggi. Setelah itu disusul penduduk yang matapencarhianya sebagai pengrajin, yaitu 304 orang. Disusul penduduk yang bermatapencarhian sebagai karyawan swasta 159 orang dan sisanya ada yang sebagai petani, pedagang, pengusaha, dosen, tukang, dan sebagainya. Penduduk yang bekerja sebagai pengrajin kebanyakan laki-laki yang telah lulus SMK atau sederajat. Mereka yang bekerja sebagai buruh tani kebanyakan pendidikannya rendah dan usianya sudah lanjut atau tua.

Bejjong merupakan sebuah desa yang dikenal sebagai desa perajin kuningan atau pematung sejak zaman Majapahit. Namun, setelah itu mengalami perubahan menjadi masyarakat petani dan membuat batu bata. Di antara perajin batu bata waktu itu yakni orang tuanya Mbah Sabar mengawali membuat kerajinan dari bahan baku tanah liat atau terakota (Lathif, 2013: 37). Namun ketika itu ada salah satu anaknya yang bernama Sabar diterima bekerja di Mojokerto, yaitu sebagai penjaga malam. Dalam kenyataannya, Mbah Sabar tidak hanya sebagai penjaga malam, namun oleh majikannya (orang Belanda) juga disuruh membantu bersih-bersih rumah atau menyelesaikan kebutuhan lainnya. Selama membantu orang Belanda itulah beliau banyak mendapat pengalaman yang tidak dapat diukur dengan

uang, yaitu membuat patung yang berkembang sampai sekarang.

Setelah berjalan beberapa tahun ikut orang Belanda, Mbah Sabar sering diajak ke Kediri karena mempunyai usaha di sana yakni membuat patung Budha. Pada waktu itu bahan yang digunakan untuk membuat patung dari tanah liat. Setelah berkali-kali ikut ke Kediri, mulailah Sabar diajari membuat patung Budha. Pada awalnya bahan yang digunakan untuk membuat patung berasal dari tanah liat, dan setelah itu mengalami peningkatan, yaitu menggunakan bahan dari kuningan dan perunggu.

Pada waktu itu hasil karyanya berupa patung Ganesha, Siwa, nandi dan katak, dan sejenisnya tidak banyak dilirik oleh warga sekitar. Namun yang mencari justru turis-turis asing yang berwisata ke Mojokerto untuk berkunjung ke museum Trowulan. Setelah usahanya berjalan, akhirnya Mbah Sabar mulai mengajak anak-anaknya termasuk menantunya untuk belajar membuat patung. Dari situlah usaha Mbah Sabar mulai dikenal dan kemudian berkembang akhirnya melibatkan saudara-saudara dan tetangganya untuk diajari membuat patung. Setelah dirasa berhasil, akhirnya para tetangga mulai mengusahakan sendiri-sendiri dan menjadi sumber pendapatan utama warga Bejijong sampai sekarang. Dengan demikian usaha kerajinan kuningan dapat mengubah Desa Bejijong yang semula penduduknya sebagian besar peternak dan petani sekarang ini menjadi pelaku industri kreatif. Sekarang ini rata-rata setiap perajin mempekerjakan 5-6 tenaga kerja dengan omzet Rp 20 juta-Rp 25 juta per bulan (Lathief, 2013:37).

III. KERAJINAN KUNINGAN DI DESA BEJIJONG

A. Bahan Baku Kerajinan Kuningan

Bahan baku utama pembuatan kerajinan kuningan di Bejijong dapat berupa biji logam ataupun materi daur ulang atau *rongsokan*. *Rongsokan* yang dimaksud adalah benda logam yang sudah tidak terpakai dilebur atau ditempa kembali untuk dibentuk menjadi benda baru (Sumijati dkk, 2001: 133). Beberapa sumber menyebutkan bahwa bahan-bahan logam tersebut diperdagangkan dalam bentuk ingot hasil cetakan biji logam sesudah dilebur atau istilah setempat *rongsokan*.¹ Bahan ini dapat diperoleh dengan cara membeli secara kontan dan ada juga yang secara bon atau meminjam di pengepul barang *rongsokan* yang ada di daerah sekitar.

Dahulu, untuk memperoleh bahan baku itu agak kesulitan karena harus di Jakarta atau Surabaya, Kediri, Kalimantan. Harga bahan baku yang ada di pasaran ada 2 macam, yakni harga kontan dan kredit. Pengepul bahan baku, selain menjual barang *rongsokan* kuningan juga menjual *giral*, yaitu *rongsokan* dari sejenis besi misalnya potongan kran, pegangan pintu, dan sejenisnya. *Giral* ini dipakai untuk campuran ketika kuningan dilebur agar cairannya menjadi bersih.

Dalam pembuatan patung, selain membutuhkan bahan baku kuningan juga bahan *malam* atau *lilin*, *mata kucing*, tanah liat, *mil* atau batu kapur, gip dan semen. Bahan tersebut mudah didapat, karena ada beberapa warga yang menjual kebutuhan untuk produksi kuningan. Terkait dengan penggunaan bahan baku, sampai sekarang para perajin tetap menggunakan *rongsokan* kuningan. Hal ini dikarenakan *rongsokan* kuningan kadarnya justru lebih tinggi bila dibanding dengan kuningan batangan atau *lantakan* yang dibeli di toko. Seperti dikatakan oleh Pak Wawan sebagai berikut:

“Kalau membeli kuningan batangan itu meleburnya terlalu lama karena kadar besinya

¹ *Rongsokan* yang dimaksud itu dapat berupa sisa-sisa barang atau peralatan rumah tangga yang telah rusak, seperti baki kuningan yang telah rusak, bekas lampu petromak, pekinangan, dan sejenisnya.

terlalu tinggi. Selain itu hasil yang di dapat tidak sesuai dengan yang diharapkan, maksudnya tidak sama dengan peleburan dari barang *rongsokan*. Di samping itu, kunungan batangan atau *lantakan* harganya lebih mahal dari barang *rongsokan*".

Dahulu kalau membeli barang *rongsokan* kunungan, banyak pernak perniknya,.yaitu kalau nasibnya lagi mujur ada kalanya kunungan *rongsokan* itu menjadi barang yang istimewa.Sebagai contoh pada tahun 1991 harga *rongsokan* kunungan Rp 3.500,00/kg. Ada perajin yang membeli kunungan *rongsokan* ternyata di antaranya barang tersebut ada bagian dari keris yang terbuat dari emas, juga patung yang berlapis emas.

B.Proses Produksi

Di dalam proses produksi, pertama-tama yang dilakukan oleh pengusaha kunungan adalah membuat masternya. Pembuatan master merupakan pekerjaan yang berat dan mahal harganya, karena dalam proses ini membutuhkan ketelitian dan kerapihan pekerjaan. Pertama-tama yang dilakukan membuat rencana gambar terlebih dahulu. Supaya gambar tersebut rapi dan halus, pekerjaan ini diserahkan ke tukang ukir dan setelah itu baru ke tukang cetak atau dicetak sendiri.² Pencetakan master ini, antara pengusaha satu dengan lainnya tidak sama. Ada yang menggunakan bahan dari semen, fiber dan ada juga yang menggunakan gib. Pembuatan master ini harganya paling mahal, karena setiap master dapat digunakan hingga berkali-kali bahkan sampai bosan.³

Setelah membuat master, selanjutnya membuat desain. Pekerjaan mendesain dilakukan oleh tenaga perempuan, karena pekerjaan membuat desain dianggap ringan, tetapi membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kecermatan. Bahan yang digunakan adalah *malam/lilin* yang dicampur dengan mata kucing lalu dipanaskan supaya mencair. Pada proses pencairan, perbandingan bahan lilin/malam sebanyak 10 kg dan mata kucingnya sebanyak 2 kg. Mata kucing yang akan dipakai harus *diayak* atau disaring supaya bersih, tanah yang menempel akan berjatuhan. Mata kucing ada dua macam, yaitu warna kehitam-hitaman dan warna kuning. Dari kedua warna itu yang paling bagus kualitasnya mata kucing yang warnanya kuning. Mata kucing digunakan untuk mengeraskan lilin. Tempat yang digunakan untuk mencairkan lilin adalah kaleng bekas cat yang ditaruh di atas tungku lalu diberi api menggunakan bahan bakar kayu. Supaya malam/lilin yang direbus itu hasilnya baik, maka setelah lilin mencair langsung diangkat menggunakan *japit* yang terbuat dari besi. Setelah itu lilin disaring, supaya kotoran yang ada dalam cairan lilin tidak terbawa ke dalam penampungan lilin dan diaduk supaya tercampur rata.

Bersamaan dengan merebus lilin/*malam*, perajin menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk pekerjaan berikutnya yaitu, cetakan untuk membuat desain dan bak atau ember yang telah diisi dengan air sumur yang kemudian dicampur dengan sabun deterjen. Ember yang digunakan sebanyak 2 buah, yaitu untuk tempat mencuci cetakan dan menyiram ketika mencetak desain, dan yang satunya untuk merendam desain yang telah jadi. Campurannya menggunakan sabun deterjen, supaya lilin yang ada dalam air tidak menempel pada ember. Biasanya ember atau bak yang digunakan terbuat dari bahan plastik warna hitam. Peralatan lainnya adalah gayung plastik (*cibuk*) dan kain pembersih/pengering dari potongan kain perca, serta pisau kecil.

Cetakan untuk desain terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan bentuknya. Prosesnya, cetakan dimasukkan kedalam bak air, kemudian satu per satu diangkat lalu dibuang airnya sambil dikeringkan dengan kain supaya kering. Pada saat itu cetakan sambil dirangkai atau digabung-gabung sehingga terbentuk sesuai aslinya. Setelah terbentuk dan dirapikan, cetakan dipegang dengan posisi terbalik, yang ada lubangnya menghadap ke atas karena untuk tempat

² Wawancara dengan Agus Gotro, 19 April 2013, di Bejjong Mojokerto

³ Wawancara dengan Yasin, 20 April 2013, di Bejjong Mojokerto

menuang cairan lilin. Pada saat mengisi lilin/*malam*, master harus betul-betul terisi penuh dan setelah itu cetakannya langsung dibalik supaya lilin/*malam* yang ada di dalam cetakan tumpah. Setelah liliannya habis atau tidak menetes, cetakan dibalik kembali untuk dituangi air dan langsung dibalik lagi supaya airnya juga terbuang habis. Lilin yang menempel disekitar lubang cetakan harus di *lorot* atau dibuang dan selanjutnya membuka cetakan satu demi satu secara perlahan-lahan untuk diambil desainnya.

Ketika pertama kali akan membuka cetakan, yaitu cetakan sedikit dibuka lalu diangkat supaya sebagian desain terlihat. Begitu terlihat langsung disiram air supaya tidak *lengket* atau menempel pada cetakan yang ada di sebelahnya dan dilanjutkan dengan pembukaan yang kedua, ketiga dan seterusnya, dan harus tetap disiram air. Berikutnya desain dilepas dari cetakannya, dan dipindahkan ke bak air yang ada disebelahnya. Pekerjaan ini terus menerus dilakukan sampai lilin/*malam* yang dicairkan habis atau tercetak menjadi desain. Pekerjaan membuat desain ini merupakan pekerjaan yang ringan namun perlu hati-hati, yaitu lilin/*malam* yang digunakan tidak boleh terlalu panas dan sebaiknya hanya suam-suam kuku saja. Jika liliannya terlalu panas, desainnya menjadi tipis dan tidak menutup kemungkinan ada yang berlubang karena lengket di cetakan sehingga rusak dan tidak terpakai.⁴ Selama pembuatan desain, cairan lilin harus sering diaduk-aduk dan ditambah cairan lilin dari tungku supaya kehangatannya tetap stabil dan tidak membeku.

Pembuatan desain harus 1 paket sesuai dengan yang dijadwalkan pada hari itu. Jika hari ini jatahnya membuat desain, misalnya patung kerbau sebanyak 50 ekor, maka membuatnya harus sejumlah itu dan lengkap dengan kaki beserta tanduknya. Selesai pembuatan desain kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan berikutnya, yaitu pengisian desain.

Desain kemudian diisi dengan pasir yang telah dicampur semen dan air. Dalam proses ini pasir disaring terlebih dahulu atau *diayak* supaya bersih dari kotoran dan kerikil. Setelah itu pasir yang telah *diayak* dicampur dengan semen lalu disiram air, diaduk-aduk menggunakan cangkul atau cethok supaya tercampur rata. Setelah itu, diisikan pada desain. Untuk memudahkan pengisian, posisi desain harus dibalik sehingga lubangnya menghadap ke atas dan harus diisi penuh. Setelah penuh, desain harus dicuci supaya sisa-sisa isian yang menempel di luar desain larut. Pekerjaan selanjutnya desain diletakan ketanah dalam posisi berdiri atau tegak. Supaya desain tidak berjatuhan, tanah yang digunakan harus dilubangi atau ditempat tersebut diberi sandaran dari kayu.

Perajin melakukan proses penghalusan atau finishing setelah selesai pengisian pasir. Hal ini untuk efisiensi waktu, sambil menunggu desainnya kering. Waktu pengeringan tergantung dari besar kecilnya desain. Desain yang berwujud tangan dengan diameter 3cm membutuhkan waktu antara 2-3 jam. Untuk desain yang besar, pengeringannya antara 5-7 jam.

Setelah Desain kering, perajin mulai memasang paku pada desain yang telah kering. Ketika memasang paku, perajin harus lebih jeli dan teliti karena paku itulah yang menjadi penyangga ketika desain dibakar. Pemasangan paku juga harus menyesuaikan dengan besar kecilnya desain. Apabila desain berupa tangan diameter 3 cm, paku yang dipakai dengan ukuran kecil atau paku *plepet*. Selain itu, banyaknya paku yang dipasang disesuaikan dengan barangnya. Misalnya bentuk tangan yang kecil jumlah paku yang dipasang ada 4 buah, yaitu di lengan atas 1 buah, dekat siku 1 buah, lengan bawah 1 buah, dan telapak tangan 1 buah. Khusus desain kecil seperti pengrajan tangan, begitu selesai langsung ditaruh dipapan yang telah disediakan.

Pekerjaan selanjutnya menghaluskan dan memperbaiki desain. Desain yang kasar atau tidak beraturan langsung dikerik menggunakan pisau kecil. Untuk desain yang berlubang atau

⁴ Wawancara dengan Jonet, 21 April 2013, di Bejjong Mojokerto

cacat, langsung ditutup atau diperbaiki menggunakan lilin. Begitu pula pada saat memasang jalan cor pada desain, direkatkan menggunakan lilin. Setelah itu, desain dihaluskan dengan digosok menggunakan potongan kaos yang diberi lilin dan semi dibakar.

Pekerjaan berikutnya membungkus desain menggunakan tanah liat. Dalam proses ini perajin harus mengayaki lumpur sawah. Setelah itu lumpur dicampur *mil* atau *gamping* kemudian disiram air lalu diaduk-aduk supaya tercampur di ember plastik yang besar. Selain itu menyiapkan tanah liat yang dicampur dengan air lalu diaduk-aduk menggunakan cangkul supaya tanahnya menjadi lembek dan halus. Setelah itu dipindahkan ke halaman yang terbuka untuk diproses. Dalam pemrosesan ini, kalau musim penghujan harus diberi atap supaya tidak terkena air hujan.

Pemrosesan berikutnya desain yang telah dihaluskan dimasukkan kedalam ember yang telah diisi lumpur dan *mil* atau *gamping* lalu dikuwas supaya semua tertutup dan berubah warna menjadi keabu-abuan. Setelah itu desain diletakkan di atas tanah liat yang telah dicetak lembaran dengan ketebalan sekitar 3 cm dan ditutup menggunakan tanah liat, yang kelihatan hanya lubang jalannya cor. Setelah itu berganti menutup yang lainnya sampai proses pembungkusan selesai. Dengan berakhirnya proses pembungkusan, perajin dapat mengerjakan proses penghalusan, finishing, dan sebagainya, sembari menunggu pengeringan tanah liat yang telah diisi desain tersebut. Pengeringan tanah liat yang membungkus desain membutuhkan panas sinar matahari antara 2-4 hari. Lain halnya musim penghujan, perajin harus mempersiapkan terpal untuk menutup pembungkusan.

Tahap berikutnya adalah proses pembakaran. Dalam proses pembakaran ini tungku yang dibutuhkan sebanyak 2 buah, yaitu satu buah tungku untuk membakar tanah liat sebagai pembungkus desain dan satu lagi untuk melebur bahan baku yaitu *rongsokan* kuningan yang dicampur dengan *giral*. Proses pembuatannya sebagai berikut. Pertama menyiapkan adonan tanah liat, besi, dan batu bata. Untuk itu, dibutuhkan lahan sekitar 120x150 cm dengan posisi tanah rata. Pengrajinnya yaitu, batu bata ditata dengan posisi jatuh memanjang. Ketika memasang bata satu sisi dikurangi 50 cm memanjang, yaitu berada di tengah-tengah dan ketinggiannya sekitar 30 cm. Setelah itu, pemasangan batu bata lagi sampai menyamai sisi lainnya yakni sekitar 1 m. Tempat yang tidak dipasang batu bata ini dipakai untuk tempat memasukkan kayu bakar. Sebelum semua terpasang dengan ketinggian 1 m, ruangan untuk pembakaran kira-kira 30 cm dari dasar tanah dipasang besi *eizer* ukuran diameter 0,8 atau 0,10 cm secara berderet sebagai landasan tanah liat yang akan dibakar. Berikutnya pasangan batu bata dilapisi adonan tanah liat supaya sela-selanya tertutup sehingga jika dipakai untuk proses pembakaran apinya tidak dapat keluar.

Proses pembakarannya, tanah liat yang sudah kering, satu persatu dimasukkan kedalam tungku dan ditata dengan posisi berdiri, lubang pengecoran posisinya berada di atas. Apabila penataan tanah liat untuk deretan pertama selesai, dilanjutkan dengan penataan yang kedua dan seterusnya sampai tungku tersebut penuh. Berikutnya pada lubang tungku dimasukkan kayu bakar dan diberi rongga untuk tempat selang gas elpiji, lalu dinyalakan hingga kayu yang ada di sekitarnya terbakar. Sambil menunggu api membara, di atas tanah liat ditutup daun-daunan kering yang juga ikut terbakar. Setelah itu selang gas dikeluarkan dan dipindahkan ke tempat peleburan bahan baku, yaitu *rongsokan* kuningan. Pembakaran tanah liat memakan waktu sekitar 7-8 jam.

Berikutnya membuat tungku untuk peleburan *rongsokan* kuningan dicampur dengan *giral*. Pertama membuat adonan untuk mengolesi bagian luar dan dalam *kowi*. Adonan tersebut dibuat dari *mil* dan abu kotoran peleburan kuningan dicampur air. Sambil menunggu *kowinya* kering, mulai membuat tungkunya, yaitu memasang batu bata untuk dasaran sejumlah 2 buah yang ditata berjejer. Setelah itu *kowi* diletakkan di atasnya dan pada bagian

sisi *kowi* ada yang ditempeli genteng untuk tempat meletakkan selang gas elpiji. Selanjutnya, memasang batu bata di luar *kowi* secara melingkar dan tingginya sejajar dengan *kowi* diberi jarak sekitar 8 cm dengan *kowi*.

Setelah membuat tungku selesai, berikutnya adalah melapisi batu bata tersebut dengan adonan tanah liat. Hal ini dimaksudkan untuk menutup sela-sela tatanan batu bata sehingga api yang berada di dalam tidak merambat keluar. Berikutnya *rongoskan* kuningan beserta *giral* dimasukkan kedalam *kowi* dan setelah itu selang yang tadinya berada di tungku pembakaran tanah liat diambil untuk dipindahkan ke tungku peleburan kuningan. Di tempat ini lamanya pembakaran sekitar 7 jam tergantung dari kualitas kuningan yang dilebur dan jumlah barangnya, namun yang umum seberat 100 kg *rongoskan*. Dalam pekerjaan ini, alat-alat yang dibutuhkan diantaranya ember besar 1 buah, tabung gas isi 3 kg sebanyak 4-5 buah, potongan besi, *japit*, gayung besi, genteng, dan *cuthik*. Ember besar ini digunakan untuk tempat tabung gas yang sebelumnya telah diisi air. Ember yang telah diisi air itu dimasuki potongan besi yang telah dibakar sampai mengangaatau membara supaya airnya ikut panas. Cara ini dimaksudkan supaya tabungnya tidak beku. Gayung digunakan untuk mengambil kuningan yang telah dilebur untuk dimasukkan ke jalan cor tanah liat. Kalau *japit* digunakan untuk mengangkat genteng yang berada di atas *kowi* sebagai penutup, yaitu untuk membuka dan menutup *kowi*, sedangkan *cuthik* digunakan untuk memeriksa kuningan yang dilebur.

Semua alat yang dibutuhkan untuk peleburan kuningan harus pesan. Sebagai contoh *kowi* harus pesan ke tukang pembuatan peralatan rumah tangga dari bahan besi. Alat ini harganya sekitar Rp 800.000,00/buah dan penggunaannya hanya sampai 15 x, setelah itu harus ganti baru lagi. Gayung, *japit*, dan *cuthik* juga harus pesan ke tempat penjualan atau ke tempat pembuatan peralatan rumah tangga karena alat ini khusus, yaitu tangkainya harus panjang (120 cm), sehingga kalau digunakan tidak terkena panasnya tanah liat yang dibakar. Untuk tabung gas, ember, dan selang dibeli di toko-toko terdekat.

Perubahan yang ada di tempat peleburan kuningan hanyalah pada bahan bakar. Pertama sekitar tahun 1972, bahan bakar yang digunakan arang dengan tenaga manusia, dengan dikipasi. Tahun 1985, bahan bakarnya tetap arang, tenaganya menggunakan *blower* atau kipas angin. Kemudian pada tahun 1995, bahan bakar sudah berubah menggunakan minyak tanah/kompor. Pada tahun 2005-2006, bahan bakarnya berubah menggunakan solar dan terakhir tahun 2010 sampai sekarang menggunakan gas elpiji. Menurut para pengusaha, pemakaian bahan bakar elpiji inilah yang dianggap cocok dan irit biayanya. Elpiji yang digunakan untuk rumah tangga, yang beratnya 3 kg.

Proses peleburan dan pembakaran sekitar 7-8 jam atau *rongoskan* kuningan telah mencair dan desain telah matang, selanjutnya mengisi lubang cor pada desain. Pertama-tama tutup *kowi* yang berupa genteng dibuka menggunakan *japit* untuk melihat kuningannya sudah mencair apa belum. Apabila sudah mencair, perlu ditutup lagi dan bila sudah mencair *kowi* tetap dibiarkan terbuka. Apabila *rongoskan* kuningan telah mencair, bakaran desain satu persatu diambil dari tungku menggunakan *japit* diletakkan di tempat yang telah disediakan. Penempatan desain lebih mengarah dekat dengan tungku peleburan dan diberi penyangga dari bahan kayu balok atau besi supaya desain tersebut dapat berdiri tegak dan posisi lubang cor berada di atas. Setelah tertata rapi dilakukan pengecoran secara berurutan. Begitu selesai dilanjutkan dengan pengambilan tanah liat atau desain pada urutan berikutnya diletakkan di sebelahnya secara berjajar kemudian dicor dan sampai desain itu habis terisi (dicor) cairan kuningan.

Apabila dalam pengecoran cairan kuningan masih tersisa, biasanya cairan tersebut digunakan untuk membuat *pakan* las atau cukup dikeluarkan dari kowinya dan selanjutnya dituang di tanah. Sebelum *kowi* diturunkan, terlebih dahulu api yang dipakai untuk melebur

dimatikan. Dengan demikian pengecoran desain telah selesai. Namun, kalau yang tersisa itu tanah liat yang di dalamnya ada desain, pengecoran dilanjutkan pada esok harinya lagi atau kalau masih mempunyai *rongoskan* kuningan dan waktunya memungkinkan dapat dilanjutkan pada hari itu juga. Pekerjaan melebur dan membakar tanah liat sampai proses pengecoran ini petugasnya hanya 1 orang. Pekerjaan pengecoran penggajiannya secara borongan dan bila tidak ada pengecoran, tenaga tersebut penggajiannya secara harian dengan mengerjakan pekerjaan, seperti membuat desain, penghalusan atau pekerjaan lainnya.

Apabila tanah liat pembungkus desain yang dicor sudah dingin, dilanjutkan dengan membuka desain. Proses pendinginan tanah liat ini antara 8-10 jam tergantung dari kondisi udara. Saat musim hujan, udaranya dingin maka pendinginan cepat terjadi. Musim kemarau suasana udara panas, pendinginan memakan waktu cukup lama, sekitar 10 jam. Proses selanjutnya, tanah liat satu persatu diambil dari tempat pengecoran untuk ditaruh di atas gerobak. Setelah itu dipukul-pukul menggunakan *palu* atau pukul besi supaya tanahnya pecah-pecah. Pekerjaan ini dilakukan berkali-kali sampai yang tertinggal hanya kuningannya lalu ditaruh di lantai dan selanjutnya berganti mengambil yang lain untuk dipukul-pukul dan seterusnya sampai pekerjaan itu selesai. Apabila tanah liat yang ada di gerobak sudah penuh, pekerjaan membersihkan tanah liat dihentikan sementara dan waktunya digunakan untuk membuang tanah liat. Tanah itu dibuang untuk menguruk jalan atau hanya ditumpuk di salah satu tempat, sampai berkali-kali sampai tanah liat bakaran habis. Apabila pekerjaan membersihkan kuningan telah selesai, barulah kuningan tersebut dipindahkan dan dikumpulkan dalam satu tempat untuk dibersihkan dan dirapikan. Dalam proses pembakaran tanah liat, kuningan yang dihasilkan ada 2 macam, yaitu warna kuning dan warna putih keperakan. Adanya 2 warna ini hasil dari proses pembakaran, yaitu warna putih keperakan karena dalam pembakaran panasnya stabil, sedangkan warna kuning karena ketika membakar panasnya tidak stabil atau belum matang.⁵

Pada saat merapikan kuningan, alat yang digunakan adalah catut besar, catut tanggung, dan pukul besi atau *palu*. Alat ini digunakan untuk memukul-mukul kuningan yang masih ada tanahnya, sedang catut besar digunakan untuk memotong kuningan yang menempel pada desain dan yang tidak diperlukan. Untuk pekerjaan memotong ini membutuhkan 2 orang tenaga, yaitu seorang yang memegangi catut dan menekannya dan yang seorang lagi untuk memegangi kuningan yang akan dipotong. Catut tanggung digunakan untuk mencabut paku-paku yang menempel pada kuningan. Setelah selesai lalu penyortiran dan pemilahan barang, yang rusak dikumpulkan menjadi satu dengan sisa-sisa potongan yang akan dilebur lagi. Untuk hasil yang baik dipilah-pilah dan disesuaikan bentuknya diserahkan ke bagian *finishing* awal untuk dihaluskan menggunakan grenda. Bahan untuk menghaluskan amplas yang ukurannya tergantung kebutuhannya.

Dalam pekerjaan *finishing* ada 2 macam, *finishing* awal dan *finishing* akhir. *Finishing* awal, meliputi grenda, las, dan grenda lagi. Grenda yang pertama untuk merapikan dan menghaluskan barang kuningan. Apabila barang yang digrenda ini mau disatukan atau disambung, selesai digrenda langsung diserahkan ke tempat pengelasan lalu dikembalikan ke tempat penggrendaan lagi untuk dihaluskan dan dirapikan. Apabila barang yang dibuat tidak menggunakan penyambungan, kalau tidak cacat cukup sekali digrenda langsung dipoles atau diberi warna. Akan tetapi kalau ada yang cacat, misalnya batikannya kurang, setelah digrenda langsung dibatik menggunakan kikir dan kemudian digrenda kembali supaya halus.

Berikutnya *finishing* kedua atau terakhir, yaitu proses pewarnaan. Dalam proses pewarnaan, ada bermacam-macam, warna hijau, kuning atau brom antik, putih silver, dongsong, dan coklat. Apabila menghendaki warna putih silver, maka kerajinan tersebut

⁵ Wawancara dengan Suharno, 21 April 2013, di Bejjong Mojokerto

digosok atau dipoles menggunakan GSOL. Caranya GSOL digosok-gosokan ke kain poles, setelah itu mesin grenda dihidupkan dan bendanya digosok-gosokan pada kain yang telah diolesi GSOL tadi. Alat yang digunakan menggosok grenda, sedangkan kain poles yang digunakan buatan dari Jabung Jombang. Kain poles ini terbuat dari barang ristan, yaitu sis-sisa kain konfeksi jeans yang dijahit dan dibentuk melingkar. Perajin alat poles ini setiap 3 bulan sekali datang ke Bejjijong untuk menjual hasilnya dengan harga Rp 6.000,-/biji.

Dalam pewarnaan ini, apabila menghendaki warna hijau tua menggunakan HCl yang bahannya dibeli di toko dengan harga Rp 25.000,-/liter. Apabila menghendaki warna coklat, kerajinan yang akan diberi warna dibakar sampai berubah warna. Jika sudah berubah warna menjadi kehitam-hitaman langsung diangkat. Setelah dingin, diberi warna menggunakan semir merk Kiwi warna coklat. Caranya semir digosok-gosokan pada benda yang akan diberi warna sampai mengkilap. Semir ini mudah diperoleh di toko kelontong dengan harga Rp 12.000,-/biji. Apabila perajin menghendaki warna putih silver, kerajinan tersebut dipoles terlebih dahulu lalu disepuh menggunakan perak. Harga perak sekitar Rp 10.000,00/gram.

Pekerjaan *finishing*, dengan menggunakan tenaga borongan, karena dapat meringankan beban dan dapat mengejar waktu. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Pak Agus Gotro.

“Sekarang ini untuk finishing saya lebih senang borongan daripada harian, karena dapat menekan biaya makan dan minum. Bahkan untuk tenaga harian saja mulai minggu lalu sudah lepas, maksudnya tidak member makan dan minum”.

Penggajiannya tenaga borongan ini per item barang disesuaikan dengan jenis kesulitannya. Sebagai contoh untuk *finishing* gajah ukuran kecil, diameter 5 cm upah yang diberikan sebesar Rp 1.500,-/biji. Untuk patung Budha setinggi 30 cm upahnya sebesar Rp 20.000,-/biji.

Terkait dengan *finishing*, para perajin sudah banyak yang menggunakan peralatan baru. Sebagai contoh, untuk penghalusan, dahulu cukup menggunakan kikir, amplas dan grenda, yaitu menggunakan pedal sepeda yang ditarik tangan, tetapi sekarang menggunakan listrik. Kemudian untuk mengelas, kalau dahulu menggunakan bahan bakar arang, sekarang tenaga listrik. Perubahan ini dianggap lebih praktis dan hasil yang diperoleh lebih maksimal.

C. Hasil Produksi

Kebanyakan pengusaha memproduksi kuntingan hanya terbatas atau sesuai dengan pesanan, sebagian lagi memproduksi dalam jumlah banyak. Untuk produksi dalam jumlah banyak umumnya harganya murah, seperti gatungan kunci, gajah mini, dan sejenisnya. Selanjutnya di bawah ini contoh beberapa karya pengusaha patung Bejjijong.



Foto 1. Hasil kerajinan kuntingan Bejjijong

IV. PEMASARAN DAN POTRET PENGUSAHA KUNINGAN

A. Pemasaran Kerajinan Kuningan

Pada umumnya pengusaha kuningan dalam memasarkan hasil produksinya mempunyai kiat sendiri-sendiri. Ada beberapa pengusaha yang selalu memajang hasil produksinya di rumah atau *artshop*. Namun ada juga yang tidak memiliki *artshop*, rumah hanya sebagai bengkel usaha. Dengan demikian barang yang diproduksi langsung dikirim ke alamat pemesannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan pengusaha kerajinan kuningan di Bejjong tidak mempunyai kelompok-kelompok usaha atau semacam koperasi. Umumnya pengusaha berjalan sendiri-sendiri, antara pengusaha satu dengan lainnya saling merahasiakan para pelanggannya. Masing-masing pengusaha mencari terobosan pemasaran sendiri, ada yang mendatangi *artshop-artshop* di Bali, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan ada juga yang hanya berdiam diri di rumah sudah didatangi pembeli. Menurut pengalaman pengusaha, bahwa kalau mendatangi ke *artshop* harus bisa meyakinkan para pembelinya supaya tetap bertahan menjadi langgannya.

Di Bejjong, pada umumnya pengusaha mempunyai jaringan pemasaran sendiri-sendiri, seperti yang dikatakan Pak Agus Gotro:

“Setiap bulan atau 2 bulan sekali dapat dipastikan saya selalu berkunjung ke *artshop-artshop* langganan untuk mengecek kalau ada order masuk. *Artshop* yang paling sering dikunjungi adalah yang ada di Bali karena yang banyak omzetnya di situ. Kalau yang berada di Solo dan Yogyakarta jarang sekali para turis yang berkunjung ke artshop itu memesan barang dan biasanya barang yang ada itulah yang dibeli. Jadi saya ke tempat itu yang penting untuk mengecek barang yang laku belum dan syukur-syukur ada yang pesan begitu”

Lain halnya dengan Pak Haryadi Yang pemasarannya cukup di rumah menunggu pembeli atau pemesan datang. Hal ini seperti yang diceriterakan:

“Dalam kesehariannya saya lebih banyak di rumah karena pembeli kebanyakan datang ke rumah atau hanya pesan melalui SMS atau telpon dan beberapa hari setelah itu mengirim gambar yang dipesan. Setelah ada kesepakatan biasanya pemesan langsung kirim uang atau transfer uang minimal 30% dari harga pembeliannya. Kemudian pelunasannya menunggu barang dikirim, membayarnya sekalian mengganti ongkos kirim karena itu merupakan beban pembeli. Terkait dengan pemasaran barang ini di antara saya dan pembeli sudah ada kepercayaan mengirim barang dahulu baru pelunasan dan selama ini belum pernah terjadi barang yang dikirim tidak dibayar”.

Harga penjualan barang kuningan produksi Bejjong sangat bervariasi. Ada kuningan yang harganya Rp 25.000/biji, misalnya patung gajah kecil. Ada juga yang harganya ratusan ribu bahkan ada yang jutaan rupiah. Dalam hal ini tergantung dari besar kecilnya barang, kerumitan, dan keaslian barang atau hasil temuan. Khusus yang hasil temuan, meskipun kecil bisa mencapai puluhan juta rupiah per bijinya. Perlu diketahui bahwa wilayah Bejjong dan sekitarnya dahulu merupakan bekas kerajaan Majapahit, sehingga banyak dijumpai temuan-temuan dari penggalian tanah seperti yang dikemukakan Pak G:

“Sebetulnya barang temuan itu harus dilaporkan ke Museum Trowulan dan nantinya diberi imbalan dan sertifikat penghargaan oleh pemerintah. Tapi sepertinya pihak museum dulunya minim memberi penghargaan berupa uang, sehingga kalau ada penemuan jarang yang dilaporkan dan diam-diam dijual ke pengusaha kuningan dan selanjutnya dijual ke *artshop* yang ada di Bali. Dulu memang sering terjadi penemuan, tetapi untuk sekarang sudah jarang sekali terjadi. Sekarang seandainya adapenemuan langsung diserahkan ke pemerintah, di samping undang-undangnya ada juga ada penghargaan yang tinggi, yaitu diberi sertifikat dan uang yang sesuai dengan besarnya barang”.

B. Potret Pengusaha Kerajinan Kuningan di Bejjijong

Bejjijong merupakan sebuah desa termasuk dalam wilayah Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Memasuki Desa Bejjijong sepintas terlihat seperti desa-desa pada umumnya, yaitu rumah-rumah penduduk berjajar di pinggir jalan yang umumnya menghadap ke jalan dan terkesan tidak ada kegiatan yang mencolok. Rumah-rumah produksi terlihat dari papan nama *artshop* kerajinan kuningan dan terdapat tumpukan tanah liat atau jemuran tanah liat yang berada di halaman rumah. Begitu masuk ke dalam rumah barulah terlihat beberapa tenaga yang sedang berproduksi atau dijumpai berbagai peralatan untuk membuat kerajinan kuningan, seperti tungku, *kowi*, desain, dan tumpukan atau hamparan kerajinan kuningan yang sedang diproduksi. Inilah sekedar cuplikan wilayah Bejjijong yang dikenal sebagai pengrajin kuningan. Berikut gambaran dua pengusaha kuningan di Bejjijong Pak Agus Gotro dan Pak Haryadi.

1. Agus Gotro: sebuah keberuntungan

Agus Gotro dilahirkan di Bejjijong desa pengrajin patung kuningan. Pada waktu itu orang tuanya sebagai pengusaha patung kuningan yang terkenal di daerahnya, namun tidak pernah memaksakan anak-anaknya untuk menggeluti jejak orang tuanya. Di usia sekolah dasar, anak-anaknya dimasukkan sekolah seperti teman-teman lainnya dan sepulang sekolah dibiarkan bermain bersama teman-teman sebayanya. Demikian pula ketika memasuki sekolah di tingkat SMP anak-anaknya juga tetap diberi kebebasan bermain dan tidak diarahkan membantu orang tuanya membuat patung. Itulah kehidupan masa lalunya Pak Agus Gotro.

Pada suatu hari ayah Agus Gotro tiba-tiba meninggal. Dengan meninggalnya ayah Agus Gotro, maka usaha kerajinannya menjadi tidak terurus. Setelah beberapa bulan tidak ada pengawasan, akhirnya keluarga mengadakan rapat untuk keberlangsungan usahanya. Pada waktu itu saudara Agus Gotro ditawari untuk meneruskan karena yang lebih tua, tetapi langsung dijawab tidak mampu. Akhirnya diputuskan keluarga bahwa yang disuruh menggantikan adalah Agus Gotro yang waktu itu masih SMP dan tetap sekolah. Pada tahun pertama merasa berat melakukan tugasnya karena pagi hari sekolah dan siangnya menjalankan tugas yang baru. Pekerjaan itu lancar setelah berjalan 2 tahun. Pada waktu itu tenaga kerjanya berasal dari saudara-saudaranya yang tinggal di sekitar rumahnya. Cara penggajiannya secara mingguan dan selama bekerja makan minum, rokok ditanggung. Setelah usahanya berjalan lancar, mulailah mencari peluang untuk pemasaran dan kebetulan waktu itu mendengar temannya di sekolah kalau ada penemuan patung di desa tetangga dan bergegaslah ia ketempat penemuan itu seperti yang diceriterakan:

“Trowulan kan merupakan bekas kerajaan Majapahit, sehingga di wilayah tersebut banyak dijumpai barang-barang peninggalan kerajaan seperti patung Budha, Syiwa, dan sejenisnya. Sebetulnya penemuan barang tersebut harus dilindungi oleh pemerintah, namun waktu itu penghargaannya terlalu kecil atau tidak sepadan, sehingga oleh penemuanya tidak pernah dilaporkan ke pemerintah. Biasanya menunggu beberapa hari setelah itu barulah dijual kepada orang yang membutuhkan termasuk saya. Jadi saya ini selain membuat patung juga melalang ke desa-desa mencari barang-barang temuan yang nantinya saya jual ke *artshop* yang ada di Bali”

Menurut Agus Gotro keberuntungan seseorang tidak dapat tertandingi oleh orang lain. Sekitar tahun 2004 ia berniat membeli barang *rongsokan* untuk bahan baku membuat patung. Pada waktu itu ia membeli *rongsokan* sebanyak 3 karung bagor. Sesampai di rumah barang tersebut dibuka untuk diseleksi dan ternyata di antara *rongsokan* itu mendapatkan sebuah patung kecil yang menurut perkiraannya terbuat dari perunggu dan emas. Oleh Agus Gotro barang tersebut dibawa ke Bali untuk *dikir* atau *dikeep* sekalian mengantar pesanan. Setelah *dikir*, ternyata patung tersebut terbuat dari emas dan langsung dibeli orang Singapura waktu itu sebesar Rp 60.000.000. Betapa bahagianya Agus Gotro mendapat uang sebesar itu tidak

sebanding dengan harga pembelian *rongsokan* watu itu.

Menurut Agus Gotro, keberuntuan tidak hanya dari patung Ganesha itu saja, tetapi pernah pula mendapatkan lonceng yang beratnya sekitar 1 kuintal. Di dalam lonceng tersebut terdapat tahun pembuatannya, yaitu tahun 1928 dan sampai sekarang barangnya masih disimpan di rumah menunggu pembeli datang. Barang tersebut merupakan barang kuno dan langka, sehingga tidak dilebur untuk bahan baku kerajinan. Pada tahun 2011, lonceng itu pernah ditawar ditukar dengan sebuah sepeda dan uang sebesar Rp 20.000.000. Namun, oleh Agus Gotro tidak diberikan karena mintanya seharga Rp 35.000.000. Akhirnya barang tersebut sampai sekarang masih dipajang di tempat *showroomnya*.

Rongsokan yang dijual di pasaran murni *rongsokan* karena penjual rongsokan sebelum menjual ke pasaran terlebih dahulu menyeleksi barang-barang yang akan dijual. Dengan demikian para pembeli *rongsokan* tidak lagi bisa menemukan barang-barang yang nilainya tinggi seperti dulu lagi. Selain itu di wilayah Trowulan sudah bersih dari puing-puing jaman dahulu. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Agus Gotro:

“Sekarang ini di wilayah Trowulan sudah langka sekali terjadi penemuan barang-barang kuno dengan melalui penggalian-penggalian. Kemungkinan karena dahulu sudah banyak penggalian tanah untuk pembuatan batu bata atau untuk bangunan rumah. Selain itu para pengepul di desa sudah jeli dan berpengalaman”.

Terkait dengan tenaga kerja, tidak hanya dari desanya saja, melainkan ada yang berasal dari luar desa bahkan ada yang berasal dari luar kecamatan. Tenaga tersebut umumnya lulusan SMK, namun ada yang masih sekolah. Upah tenaga kerja, dahulu secara harian dengan memberi makan, minum kopi manis, dan rokok satu bungkus. Sekarang ini upah tenaganya secara lepas. Maksudnya tidak ada makan, rokok dan yang ada hanya air putih. Sebagai pengganti makan dan rokok, setiap pekerja ditambah uang Rp 10.000/hari. Tenaga kerja yang digunakan ada yang harian dan ada yang borongan. Tenaga borongan, pekerjaannya membakar tanah liat, sekali bakar ongkosnya Rp 100.000, diberi makan, minum, dan sebungkus rokok. Tenaga bakar bila tidak membakar kerajinan, penggajiannya secara harian seperti lainnya. Menurut Agus Gotro, tenaga bakar ini membutuhkan extra tenaga, misalnya waktunya istirahat tetap berada di tungku sampai proses itu selesai.

Untuk menjaga eksistensi usaha kuningannya Agus Gotro selalu menjaga kualitas dan tepat waktu apalagi bila bekerja sama dengan pengusaha asing. Maka dari itu setiap barang yang dihasilkan langsung diseleksi terus dikemas secepatnya dikirim kepada pemesannya. Berhubung pemesan umumnya langganan tetap, maka pelunasan biasanya menunggu barang tersebut jadi sekalian membayar ongkos kirimnya. Pembayaran menggunakan berbagai cara, dahulu dengan pos wesel, umumnya sekarang mengirim transfer ke tabungan, atau melalui cek.

Saat ini usaha Agus Gotro berjalan lancar. Peningkat usaha, menurut Agus Gotro tidak berdasarkan jumlah, tetapi berdasarkan kualitas barang dan jenisnya. Langganan Agus Gotro adalah *artshop-artshop* yang ada di Bali, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan Jakarta dan umumnya memesan patung, seperti Patung Budha, Syiwa, dan sejenisnya yang harganya termasuk tinggi. Berhubung langganannya berada di luar kota, maka Agus Gotro jarang berada di rumah. Ia berkeliling secara bergantian dari kota satu ke kota lainnya. *Artshop* yang sering dikunjungi adalah yang berada di Bali. Bagi Agus Gotro, ia lebih senang mendatangi sekalian membawa barang pesanan yang sudah jadi dan sekalian melakukan penawaran model-model yang lain.

2. Haryadi: menengok masa lalu

Dahulu maestronya pengrajin kuningan Bejjong adalah bernama Sabar (ayah dari

Haryadi). Di antara anak-anaknya Sabar yang sampai sekarang masih menekuni kerajinan kuningan tinggal Haryadi. Saudara-saudaranya ada yang bertani dan menjadi pegawai. Menurut Haryadi dari dahulu yang rajin membantu usaha Sabar hanya Haryadi yang lainnya juga membantu bekerja tetapi kurang tekun. Ketekunannya itu menjadikan sekarang Haryadi sering diundang untuk membuat patung keluar daerah.

Haryadi merekrut tenaga harian dipilih orang-orang yang tekun dan teliti. Mereka ini setiap hari bekerja sesuai dengan jobnya, ada yang membuat desain, memproses, mengelas. Tenaga tersebut berasal dari desanya yang datang pagi hari sekitar pukul 07.30 WIB langsung sarapan dan minum. Setelah itu bekerja sesuai *jobnya*, sekitar pukul 10.00 WIB istirahat sebentar untuk merokok karena setiap pekerja diberi jatah rokok satu bungkus.

Selama menjadi pengusaha seni atau pematung, Haryadi Jarang sekali bepergian keluar daerah, untuk memasarkan barang-barang produksinya. Ia membuat kerajinan sesuai jumlah pesanan, sehingga di rumah tidak dijumpai barang-barang kreasinya. Biasanya pemesan datang ke rumahnya dengan membawa gambar yang dikehendaki. Sekarang ini karena jamannya sudah maju, pemesan dapat menelpon atau melalui SMS dan melalui internet. Setelah gambar tersebut dipelajari dan terjadi kesepakatan harga dan waktu, barulah pemesan mengirimkan uang sesuai kesepakatan. Uang muka atau *verskot* tersebut biasanya ditransfer melalui bank minimal sebanyak 60% dari harga yang disepakati. Menurut Haryadi apabila pemesanan batal, Haryadi tidak banyak merugi karena ada ganti rugi pembelian bahan dan ongkos tenaga, namun selama ini belum pernah mengalami pembatalan pesanan.

Bagi Haryadi, sebagai seorang pengusaha kerajinan itu harus bisa menjaga kualitas dan kuantitas produksinya. Dengan cara ini pelanggan tidak akan lari mencari tempat yang baru. Langganan Haryadi Kebanyakan perkantoran pemerintahan yang karyanya dapat dilihat atau dinikmati masyarakat. Karya-karya tersebut ada yang di dalam negeri maupun luar negeri di antaranya: Jakarta, Ubud Bali, Menado, Singapura, dan Darwin Australia. Dengan kepercayaan itulah ia menjalankan tugasnya dengan baik. Patung yang dipesan pada umumnya besar dan membutuhkan pemasangan di tempat, maka banyak membutuhkan tenaga untuk pemasangan. Tenaga yang direkrut dipilih yang berpengalaman supaya hasilnya tertata dengan rapi dan bagus.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada waktu itu dari tahun ketahun kondisi ekonomi wilayah Bejjong belum menampakkan keunggulannya, namun setelah Mbah Sabar merintis dan memelopori pembuatan cor logam dan perunggu mulailah ada kemajuan. Kerajinan kuningan mulai banyak diminati orang terutama dari luar negeri. Setelah usaha itu berjalan baik dan menjanjikan, akhirnya warga sekitar mengikuti jejak Mbah Sabar, sehingga dapat mengubah Desa Bejjong menjadi desa industri kuningan. Bahkan sekarang ini kerajinan kuningan menjadi ikonnya Kabupaten Mojokerto.

Pada umumnya kerajinan kuningan di Bejjong bahan bakunya berasal dari rongsokan kuningan yang diperoleh dari pengepul di daerah setempat dan bahkan ada yang dari desanya sendiri. Mereka ini dapat membeli secara langsung, juga ada yang membayarnya belakangan sesuai dengan perjanjian. Dalam proses produksi, pada bagian tertentu ada yang menggunakan teknologi sederhana dan ada yang menggunakan teknologi modern atau menggunakan mesin.

Kerajinan kuningan Bejjong orientasinya adalah ekspor dengan pangsa pasar utama

adalah Eropa antara lain Belgia, Belanda, Jerman, dan Australia. Maka dari itu ketika Negara Eropa terjadi krisis, maka para perajin Bejjong yang ikut menanggung imbasnya. Lain halnya dengan yang mengalami krisis adalah Indonesia, yaitu ketika terjadi krisis moneter tahun 1998, kemudian adanya kejadian bom di Bali, justru perajin Bejjong dapat menikmati hasilnya karena hasilnya dihargai tinggi.

Kerajinan kuningan Bejjong pasarannya adalah di *artshop-artshop*, seperti di Bali, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Solo. Pebeli kerajinan dari luar negeri sudah umumnya membeli di *artshop*. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, dewasa ini beberapa penggemar kuningan dapat mengakses sendiri ke perajinnya. Dalam hal ini pemesan tinggal mengirim gambar beserta ukurannya sekalian menstransfer uang muka dan tanggal yang disepakati barang telah terkirim. Kecuali kalau ada barang-barang yang sifatnya rahasia atau khusus terpaksa pengusaha itu melakukan pertemuan di Bali atau di *artshop* yang ditentukan.

Di Bejjong umumnya tenaga kerja kuningan masih muda-muda dan kebanyakan dari mereka adalah lulusan atau tamatan SMK. Mereka ini umumnya sebagai buruh harian dengan diberi tambahan makan dan minum sehari 2 kali, yaitu makan pagi, makan siang, ditambah minum teh, kopi, dan sebungkus rokok. Namun dengan adanya kondisi keuangan yang tidak menentu, dewasa ini sudah ada pengusaha yang menggunakan tenaga harian lepas dan ada juga yang borongan.

B. Saran

1. Perlu menjaga kualitas barang agar tetap eksis dan diminati pelanggan. Mengingat psang surutnya usaha ini tinggi karena bekerjasama dengan pihak luar.
2. Hendaknya pengusaha dapat menjaga nama dengan cara tetap menjaga kepercayaan, ketepatan waktu, dan menjaga kualitas barang sesuai dengan pesanan. Dengan cara ini dapat meningkatkan daya tarik konsumen dan menjaga persaingan yang semakin ketat.
3. Perlu adanya kerjasama dengan sesama pengusaha, sehingga kalau ada kekurangan barang bisa teratasi dan perlu adanya koperasi usaha bersama.
4. Menjaga hubungan antara majikan dengan pekerja selalu terjaga dengan baik.
5. Kepada pemerintah yang menangani cagar budaya, hendaknya lebih jeli dan apabila terjadi penemuan benda cagar budaya langsung tanggap untuk mensikapinya dengan pengantian yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, 1990/1991.“Tinjauan Etniarkeologis Fungsi Peralatan dari Tembaga dalam Rumah Tangga Jawa”*Laporan Penelitian*, Yogyakarta; Fakultas sastra UGM.
- Hardyastuti, S dan Bambang, H., 1991. Pekerja Wanita Pada Industri Rumah Tangga Sandang di Provinsi DIY; Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Haryadi dkk.,1998. Tahap Perkembangan Usaha Kecil, Bandung; AKATIGA.
- Herawati, I., 2002 a.“Potret Usaha Tenun Tradisional Pedan”, *Patra-Widya* Vol. 3 No. 1, Maret. Yogyakarta; Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- , 2002 b.“Prospek Kerajinan Agel di Desa Salamrejo, Kulon Progo”, *Patra Widya* Vol.3 No. 4, Desember, Yogyakarta; Badan pengembangan kebudayaan dan Pariwisata.
- , 2012.“Industri Mebel Rumah Tangga di Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan Jawa Timur”, *Patrawidya* Vol. 13 No. 2, Juni. Yogyakarta ; Balai pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

- Kompas,2012. “Perajin Cor Kuningan dan Perunggu Bangkit”, *Kompas* Kilas Ekonomi halaman 14.
- _____, 2013. “Usaha Kerajinan Bejjong, Denyut Nadi Perajin Cor Kuningan dan Perunggu”, *Kompas* Nusantara 8 Mei; halaman 37.
- Koentjaraningrat, 1990. Sejarah Teori Antropologi II, Jakarta: UI Press.
- Marjanto, D. K., 2010. “Pengembangan Strategi Industri Budaya Kerajinan Batu Alam di Kabupaten Gunung Kidul”, *Patrawidya* Vol. 11. No. 1. Maret. Yogyakarta; Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Mojokerto blog. Com/2012/05/11. Kerajinan-Kuningan Lokal Mojokerto. Diunduh tanggal 11 mei 2012.
- Raharjana, T. D., 2003.“Siasat usaha Kaum Santri : Ekonomi Moral dan Rasional Dalam Usaha Konfeksi di Mlangi, Yogyakarta”, dalam *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa* Penyunting Heddy Shri Ahimsa Putra. Yogyakarta: Kepel Press.
- Raharjo, Dawam, 1976. “Peranan Industri Kecil Dalam Pembangunan Ekonomi”, *Prisma* 5 (12); Jakarta: LP3ES.
- Sadoko, I., dkk., 1995. Pengembangan Usaha Kecil: pemihakan Setengah Hati, Bandung: AKATIGA.
- Sarmini, 2003. “Politik Usaha Pengusaha Islam: Kiat manipulative Dalam Industri penyamakan Kulit di Magetan, Jawa Timur”, dalam *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa* penyunting Heddy Shri Ahimsa putra Yogyakarta Kepel Press.
- Saleh, I. A., 1986. *Industri Kecil: Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, Jakarta: LP3ES.
- Sumardi, 2000.“Peranan Industri Keramik Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panjangrejo kecamatan Pundong Kabupaten Bantul”, *Patra-Widya* Vol. I . No. 3 September; Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sumijati, dkk., 2001. Jawa Tengah: Sebuah Potret Warisan Budaya, Yogyakarta; Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jateng dan jurusan Arkeologi FIB UGM.
- Sumintarsih, 2003.“Siasat Resiprositas dan Usaha Kerajinan Agel di Kulon Progo”, dalam *Ekonomi Moral Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di jawa* Penyunting Heddy Shri Ahimsa Putra. Yogyakarta: Kepel Press.

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Penddkan	Pekerjaan	Alamat
1	Agus Gotro	37 th	SMK	Pengusaha	Jl. Candi Brahu
2	Wawan	37 th	SLTA	Pengusaha	Bejjong
3	Jonet	25th	SLTA	Buruh	Trowulan
4	Sukarno	25 th	SMK	Buruh	Bejjong
5	Haryadi	55 th	SMK	Pengusaha	Jl. Candi Brahu

SAAT ORANG JAWA MEMBERI NAMA; STUDI NAMA DI TAHUN 1950-2000

Moordiati

Departemen Ilmu Sejarah FIB Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286
Diati_gf@yahoo.com

Abstrak

Memilih dan memberi nama tidak lagi dianggap sebagai sebuah persoalan besar, pada akhirnya banyak nama yang justru tidak dikenal dan terdengar asing. Padahal pemilihan dan pemberian nama seseorang sebenarnya juga mengandung maksud dan makna tertentu sesuai dengan harapan orang tua. Dengan kata lain bahwa "nama adalah doa". Ini juga yang menjadi alasan serta tujuan dari artikel ini untuk melihat perubahan makna pada pemberian nama di dalam kebudayaan masyarakat Jawa terutama ketika masa periode awal kemerdekaan (1950) sampai dengan tahun 2000an. Ada perkembangan serta perubahan yang menarik dari sumber sementara yang ada, bahwa nama-nama anak dari etnis Jawa akan semakin panjang dan tidak familiar di dengar (bahkan semakin kompleks dan kehilangan kejawaannya). Inilah yang menjadi pertanyaan besar dari artikel ini mengapa terjadi perubahan dalam pemilihan serta pemberian nama pada anak di dalam kebudayaan masyarakat Jawa Jombang? Kedua, Faktor apa saja yang mempengaruhi alasan terjadinya perubahan pemilihan serta pemberian nama dalam masyarakat Jawa di Jombang?. Tidak sebagaimana model metode sejarah selama ini, maka metode yang dilakukan dalam hal ini adalah melalui pengumpulan sample data siswa dari sekolah dasar dan sekolah menengah salah satu daerah di Jawa Timur, yakni Jombang untuk mendiagnosa dan mengklasifikasikan perubahan yang terjadi dari periode satu ke periode berikutnya, sekaligus juga sebagai bahan perbandingan. Akhirnya bahwa sejarah intelektual orang Jawa dapat disusun meski bersandar pada "sekedar" daftar nama. Ada perubahan besar dalam masyarakat di Jombang terutama mengenai pemilihan dan pemberian nama pada anak mereka. Nama yang dipilih dan diberikan (digunakan) bukan lagi berdasarkan atas doa dan makna dari nama tersebut, namun pemilihan serta pemberian nama lebih didasarkan pada model apa yang berkembang saat itu. Inilah yang menjadi alasan tidak banyak lagi dijumpai nama-nama yang identik dengan kejawaannya.

Kata Kunci: nama, masyarakat Jawa, perubahan sosial

WHEN THE JAVANESE CHOOSE THE NAME: STUDY NAME YEAR 1950-2000

Abstract

Choosing and naming is no longer regarded as a major problem, in the end many names that actually unknown and foreign sounding. Though the elections and the naming of someone actually have the intent and specific meaning in accordance with the expectations of parents. In other words, that "the name is a prayer". This is also why the reason and the purpose of this article to see the changes of meaning in the naming in the culture of the Java community, especially when the period of the early period of independence (1950) until the 2000s. The developments as well as interesting change from the source while there, that the names of the children of ethnic Java will become longer and unfamiliar at the hearing (even more complex and losing his Javanese). Not as a model for this method of history, through the collection of data sample of students from primary schools and one secondary school in East Java region, namely Jombang to diagnose and classify the changes from one period to the next period, as well as a comparison. Finally that the intellectual history of the Javanese can be arranged even rely on "just" a list of names, although it still requires improvement, both in terms of methodology and preparation needs to get serious attention from historians that the picture of the human past into a more whole and humanist.

Keywords: name, Java community, social changes, intellectual history

I. PENDAHULUAN

Apalah arti sebuah nama, Mungkin demikian kira-kira yang seringkali kita dengar saat kita menanyakan nama pada seseorang. Artinya bahwa urusan nama boleh jadi adalah satu hak

privat yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, namun bisa juga bahwa urusan nama menjadi tidak penting lagi dan dianggap hanya sebatas bagian identitas diri dari seseorang. Meski tak jarang bahwa pemberian nama pada seseorang juga diyakini memiliki arti yang dalam sebagai sebuah penggambaran atas diri seseorang. Nama akan selalu melekat dalam diri seseorang dari hidup sampai meninggalnya. Oleh karena itu salah satu hal yang tidak boleh sembarangan dilakukan oleh orang tua adalah pemberian nama kepada anak mereka. Pada masa lalu, orang Jawa pada umumnya tidak tahu pasti mengenai upacara pemberian nama. Kebanyakan keluarga memberikan nama kepada seorang bayi yang baru lahir pada saat dia dilahirkan, yang disertai dengan suatu upacara *slametan brokohan*. Ada keluarga yang menganggapnya sebagai upacara untuk merayakan kelahiran bayi saja, dan bukan sebagai upacara pemberian nama, karena nama diberikan secara otomatis (Koentjaraningrat; 1994).

Keluarga-keluarga santri mengadakan upacara pemberian nama pada hari ketujuh sejak bayi dilahirkan, dengan suatu upacara berkorban *aqiqoh* atau *kekah* menurut lidah orang Jawa, yang disertai dengan pemberian daging korban kepada para tetangga dan fakir miskin. Orang-orang Jawa pada masa anak-anak selalu dipanggil dengan nama panggilannya (julukan), yang sering berubah selama dia masih anak-anak. Nama baru menjadi penting apabila dia menjadi dewasa, dan karena itu dalam keluarga petani upacara pemberian nama baru kepada orang yang telah menjadi dewasa merupakan peristiwa penting (Koentjaraningrat; 1994). Pada umumnya, adat-istiadat mengenai jenis nama yang diberikan kepada seorang anak, tergantung pada tingkat sosial orang tuanya. Orang Jawa mengetahui nama-nama apa saja yang tidak layak diberikan kepada anaknya. Seorang petani misalnya, tidak akan memberikan nama yang berakhiran dengan *kusuma*, *-tanaya*, atau *ningrat*. Nama-nama seperti itu hanya pantas untuk orang-orang dari golongan bangsawan atau priyayi. Seorang petani tidak akan merasa nyaman untuk memberikan nama seperti itu kepada anaknya, tidak hanya sekedar takut ditertawakan orang sekampungnya, tetapi juga ada semacam keyakinan bahwa nama semacam itu akan membawa sial bagi yang memakai, karena "terlalu berat" baginya (Poensen; 1870) atau "*kabotenjeneng*".

Keluarga-keluarga petani biasanya memberi nama yang singkat saja kepada bayi yang baru lahir, yang seringkali merujuk pada hari kelahiran bayi tersebut. Dengan demikian sering kita jumpai nama-nama seperti Ponimin, Poniyah, Poniym atau juga Legimin, Legiyah, Legiyem yang merujuk pada nama hari-hari di Jawa (Pon, Kliwon, Legi dan Paing). Kecuali itu nama-nama yang mempunyai makna tertentu juga sering diberikan kepada anak-anak keluarga petani seperti Bejo, Slamet, Sariyem dan sebagainya (Hatley;1977). Dalam golongan yang lebih tinggi dijumpai nama-nama yang diambil dari cerita-cerita wayang atau dari kesusasteraan Jawa, seperti Sukarno, Suroto, Suhadi, Sriyati, Lestari, atau Kartini. Sedangkan keluarga-keluarga petani santri seringkali mengadopsi nama-nama dari bahasa Arab, seperti Durrahman, Alip, Kusin, Aminah dan sebagainya. Namun saat ini, setidak-tidaknya bila melihat dalam 20 tahun terakhir, angin perubahan tampak sekali terjadi dalam komunitas etnis Jawa ketika memberikan nama untuk anak mereka. Banyak dari nama-nama khas Jawa semakin "keren" dan familiar di telinga atau bahkan semakin sulit dikenali kejawaannya.

Pada masa lalu orang-orang etnis Jawa mudah dikenali dari nama yang melekat pada mereka. Nama tampak sederhana dengan hanya satu suku kata atau dua suku kata, dengan akhiran konsonan "so, to, no, wo" dan sebagainya untuk laki-laki, Akhiran "si, ti, ni" dan sebagainya untuk perempuan. Sekarang keluarga-keluarga masa kini semakin menghindari nama-nama yang berbau "kampung" seperti Ponimin, Bejo, Leginem, legiman atau Jumingan untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Singkatnya, nama orang Jawa saat ini adalah dari Siti menjadi Sherly, dari Jatmiko menjadi Mikho. Wajib disebut sebenarnya adalah Hatley yang telah melakukan riset mendalam tentang nama-nama Jawa dan arti sosialnya

(Hatley, 1977). Hatley menelusuri model-model nama etnis Jawa dan maknanya, kemudian mencari asal-usulnya. Menarik dari temuan Hatley adalah nama-nama etnis Jawa setidaknya disebut ; (1) nama-nama *Jawa asli*, yang berasal dari nama-nama Malayo-Polinesia. Misalnya Bejo, Ponimin, Wagiyem, Poniman dan sebagainya yang terkesan berbau "dusun". (2) Nama-nama *Jawa biasa*, yaitu nama-nama yang diambil dari mitologi Jawa yang biasanya berasal dari nama-nama Sanskerta, Misalnya; Sukarno, Suroto dan sebagainya yang diambil dari mitologi pewayangan. (3) *Nama-nama Jawa baru* adalah nama-nama yang diilhami oleh peristiwa-peristiwa penting baik di dalam negeri maupun dari luar, misalnya; Irianto dan Merdekawati yang diilhami oleh pembebasan Irian Jaya dan sebagainya. (4) *Nama-nama Jawa panjang* adalah nama-nama kreasi baru yang biasanya diambil dari nama-nama Sanskerta atau kata-kata Jawa yang indah yang dalam kombinasinya tidak kedengaran terlalu bersifat Jawa, melainkan lebih bersifat nasional, misalnya Rini Safitri atau Mitra Kartika.

Ada perubahan evolutif yang tanpa disadari sebenarnya telah terjadi dalam masyarakat Jawa berkenaan dengan persoalan nama, terutama perubahan selera ketika memilih maupun memberi nama pada anak. Urusan nama pada akhirnya tidak lagi mengenal batas-batas wilayah serta status ataupun keadaan seseorang. Ini pula mengapa yang menjadi alasan untuk mengetahui serta mempertanyakan bagaimana sebenarnya orang atau masyarakat Jawa memberi nama? Dan bagaimana perubahan-perubahan jenis serta selera nama etnis Jawa sepanjang tahun 1950 hingga tahun 2000? Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan nama serta selera nama dalam kurun waktu tersebut?. Jombang menjadi pilihan wilayah yang menarik untuk melihat bagaimana sebenarnya perubahan nama dimulai. Selain dikenal dengan sebutan "kota Santri", Jombang secara akronim juga dapat disebut menjadi representasi atas budaya agamis atau santri (*Ijo*) serta kaum kejawen atau abangan (*abang*). Kemajemukan budaya ini secara tak sengaja juga telah banyak membentuk persepsi penduduk di Jombang dalam menentukan serta memilih selera nama diri. Dengan memanfaatkan sumber yakni daftar register nama anak pada dua lembaga sekolah SD dan MI (*Madarasah Ibtidaiyah*) *Bustanul Ulum* dan *Miftahul Huda* di salah satu desa di Jombang tidak hanya akan memberi petunjuk serta bukti bagaimana sebenarnya perubahan dalam pemilihan serta penggunaan nama anak selama tahun 1950 hingga tahun 2000an. Namun menjadi bagian penting pula untuk memberi tempat dan "suara" terhadap sumber-sumber sejarah yang selama ini belum pernah digunakan dalam proses rekonstruksi masa lalu, termasuk dalam hal ini adalah daftar register anak ataupun sumber yang tersimpan dalam kantor catatan sipil.

II. DARI TIMUR KE BARAT: MODE NAMA "WONG JOWO"

Bukan suatu hal yang sulit sebenarnya untuk menentukan memilih serta menggunakan suatu nama diri. Namun akan menjadi persoalan jika kemudian nama menjadi sesuatu yang tidak umum atau tidak wajar dalam suatu kalangan masyarakat tertentu. Semisal akan menjadi sangat sulit sekarang untuk menemukan nama sederhana seperti Urip, Slamet Sugeng, Puguh, Waras, Duwur, Rebut, Bejo atau kuncung, Cowek, Lawung, Tales, Galah dalam masyarakat Jawa. Padahal nama-nama ini sebelumnya juga menjadi "mode" dimasanya. Tak jarang malah ada suatu kebanggaan bila menggunakan nama diatas, selain mudah dingat, dengan menggunakan nama diatas akan menjadi berbeda dengan yang lainnya. (Ron Hatley, 1977). Nama ini yang sebenarnya mengidentikkan sebagai nama yang benar-benar "Jawa Asli". Menjadi berbeda ketika nama harus berubah menjadi Karno, Harto, Pomo, Wiro, Bekti, dan Marto. Ataupun kemudian tiba-tiba menjadi Santosa, Waluyo, Sasmito, Prayoga, dan Sejati. Meski masih terkesan Jawa, namun sudah tidak banyak orang atau anak yang menggunakan nama-nama ini. Ini bisa dibuktikan dari sumber primer yang ada di daftar register nama-nama siswa baik di tingkat SD / MI maupun SMP di Jombang sepanjang tahun 1950 hingga 2000.

Pemilihan sumber semata-mata dengan asumsi bahwa kedua sekolah diatas merupakan sekolah yang telah lama berdiri dan kemungkinan data atau sumber mengenai nama akan banyak tersedia. Pertimbangan ini menjadi penting pula untuk mengetahui apakah ada perubahan pemikiran dan pengetahuan orang Jawa di Jombang dalam memberikan nama untuk anak mereka melalui register nomor induk siswa yang diambil dari kedua sekolah ini, yakni sekolah umum (SD) maupun sekolah agama MI (*Madarasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum dan Miftahul Huda*) di Kecamatan Sumobito yang berdiri dalam periode yang sama 1965 dan 1968. Ada dugaan jika mungkin ada perbedaan dalam penggunaan nama anak dalam kedua lembaga sekolah yang berbeda ini, meski keduanya berada dalam suasana pedesaan yang relatif homogen dari sisi etnis dengan mata pencaharian mayoritas sebagai petani dan buruh tani. Hanya sedikit orang tua sebagai pegawai negeri, perangkat desa atau *pamong*, pedagang dan profesi yang lain. Perubahan mode diharapkan akan terlihat dengan jelas dari mengelompokkan serta mengklasifikasikan nama-nama anak yang berada di dalam dua lembaga sekolah yang berbeda. Daftar yang ada kemudian dibagi berdasarkan anak yang lahir pada tahun 1960 hingga 2004. Ada 1846 siswa yang lahir pada tahun 1960-an hingga 2004. Jumlah ini meliputi atau terdiri dari 253 siswa yang lahir pada tahun 1960, 528 anak yang lahir pada tahun 1970-an, serta 490 anak yang lahir pada tahun 1980. Sementara ada 467 anak yang lahir pada tahun 1990 dan 158 anak yang lahir pada tahun 1980-an sebanyak 490 orang, tahun 1990-an sebanyak 467 siswa dan tahun 2000-an 158 siswa. Keseluruhan jumlah ini yang kemudian disusun untuk melihat “mode” nama yang digunakan mulai tahun 1950 hingga tahun 2000. (lihat di dalam tabel 1)

Tabel I. Jumlah kata yang dipakai pada nama siswa MI di Kec.Sumobito
(N = 1846, presentase dijumlahkan ke samping)

Thn Kelahiran	1 kata / %	2 kata / %	3 kata / %	4 kata / %
1950-an	-	-		
1960-an	186/73,5 %	66/26 %	1/0,4 %	0/0 %
1970-an	339/64,2 %	171/32,4%	13/2,46%	5/0,95%
1980-an	203/41,5 %	259/52,9%	25/5,1%	3/0,62%
1990-an	45/9,6 %	275/58,9%	124/26,6%	23/4,4 %
2000-an	8/5,1 %	56/35,4%	79/50 %	15/9,5 %

Sumber:Diolah dari Data Register anak SD Tedjo dan SD Gambiran Kecamatan Sumobito-Jombang, dalam Moordiati, 2009, *Wong Jowo Ilang Jawane; Studi Nama Orang Jawa 1950-2000, Laporan Penelitian DIPA Fakultas FIB Universitas Airlangga Surabaya.*

Sebagai pembanding dari data siswa-siswi MI di Sumobito, hal yang sama (pengelompokan serta pengklasifikasian) nama anak juga dilakukan pada anak yang sekolah di SDN Tejo (awalnya adalah Sekolah Rakjat) dan SDN Gambiran di Kecamatan Mojoagung. Data diambil dengan menelusuri buku induk dan ditemukan sebanyak 2458 siswa dengan rentang waktu kelahiran tahun 1950-an sampai tahun 2004. Tahun 1950-an berjumlah 187 siswa, 1960-an sebanyak 264 siswa, 1970-an sebanyak 391 siswa, 1980-an sebanyak 524 siswa, 1990 berjumlah 638 siswa dan tahun 2000-an 454 siswa.

Di dapat kondisi yang hampir sama dengan data tabel 1, mula-mula nama pendek dan sederhana banyak ditemukan pada tahun 1950-an (81,9%), kemudian menurun dengan landai seiring perkembangan zaman. Penurunan yang paling mencolok terjadi antara tahun 1980-an ke 1990-an (dari 38,9% menjadi 7,6%). Nama dengan susunan dua kata perkembangannya relative landai, sedangkan nama dengan susunan lebih panjang (3 kata) terjadi kenaikan yang tajam antara tahun 1980-an (7,8%) dan 1990-an (40,5%). Sedangkan nama anak yang disusun

dari dua kata relative konstan sejak tahun 1970-an. Kesimpulan umum dari dua tabel tersebut adalah adanya banyak persamaan baik dari sekolah umum (SD) maupun sekolah yang berbasis agama (MI). Perkembangan nama-nama orang Jawa akan semakin panjang secara samar-samar terlihat mulai tahun 1980-an, akan tetapi kenaikan yang cukup mencolok terjadi dari tahun 1980-an ke 1990-an. Menarik digaris bawahi adalah semakin kaburnya batas-batas antara nama-nama “dusun” dan nama-nama “kota”, sejak tahun 1990-an dan (terutama) tahun 2000-an sehingga ini membuat tidak lagi dengan mudah untuk mengenali dari kelas sosial mana seseorang berasal meski hanya dari namanya.

III. MEMILIH MENJADI TIDAK JAWA: PERUBAHAN NAMAANAK

Pada era kolonial Belanda, tahun 1925 ada aturan untuk mencatatkan nama anak pada kantor *Burgelijke Stand* atau semacam kantor catatan sipil yang mewajibkan mencantumkan nama kaum. (Poensen; 1870) Namun aturan itu di kemudian hari juga tidak memberikan efek budaya yang meluas, dalam artian tidak menjadi aturan adat dalam budaya Jawa untuk memakai nama famili (nama kaum) dalam nama. Meskipun sebenarnya nama-nama orang Jawa mudah untuk diidentifikasi karena bersifat khas seperti keterangan pada bagian awal. Perkembangannya kemudian adalah bahwa nama-nama orang Jawa justru semakin kompleks dan terkadang sulit dikenali “kejawaannya” seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pemikiran yang didapatkan. Kasus pada salah satu desa (dusun) di Kecamatan Sumobito Jombang mungkin bisa dikatakan sebagai bukti bahwa banyak nama anak yang tidak lagi bisa masuk kategori untuk disebut sebagai “nama anak Jawa”. Padahal bila dilihat dari asal usul mereka adalah berasal dari keluarga yang homogen baik secara etnis yakni Jawa maupun dalam mata pencarian yang mayoritas sebagai petani dan buruh tani, sedikit orang sebagai pegawai negeri, perangkat desa ataupun *pamong*, pedagang dan profesi yang lainnya.

Sekalipun demikian, entah mengapa nampaknya tidak mengurangi keinginan dalam memilih serta menggunakan “nama baru” bahkan berusaha untuk menghindari pemberian serta pemilihan nama yang sederhana dan “berbau dusun”. Bila pada tahun 1950an, nama-nama sederhana atau yang menggunakan satu suku kata masih banyak atau menjadi mayoritas (73,5%), lihat table 1 namun mulai semenjak tahun 1960an hingga tahun 2000an, penggunaan nama-nama sederhana dan pendek menjadi berkurang. Nama-nama anak orang Jawa pada akhirnya mewujud menjadi Ardiansyah, Febriawan, Noviana, Ambarwati, Linda, dan hanya ada tiga (3) nama biasa yang mengambil dari istilah atau kata Arab (Mustaqim, Rochim dan Rohmatulloh).¹ Tampak sekali bahwa orang Jawa semakin “alergi” dengan nama-nama yang “kampungan” dan mungkin menjadi alasan bila pada akhirnya nama orang Jawa semakin panjang. Beberapa nama bahkan sudah disusun atau terdiri dari empat (4) suku kata atau lebih sehingga lebih enak didengar dan terlihat wah. Perlu dicatat adalah bahwa pada tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an semakin panjang nama berkorelasi positif dengan tingkat kemapanan ekonomi, pendidikan dan pekerjaan orang tua. Indikator hal ini dapat dilihat dari kolom daftar nama siswa, nama orang tua dan pekerjaan orang tua yang terdapat pada buku induk sekolah. Sebagai contoh nama-nama siswa MI yang lahir tahun 1960-an; Minah, Poniti dan Kastar adalah anak dari Kasan, Munaji dan Gimana yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Bandingkan dengan nama-nama Sofiani Mulyanah (Putri Sikin seorang kepala desa) atau Misbachul Munir (putra Sampuri karyawan pabrik gula).(Moordiati; 2009)

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan nama-nama siswa/anak yang lahir tahun 1990-an dan (terutama) tahun 2000-an. Panjang pendek nama sudah tidak dapat dijadikan

¹ Angka prosentase ini diolah dari hasil mengenai jumlah kata yang digunakan dalam nama siswa MI (*Madrasah Ibtidaiyah*) Kecamatan Sumobito-Jombang selama tahun 1950 hingga 2000, dalam Moordiati, *wong Jowo ilang jawane, Studi Nama Orang Jawa 1950-2000*, (Laporan Penelitian FIB Unair, 2009), hlm.31.

sebagai indikator dari kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan orang tua dan pekerjaan. Pada masa ini *Zietgeist* atau jiwa zaman sudah berbeda, nama sudah tidak dapat dijadikan acuan untuk mengenali seorang anak dan apa latar belakangnya. Kita dengan mudah menemukan mode nama-nama seperti; Hanna Dwi Aprilia (Putri Makinun / kuli bangunan), ada juga nama Oxzal Yulian Gaudi Putra Zainul (kuli bangunan/buruh serabutan) atau nama Yolanda Camelia anak Sunarto (buruh pabrik), mode nama-nama itu lazim digunakan pada anak yang lahir tahun 1990-an dan 2000-an. Hal serupa juga ditemukan dalam daftar buku induk nama siswa yang ada di lembaga SD. Bila pada tahun 1950 masih banyak ditemukan nama-nama pendek dan sederhana, namun perlahan-lahan kecenderungan penggunaan nama pendek dan sederhana mengalami penurunan, bahkan terlihat sangat mencolok ketika pada tahun 1980 (38,9%) menjadi 7,6% pada tahun 1990. Nama dengan susunan dua kata perkembangannya relative landai, sedangkan nama dengan susunan lebih panjang (3 kata) terjadi kenaikan yang tajam antara tahun 1980-an (7,8%) dan 1990-an (40,5%). Sedangkan nama anak yang disusun dari dua kata relative konstan sejak tahun 1970-an. (Moordiati; 2009).

Ada banyak persamaan baik dari sekolah umum (SD) maupun sekolah yang berbasis agama (MI). Perkembangan nama-nama orang Jawa akan semakin panjang secara samar-samar terlihat mulai tahun 1980-an, akan tetapi kenaikan yang cukup mencolok terjadi dari tahun 1980-an ke 1990-an. Menarik untuk digaris bawahi adalah semakin kaburnya batas-batas antara nama-nama “dusun” dan nama-nama “kota”, sejak tahun 1990-an dan (terutama) tahun 2000-an juga tidak dapat mengenali dari kelas sosial mana seseorang berasal jika dilihat dari namanya.

IV. METAMORFOSIS NAMA-NAMA ORANG JAWA

Tradisi pemberian nama yang berlaku dalam pranata adat Jawa berbeda dengan suku bangsa lain di Indonesia. Namun seiring dengan berjalananya waktu ada perubahan yang dinamis sesuai dengan jiwa jamannya. Pada jaman Hindu, antara abad ke 5 sampai abad ke 11 nama-nama orang Jawa yang digunakan adalah yang berbau agama Hindu. Pada masa ini kebanyakan nama-nama orang Jawa yang kita ketahui adalah nama-nama pemegang kekuasaan dan orang-orang disekitar istana, sesuai dengan yang terekam dalam prasasti dan karya sastra Jawa kuno. Pada masa ini ada gejala budaya *awatara* (nitis atau inkarnasi) dalam tradisi pemberian nama orang Jawa.

Pada masa Mataram Hindu, nama-nama orang Jawa lebih dikenal dengan nama-nama pribadi, contohnya Purnawarman, Sanjaya, Warak, Garung, Pikatan dan sebagainya. Perkembangan berbeda ditunjukkan pada masa Kahuripan dan Kadiri yang terjadi mulai adanya perubahan, ciri-ciri Hinduisme mulai berkurang dan terjadi proses budaya *Jawanisasi*. Pemakaian lambang-lambang alam (totemisme) ataupun nama hewan digunakan sebagai bagian dari nama. Kita akan menemukan nama-nama Kebo Ijo, Kala Gemet, Gagak Rimang, Gagak Pranala, Candra Kirana, Lembu Amiluhur, Kleting Kuning dan yang sangat terkenal Gajah Mada, dan sebagainya. Mulai saat inilah nama pribadi atau setidak-tidaknya nama kecil (*asma timur*) mulai digunakan dalam pranata adat Jawa. (Hatley;1977).

Setelah mengamati perkembangan nama-nama orang Jawa yang terlihat menarik dari sisi historis dengan memperlihatkan proses yang panjang, sekarang akan kita kemukakan bentuk-bentuk nama pada awal-awal tahun 1950-an dan tahun 1960-an berdasarkan buku induk di tiga kecamatan Mojoagung, Sumobito dan Mojowarno. Ciri-ciri umum nama orang Jawa kebanyakan masih terlihat sederhana (kecuali golongan priyayi dan terdidik dengan jumlah yang sedikit). Nama-nama kebanyakan masih sulit diketahui artinya dengan pasti, akan tetapi

banyak nama-nama anak yang mengadopsi (mengambil) nama-nama hari (dan pasaran hari), bulan, tahun, wuku, windu atau terkadang juga dari nama alat-alat perkakas dan binatang tertentu. Nama-nama yang mengacu “hari” dan “pasaran hari”, misalnya: Ngaat (berasal dari kata Ahad (Arab) atau Minggu) Senen, Lasa (dari Selasa), Rebo, Kemis, Djemuwah (Jum'at), Setu (Sabtu), Legi (Legiman, Legisah, Leginah, Legimah dan lain-lain), Soma (Senen), Pon, dalam nama anak berbentuk Poniti, Poniman, Ponimah, Ponisah dan lain-lain. Wage, dalam nama anak kadang berupa Wagini, waginiem, wagisah, wagiman dan lain-lain. Legi, dalam nama anak menjadi Legiman, Legisah, Legini dan lain-lain. Paing, Kliwon. Nama-nama yang mengacu pada bulan misalnya: Sura, Sapar, Redjeb, Ruwah, Sijam (dari kata Arab *siam* atau bulan puasa), Bada (bakda), Riadi atau Riaja (1 Syawal), Syawal dan sebagainya.

Nama-nama yang menggunakan nama-nama tahun, windu, Wuku dan dewi, misalnya: Alip, Djimawal, Djimakir (Tahun Jawa), Adi, Kuntara dan Sengara (Windu), Tambir dan Gumbreg (wuku), dan Pretiwi, Ratih, Sri, Parwati (Dewi). Nama-nama yang mengadopsi nama-nama binatang, mengacu pada barang ataupun kondisi ragawi misalnya: Kantjil, Gudel (anak kerbau), Kampret (anak kelelawar), Trinil (nama sejenis burung) dan lain-lain. Nama yang mengingatkan nama barang: Tompo (bakul dari bambo yang kecil), Sogol, Tumbu (bakul yang lebih besar), Tjowek, Genuk, Bawuk, dan Dugel dan sebagainya. Pada tahun-tahun itu juga banyak nama-nama yang mengambil dari kata-kata Arab, namun dalam bentuk yang sederhana dan umumnya singkat. Terkadang juga diolah dalam lidah orang Jawa sehingga seolah-olah menjadi khas Jawa. Nama-nama itu misalnya; Djenal (maksudnya Zainal), Duki, Durakeman (sebenarnya Abdurrahman), Kolsum (Chulsum) dan sebagainya. Menarik bila pada masa ini nama-nama orang Jawa banyak yang berawalan su-, sa-, se-, so-, tampak awalan su- amat digemari oleh orang Jawa yang memiliki makna baik. Dari penelusuran buku induk jumlah anak yang berawalan dengan su-, sa-, se- dan so- (terutama yang berawalan dengan su-) sangat banyak.

Perkembangan selanjutnya pada tahun-tahun 1970-an dan 1980-an pada nama-nama orang Jawa adalah nama menjadi lebih panjang umumnya terdiri dari 2 kata, kalaupun terdiri hanya satu kata, nama itu paling tidak merupakan susunan tiga suku kata atau lebih. Misalnya: Munawaroh, Sugiono, Hartono dan sebagainya. Dari sumber yang ada tentang jumlah kata dalam nama terlihat dengan jelas bahwa pada masa ini nama anak-anak orang Jawa menjadi lebih panjang, terutama ketika memasuki tahun 1980-an. Hal ini memperlihatkan perkembangan pemikiran dan pengetahuan manusia Jawa, setidak-tidaknya dilihat dari nama yang digunakan pada anak mereka. Memasuki era tahun 1990-an dan 2000-an terlihat semakin jelas semakin panjangnya nama anak-anak orang Jawa. Bentuk nama semakin berkembang dengan mengadopsi berbagai sumber untuk diganti menjadi nama baru. Kalau pada tahun-tahun 1950-an dan 1960-an banyak ditemukan nama-nama yang mengacu hari dan pasarnya, bulan, tahun, windu, wuku, nama binatang tertentu dan alat-alat perkakas, dapat dipastikan kebiasaan itu sudah ditinggalkan, terutama nama hari dan pasarnya, juga nama binatang tertentu dan alat-alat perkakas. Nama-nama yang masih dipakai biasanya dimodifikasi dengan bentuk-bentuk yang lain, misalnya yang mengadopsi bulan Masehi, anak yang lahir bulan November akan muncul modifikasi Noviana atau Novi, Februari menjadi Febrian, atau Febrianti, Febrisyah atau Febriana, Agustus menjadi Agustadi atau Agus saja. Demikian juga untuk Juni dan Juli menjadi Juniwati dan Juliana atau Julian, dan masih banyak variasi yang dapat dibentuk menjadi nama yang enak didengar dan “keren”. Menjadi menarik ketika juga mulai banyak ditemukan nama-nama siswa yang menggunakan horoskop atau perbintangan Barat untuk digunakan menjadi bagian dari nama, misalnya Leo, Virgo dan Aries. Ketiga horoskop perbintangan itu paling umum dipakai, Leo biasa dipakai anak yang lahir antara 23 Juli - 22 Agustus, Virgo lahir antara 23 Agustus- 22 September dan Aries lahir 21 Maret - 19 April. Hal menarik lain yang tetap konstan dipakai menjadi bagian dari nama orang

Jawa sejak tahun 1950-an adalah sistem penomeran sanskerta (eka/eko, dwi, tri, catur, panca dan seterusnya). Sistem penomoran itu tetap ditemukan sampai sekarang dengan frekuensi yang berbeda-beda.

V.PENUTUP

A. Kesimpulan

Urusan nama seringkali masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Tak heran bila dalam pemilihan ataupun pemberian nama pada seseorang atau anak tidak lagi berdasar pada “arti/makna” yang terkandung di dalam nama (*behind in the name*). Padahal seringkali di dalam nama ada doa. Namun dalam perkembangannya, tidak banyak lagi nama-nama yang dimaksud, sekalipun dalam kehidupan masyarakat Jawa. Banyak nama yang telah mengalami perubahan terutama semenjak adanya babak kedua dalam proses ”modernisasi” di Indonesia (1950-sekarang). Ini pula yang mungkin juga dialami oleh sebagian besar pada nama anak di sebuah desa/dusun di salah satu kecamatan di Jombang sepanjang 1950-2000. Pemberian serta penggunaan nama anak sudah banyak yang meninggalkan nama-nama yang “berbau jawa/tradisional” dan beralih ke nama-nama yang lebih modern, lebih enak didengar serta lebih wah. Hal yang demikian tidak lagi hanya bisa disebut sebagai korelasi dengan persoalan tingkat kemapanan ekonomi, pendidikan serta pekerjaan orang tua. Banyak “nama anak baru” yang merupakan anak dari seorang kuli/buruh bangunan, buruh serabutan ataupun buruh pabrik. Besar kemungkinan bila perubahan ini juga sebagai “campur tangan” dari perkembangan keberadaan berbagai media informasi, terutama munculnya televisi-televi swasta sepanjang tahun 1980an hingga 1990an yang tak langsung telah mengubah *mindset* orang Jawa terutama orang Jawa yang tinggal di desa mengenai nama. Meski keindahan ataupun kemoderen nama seringkali tanpa disadari juga telah menghapus arti atau makna akan nama itu sendiri. Nama bukan lagi doa, namun nama adalah citra.

B.Saran

Belum ada peraturan atau undang-undang yang resmi untuk mengatur mengenai pemilihan maupun pemberian nama pada seseorang. Inilah mengapa yang menjadi alasan nama-nama seseorang menjadi seringkali cepat berubah dan berganti karena hanya satu alasan tertentu saja. Tidak saja akan membingungkan, namun pemilihan dan pemberian nama yang “tidak baku” secara administratif juga akan menyulitkan. Meski nama adalah milik individu, namun ada baiknya bila nama juga bisa menjadi bagian dari masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Damar S. P., 2010, “*Nandur Jeneng, Panen Jenang*” dalam *Solopos* edisi 4 Februari.
- Geertz, H., 1961, *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*. New York: The Free Press of Glencoe.
- Hadiwidjana, R. D. S., 1968. *Nama-nama Indonesia*. Yogyakarta; Spring.
- Hatley, R., 1983. “Mapping Cultural Regions of Java”, dalam *Other Javas Away From the Kraton*. Monash University.
- _____, 1977. *What's in a name. Arti Social Seperti Terlihat dalam Nama dan Perubahan Laziman (Mode) Nama di Jawa*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kartodirdjo, S., 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat, 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

- _____, 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lombard, D., 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia 2*. Jakarta: Gramedia.
- _____, 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia.
- Moordiati, 2009. *Wong Jowo Ilang Jawane; Studi Nama Orang Jawa 1950-2000*, *Laporan Penelitian DIPA Fakultas FIB Universitas Airlangga Surabaya*.
- Mursidi. N., 2008. “Ritus Kelahiran Barokahan”, dalam majalah *Hidayah blogspot*. Edisi 78.
- Pemberton, J., 2003. “*Jawa*”. Yogyakarta: MataBangsa.
- Poensen, C., 1870. “Iets over Javaansche Naamgeving en Eigennamen”. Dalam: *Mededeelingen Vanwege het Nederlandsche Zendeling Genootschap XIV*.
- Rustopo, 2007. *Menjadi Jawa, Orang-oang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Ombak,
- Singarimbun, M., 1989. “Metode dan Proses Penelitian” dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed.). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Sutirto, T. W., 2010.”*Ngemu Suraos Lebet*” dalam *Solopos* edisi 4 Februari
- Suryadinata, L., 2002. *Negara Dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Sumber Acuan Buku Induk Siswa

- Madarasah Ibtidaiyah (MI) Bustanul Ulum Mlaras Kec. Sumobito.
- Madarasah Ibtidaiyah Miftakhul (MI) Huda Kec. Sumobito.
- Sekolah Dasar Negri (SDN) Tejo dan Gambiran Kec. Mojoagung.
- Buku Induk SMP Negri I Mojoagung dari tahun 1965 sampai 2004.
- Buku Induk SD dan SMP Kristen YBPK (Yayasan Badan Pendidikan Kristen) Kec. Mojowarno dari tahun 1965 sampai tahun 2003.

STRATEGI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERKELANJUTAN

Su Ritohardoyo

Pengajar Program Studi Pembangunan Wilayah
Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.

e-mail: surito@ugm.ac.id
Kontak: 081393253333

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mengungkap pembangunan rumah susun sebagai salah satu strategi pembangunan perumahan berkelanjutan, dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Metode analisis data sekunder digunakan untuk analisis secara deskriptif kualitatif dari berbagai sumber pustaka dan dokumen. Hasil bahasan menunjukkan bahwa pembangunan rumah susun merupakan solusi penyediaan perumahan rakyat yang saat ini paling rasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dikaji dari berbagai aspek baik penggunaan lahan, pembiayaan, maupun keberlanjutan lingkungan, rumah susun memberikan alternatif terhadap pembangunan perumahan dan permukiman yang adil, nyaman, dan berkelanjutan.

Kata kunci: straregi, rumah susun, MBR, dan berkelanjutan

FLAT SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY

Abstract

The article was purposed to discusse of the development of vertical residential for the sustainable of housing development and its impact to the housing development policy for the low income people. Secondary data analysis method used to analyze the data which were collected from literature and several documents. The result of the discussion showed that vertical residential development is the solution of people housing supply, which the most rational for low income people. Based on the several aspects whether it is land use, cost and environment sustainability, vertical residential gives several alternatives to housing and settlement developments which are fair, leisure, and sustainable.

Keywords: strategy, vertical residential, low income people, sustainable

I. PENDAHULUAN

Filosofi atau konsep *Hamemayu Hayuning Bawana*, yang dimaknai sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dan keberlanjutan kehidupan di dunia ini, merupakan sebuah kearifan lokal yang mempunyai perspektif global (Anshory dan Sudarsono, 2008). Pemaknaan melindungi, memelihara, membina keselamatan dan keberlanjutan pembangunan, perlu diartikulasikan ke dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang, yang berorientasi pada beberapa usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat pada saat ini, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Berkenaan dengan hal di atas, tema telaah ini secara substansial berupaya mendorong terwujudnya strategi pembangunan perumahan dan permukiman, terutama rumah susun yang berkelanjutan, yang mengungkap, merangkum, dan mengagaskan pembangunan dan pengembangan rumah susun, sebagai salah satu strategi pembangunan dan pengembangan yang berkelanjutan, atas dasar tinjauan geografis. Tinjauan geografis perumahan berdasarkan pada aspek keruangan dan kewaktuan, masih belum atau kurang diminati khalayak. Harapannya, apa yang diungkap ini dapat menjadi perhatian para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan para cerdik cendekia yang membantu menyusun kebijakan

dan rencana pembangunan serta pengelolaan perumahan dan permukiman.

Pilihan tema di atas dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, istilah perumahan dan permukiman sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena manusia memang telah, sedang, dan akan hidup menyatu di dalamnya. Namun demikian, ketika perumahan dan permukiman harus ditelaah dan dikaji untuk menyusun kebijakan, mengatur, dan mengendalikan perkembangannya, maka kenyataan yang dihadapi bahwa perumahan dan permukiman bukan hal yang sederhana (Kuswartojo, dkk., 2005). Kerumitan dan kepelikan terkait dengan pembangunan dan perkembangan yang sangat kompleks, bahkan apa dan bagaimana, serta cara mewujudkannya menjadi perdebatan berkepanjangan.

Kedua, ketika wacana tentang kebutuhan beralih ke hak, perumahan dan kawasan permukiman dikategorikan sebagai hak dasar manusia, yang harus dipenuhi atas perlindungan tanggungjawab negara (Yudohusodo, 1994; Kantor Sekneg. RI., 2011). Namun demikian realitas menunjukkan bahwa perumahan dan permukiman lebih banyak dibicarakan sebagai barang atau komoditas perdagangan (iklan dan reklame tentang perumahan dan permukiman, lebih banyak menonjolkan gaya dan bentuk bagunan rumah, lokasi dan lingkungan, lebih mendominasi isi halaman dan acara media masa). Masalah kerumitan mengatur proses terwujudnya perumahan dan permukiman, dampak, serta kaitannya dengan lingkungan sosial ekonomi dan budaya, telah tersisih dari pembicaraan.

Ketiga, dalam berbagai wacana, pembangunan tentang perumahan dan permukiman telah dinyatakan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Butters (2005) menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah bagi setiap keluarga (*shelter for all*) dan pengembangan perumahan yang berkelanjutan (*sustainable housing development*) sudah menjadi agenda global, yang harus diwujudkan oleh setiap negara. Persoalan lain yang sangat mendasar, adalah pemenuhan kebutuhan rumah yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini juga menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan di dunia, seperti dicanangkan pada Pertemuan Komisi Pembangunan Berkelanjutan Sesi 1 2, pada tanggal 14-30 April 2004 di New York.

Keempat, perwujudan pembangunan perumahan permukiman berkelanjutan, tidak dapat dilepaskan dari pembangunan wilayah secara keseluruhan, apalagi jika dikaitkan dengan ketersediaan lahan yang merupakan sumberdaya tidak terbarukan. Munasinghe (1993) mengemukakan bahwa tiga pilar konsep pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang mempertimbangkan secara seimbang tiga dimensi yaitu ekologi dan atau lingkungan, ekonomi, dan sosial. Konsep tersebut dapat diturunkan kedalam tiga indikator utama, yakni (a) ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH); (b) tingkat keterjangkauan masyarakat untuk menyewa atau membeli hunian; dan (c) respon positif masyarakat tentang hunian yang diminati.

Kelima, kekurangan tempat tinggal (*backlog*) di Indonesia sejumlah 7,6 juta unit pada tahun 2014, dan target terbangunnya 5 juta unit perumahan pada tahun 2019 (BAPPENAS, 2014), perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari kita semua. Inilah beberapa hal yang mendasari pemilihan tema penulisan makalah ini.

II. URGensi KAJIAN GEOGRAFI PERMUKIMAN DAN KONTESTASI RUANG UNTUK PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Dalam pengertian yang paling sederhana dan dalam waktu tertentu, setiap manusia di manapun di dunia, membutuhkan tempat berlindung ataupun tempat tinggal sebagai tempat kediaman, baik dalam arti perumahan maupun permukiman (Hammond, 1985). Dalam

kaitannya dengan kajian permukiman secara geografis, Hudson (1970) memberikan batasan Geografi Permukiman sebagai ilmu yang mengkaji interaksi antara permukiman (baik bentuk, lokasi, pola, agihan, maupun perubahannya), dengan unsur-unsur geografis lainnya (relief, geologi, tanah, iklim dan cuaca, interaksi sosial, dan kondisi ekonomi, politis, keamanan, dan kebudayaan), baik dalam konteks global, regional, maupun konteks lokal.

Berdasarkan pada aspek perkembangan permukiman secara hirarkhis, Roberts (1996) menjelaskan permukiman mulai dari *Farmstead*, *Hamlet*, *Village*, *Town*, *City*, *Large City* (*Metropolis*), *Millionaire City*, hingga *Megapolis*. Konsep permukiman dijelaskan mulai dari tahapan paling sederhana yakni kompleks peternakan (*farmstead*) hingga megapolitan yang begitu kompleks. Namun demikian untuk menemukan istilah yang tepat dalam menjelaskan suatu kenampakan fisik permukiman memang tidak mudah. Permukiman di berbagai negara sangat beragam karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor fisik wilayah, faktor budaya, dan faktor ekonomi.

Dalam kajian Geografi Permukiman secara umum fokus perhatiannya pada bentukan *artificial*, yang dapat dibedakan menjadi permukiman perkotaan, permukiman peralihan desa-kota, dan permukiman perdesaan. Sebagai langkah untuk dapat menyederhanakan konsep geografi yang luas, digunakan tiga pendekatan utama yang meliputi pendekatan keruangan (*spatial approach*), pendekatan ekologis (*ecological approach*), serta pendekatan kompleks kewilayahan (*regional complex approach*) (Yunus, 2007). Analisis menggunakan pendekatan geografi ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap perkembangan permukiman sebagai bentuk ekspresi perkembangan wilayah.

Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman mengandung banyak permasalahan, secara keruangan (*spatial*) maupun kewaktuan (*temporal*) terkait dengan keragaman wilayah dan keragaman dinamika penghuninya. Betapa rumitnya permasalahan permukiman, secara temporal berakibat pada belum tuntasnya upaya pemecahan salah satu masalah permukiman, telah disusul oleh masalah permukiman yang lain. Oleh karena itu sangat wajar jika pemerintah baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah permukiman (Yunus, 1989; Ritohardoyo, 2000; Kantor Sekneg. RI, 2011).

Salah satu masalah permukiman adalah terjadinya kontestasi ruang untuk permukiman. Secara teoritis, manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan ruang untuk melakukan segala aktivitas demi mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan ruang, khususnya untuk hunian semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, pada hal ketersediaan ruang terbatas, dan termasuk sumberdaya yang tidak terbarukan. Kebutuhan ruang untuk akomodasi kebutuhan hunian penduduk yang semakin tinggi, mengakibatkan kontestasi lahan atau perebutan lahan.

Kontestasi merupakan istilah yang dapat dimaknai sebagai suatu perjuangan untuk mencapai keunggulan dalam kompetisi. Munck (2007) memaknai kontestasi sebagai kompetisi atau pertukaran dalam arena pasar bebas, yakni terkait dengan ideologi dan sumberdaya. Lahan sebagai suatu bentuk sumberdaya merupakan komoditas yang strategis untuk menjadi objek perebutan. Kontestasi lahan secara umum dapat dimaknai sebagai proses pertukaran atau perebutan lahan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam kerangka pasar bebas. Lefebvre (1991) dan Haughton & Counsel (2004) menjelaskan makna kontestasi lahan mengarah pada keterlibatan subjek lahan yang memiliki kepentingan terhadap proses perencanaan dan pengembangan wilayah.

Kontestasi lahan tidak hanya dimaknai sebagai perebutan lahan antar penduduk sebagai subjek lahan, namun dapat dimaknai sebagai perebutan antar objek lahan atau jenis

pemanfaatan lahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menunjukkan kontestasi pemanfaatan lahan dari sudut pandang penataan ruang yakni pemanfaatan budidaya dan pemanfaatan lindung. Sutaryono (2013) mengemukakan bahwa RTRW sebagai dokumen hukum resmi yang menunjukkan adanya kontestasi lahan. Proses penyusunan arahan kawasan budidaya maupun lindung tidak lepas dari keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan.

Muta'ali (2013) mengemukakan bahwa perebutan lahan untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya memunculkan problema tataruang. Permasalahan yang jamak terjadi akibat perebutan ruang untuk fungsi budidaya dan fungsi lindung adalah meningkatnya frekuensi dan jumlah bencana alam. Selain itu kontestasi lahan ini juga berakibat pada degradasi lingkungan, semakin banyaknya lahan kritis, pencemaran lingkungan, rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau, dan dalam konteks yang lebih luas mengakibatkan pemanasan global. Keseimbangan antara pemanfaatan lahan untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya merupakan syarat terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan (UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Kebutuhan ruang untuk perumahan dan permukiman sebagai representasi dari perkembangan wilayah mendesak eksistensi lahan pertanian. Tentu saja hal ini menunjukkan adanya kontestasi lahan antar wilayah. Perkembangan permukiman hingga ke kawasan perdesaan saat ini membawa dampak terhadap berkurangnya lahan pertanian, pada hal diketahui bahwa Indonesia masih merupakan negara agraris. Perubahan kondisi permukiman perdesaan tidak hanya dimaknai sebagai perubahan dominasi pemanfaatan lahan, namun juga perubahan kondisi sosial ekonomi dan budaya. Rapoport (1969) menjelaskan bahwa lingkungan harus mencerminkan kekuatan sosiokultural, yaitu kepercayaan, struktur keluarga dan organisasi sosial, mata pencarian, serta hubungan sosial.

Chapin dan Kaiser (1979) mendefinisikan fungsi ruang menjadi empat (4) klas: pertama, ruang memiliki fungsi sebagai tempat kerja dimaknai sebagai ruang produktif bagi manusia untuk mendayagunakan sumberdaya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Petani menggunakan lahan sawah sebagai ruang produksi, berfungsi sebagai tempat bekerja membudidayakan tanaman pertanian.

Kedua, fungsi ruang sebagai tempat tinggal dapat digambarkan dari ruang permukiman tempat tumbuh dan berkembangnya manusia. Rumah memiliki definisi sebagai bangunan sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Ruang sebagai tempat tinggal juga bermakna sebagai sarana untuk bersosialisasi dan hidup bermasyarakat membina hubungan sosial dengan sesamanya.

Ketiga, ruang sebagai fungsi sarana pelayanan dan fasilitas umum untuk mendukung kehidupan penduduk. Fasilitas pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi merupakan ruang yang bermakna memberikan pelayanan secara spesifik bagi penduduknya. Sebagai contoh, sekolah merupakan ruang bagi penduduk untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan, begitu juga dengan rumah sakit sebagai sarana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasar adalah ruang bagi penjual dan pembeli melakukan aktivitasnya dan dapat dimaknai sebagai dua fungsi, fungsi lokasi bekerja bagi pedagang dan fungsi pelayanan bagi pembeli.

Keempat, ruang sebagai penyeimbang dan perlindungan kelestarian ekosistem. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai penyeimbang dan perlindungan kelestarian permukiman sebagai ekosistem. Maknanya, bahwa pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan fasilitas pendukung eksistensi permukiman, sudah seharusnya mempertimbangkan keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

III. ISU DAN PERMASALAHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI INDONESIA

Beberapa isu dan permasalahan perumahan dan permukiman yang dijumpai pada masa lalu hingga kini, berkaitan dengan permasalahan: (a) pemenuhan kebutuhan perumahan; (b) keterbatasan lahan; (c) pemunggiran masyarakat lokal; (d) degradasi lingkungan akibat pembangunan perumahan; (e) keterbatasan pembiayaan; dan (f) ketidakjelasan kelembagaan yang menangani.

Kebutuhan perumahan dan permukiman merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara di dunia, namun demikian permasalahan perumahan dan permukiman paling banyak ada di negara-negara berkembang. Permukiman kumuh, permukiman illegal, hingga banyaknya tunawisma, menjadi fenomena yang mudah ditemui di beberapa negara sedang berkembang khususnya di Benua Afrika dan Asia termasuk Indonesia. Jumlah antara penyediaan rumah atau rumah yang dibangun pemerintah, apabila dibandingkan dengan kebutuhan rumah memiliki selisih yang besar. Pacione (2009) menyebutkan bahwa kegagalan program pemerintah untuk menyediakan perumahan yang terjangkau bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah mendorong mereka untuk memilih alternatif mendirikan perumahan informal. Tindakan ini didasari kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli perumahan formal yang ada di pasaran.

Drakakis-Smith (1981) mengklasifikasikan perumahan informal menjadi perumahan kumuh (*slum*) dan perumahan illegal (*squatter*). Perumahan kumuh dapat dikatakan sebagai bangunan-bangunan rumah yang memiliki kualitas buruk karena proses pengkumuhan, atau di dalam beberapa kasus material bangunan rumah terdiri dari bahan yang tidak permanen. Penekanan istilah rumah kumuh adalah pada kondisi fisik rumah dan lingkungan rumah yang dibawah standar layak huni. Permukiman dengan kepadatan yang tinggi atau berkembangnya permukiman informal di perkotaan ini, memunculkan permasalahan baru dan menambah beban masalah kebutuhan perumahan.

Pemerintah Indonesia sudah menyelenggarakan Kongres Perumahan Rakyat sejak tahun 1950, Lokakarya Perumahan Nasional pada tahun 1973, 1992, dan 2002, dan terakhir Kongres Perumahan Rakyat 2009. Namun demikian ternyata belum mampu menjawab permasalahan kebutuhan perumahan bagi penduduk (Kusno, 2012). Kongres maupun lokakarya yang diselenggarakan merupakan landasan dalam perumusan kebijakan perumahan rakyat ternyata belum menunjukkan hasil yang kongkrit. Pada kenyataannya, berdasarkan data sensus tahun 2000 *backlog* atau kekurangan jumlah bangunan rumah bagi rumahtangga di Indonesia masih cukup besar. Jumlah rumahtangga berdasarkan sensus penduduk tercatat 52,008 juta, sedangkan jumlah rumah tinggal baru mencapai 49,303 juta (Kuswantojo, 2005). Data tersebut menunjukkan masih ada kurang-lebih 3 juta rumahtangga yang belum memiliki rumah tinggal.

Pada tahun 2008, dengan jumlah penduduk sekitar 225 juta jiwa yang terdiri dari 57 juta sebagai kepala keluarga, jumlah unit rumah di Indonesia hanya tercatat sebanyak 51 juta unit rumah. Angka ini menunjukkan bahwa kekurangan rumah (*backlog*) meningkat menjadi 6 juta unit rumah (Dimyati, tt). Pada tahun 2014, kekurangan tempat tinggal (*backlog*) di Indonesia kembali meningkat menjadi 7,6 juta unit (BAPPENAS, 2014). Kecenderungan bertambahnya *backlog* perumahan ini perlu segera mendapatkan alternatif penyelesaian.

Persoalan *backlog* perumahan di negeri ini berkelindan dengan keterbatasan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan perumahan. Keterbatasan lahan dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai keterbatasan lahan secara fisik namun juga keterbatasan lahan dari sudut pandang penguasaan lahan. Keterbatasan lahan secara fisik berkenaan dengan

terbatasnya lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pengembangan perumahan. Pengembangan perumahan di wilayah perkotaan sulit untuk direalisasikan karena sebagian besar lahan sudah dimanfaatkan secara intensif.

Sebagai contoh, Pemerintah DKI Jakarta menghadapi permasalahan ini ketika pada tahun 2006 mencoba mengimplementasikan pembangunan perumahan melalui program 1000 tower rumah susun di kota-kota besar di Indonesia (Kusno, 2012). Alhasil program tersebut mengalami stagnasi dan tidak berjalan dengan maksimal. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan wilayah perdesaan yang memiliki masalah ketersediaan lahan untuk perumahan. Fungsi utama wilayah perdesaan adalah sebagai produsen tanaman pangan, sehingga keberadaan lahan pertanian perlu mendapatkan perlindungan. Limbong (2014) berpendapat perubahan fungsi lahan pertanian karena proses pembangunan berpengaruh terhadap produksi pangan. Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus oleh individu, kelompok, atau bahkan pemerintah, menggiring berbagai kepentingan timbul pada satu bidang lahan. Sebagai contoh pemerintah memberikan izin bagi pengembang untuk mendirikan perumahan di lahan sawah pertanian yang produktif.

Keterbatasan lahan dalam arti pemilikan lahan juga menjadi permasalahan, baik dalam aras individu penduduk maupun pemerintah. Semakin terbatasnya lahan yang belum terbangun memberikan dampak yang signifikan pada kenaikan harga lahan (Yunus, 2008). Pemerintah selalu menghadapi permasalahan penyediaan lahan untuk pembangunan termasuk pengembangan perumahan karena biaya pengadaan lahan begitu besar. Limbong (2014) mengemukakan nilai ekonomi lahan yang begitu tinggi tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah pada masa orde baru yang mengedepankan pembangunan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan disokong kebijakan pengembangan infrastruktur terus memicu kenaikan harga lahan yang disusul sikap masyarakat yang berlomba-lomba menjual lahan atau menuntut ganti rugi. Lahan bukan lagi merupakan sumber produksi namun lebih dipandang sebagai aset pembangunan atau aset investasi. Kondisi inilah yang saat ini menjadi permasalahan karena peluang menguasai lahan lebih menguntungkan masyarakat kelas atas. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat mengakses lahan di pasar bebas yang begitu memihak dan menguntungkan para pemilik modal besar.

Pembangunan yang terfokus pada target melalui proyek pembangunan baru dan berorientasi pada pasar terbuka menciptakan kondisi yang marginal bagi masyarakat lokal. Marginalisasi dapat berupa peminggiran masyarakat lokal maupun potensi dan kearifan lokal suatu wilayah. Marginalisasi yang dapat diamati dengan cukup mudah adalah marginalisasi petani dan sektor pertanian. Petani merupakan contoh masyarakat lokal yang semakin termarginalkan dari segi penguasaan lahan maupun kondisi sosial ekonomi (Sutaryono, 2013). Sebagian besar petani di Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun diluar Pulau Jawa menguasai lahan kurang dari 0,5 Hektar. Kondisi ini mengakibatkan petani semakin miskin karena aktivitas ekonomi dibatasi oleh penguasaan lahan yang sempit. Maka tidak heran jika penduduk miskin di Indonesia lebih banyak di wilayah perdesaan daripada wilayah perkotaan, yakni 63,1% berbanding 36,9% (Heriawan, 2006 dalam Sutaryono 2013).

Berkenaan dengan kondisi lingkungan, ada kecenderungan pembangunan kompleks perumahan baru memberikan dampak negatif pada keberlanjutan lingkungan. Padahal setiap penduduk memiliki hak untuk tinggal di permukiman dengan kualitas lingkungan yang baik. Salah satu indikator lingkungan permukiman yang baik adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai dan sesuai dengan standar kebutuhan penduduk maupun wilayah. RTH memiliki fungsi ekologi sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara, pengatur iklim mikro, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyerap polutan, penahan angin dan

sebagainya. Pengembangan perumahan tapak atau *landed housing* memiliki andil yang besar terhadap kelangkaan lahan termasuk untuk penyediaan RTH. Fakta bahwa angka ketersediaan RTH di kota-kota besar di Indonesia belum memenuhi standar menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspek lingkungan. Luas RTH di beberapa kota di Indonesia saat ini tidak memenuhi kuota 30% dari luas wilayah sesuai standar UU Penataan Ruang. Luas RTH di beberapa kota di Indonesia pada tahun 1970an mencapai 35% dari luas wilayah, namun 30 tahun kemudian mengalami penurunan hingga hanya sekitar 10% (Kirmanto, 2005).

Pemenuhan kebutuhan perumahan merupakan tanggungjawab pemerintah. Namun demikian, mengingat keterbatasan biaya yang disediakan oleh pemerintah, maka hingga saat ini kekurangan pemenuhan kebutuhan perumahan semakin meningkat. Masyarakat tidak mampu menjangkau harga perumahan sedangkan subsidi perumahan tidak memadai. Sejarah menunjukkan bahwa pada era reformasi, subsidi pemerintah untuk perumahan ditiadakan sehubungan dengan krisis moneter yang melanda Indonesia. Terobosan baru muncul di awal pemerintahan SBY-JK dengan mengubah tradisi pembiayaan perumahan rakyat dari subsidi ke investasi. Pemerintah menggali potensi pendanaan dari investor dengan menjual paket surat tagihan KPR di pasar modal. Kebijakan ini cukup menjanjikan keberhasilan bagi pengembangan perumahan rakyat, hingga pemerintah mengeluarkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2010. Namun permasalahan kembali muncul karena pasar modal lebih dominan menguasai program perumahan rakyat. Skema pasar modal yang cenderung berorientasi pada keuntungan menunjukkan tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah dapat terlayani. Pembeli perumahan harus memenuhi syarat-syarat formal yang tidak dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat berpenghasilan rendah (Kusno, 2012). Tentu saja kondisi ini kembali menandai permasalahan kebijakan perumahan rakyat belum pro-rakyat khususnya dalam hal pembiayaan.

Berkaitan dengan kelembagaan yang menangani program perumahan rakyat, masih terdapat ketidakjelasan kewenangan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan masyarakat perlu berbagi peran dalam mewujudkan terealisasinya program perumahan bagi seluruh warga negara. Kegagalan selama ini dalam pengembangan perumahan rakyat, tidak lepas dari buruknya komunikasi antar *stakeholder*. Kebijakan nasional pengembangan 1000 *tower* yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2006, menunjukkan tidak adanya komunikasi yang baik antar *stakeholder*. Pemerintah mengambil langkah besar dengan menggelontorkan anggaran untuk subsidi senilai Rp 800 miliar pada tahun 2008 dan Rp 2,3 triliun pada tahun 2009. Semangat yang begitu besar dari pemerintah pusat tidak dapat dengan mudah diimbangi oleh pemerintah daerah. Pemda DKI Jakarta berada pada posisi dimelatis ketika harus menyediakan lahan yang begitu luas mengingat lahan yang sangat terbatas. Padahal tidak dapat dipungkiri bila Jakarta membutuhkan perumahan dalam jumlah yang banyak. Kesesuaian lokasi rumah susun dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang menjadi kendala berikutnya dan mengharuskan pemda menghentikan proyek pembangunan di beberapa lokasi (Kusno, 2012).

Para pengembang yang terlibat dalam program 1000 *tower* memiliki kepentingan bisnis di atas kepentingan untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dapat dilihat dari tindakan para pengembang yang menaikkan harga unit rumah susun dan mengubah desainnya menjadi apartemen kelas menengah. Harga yang ditawarkan pengembang tidak dapat dijangkau masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal pembangunan rumah susun, yang diharapkan mampu dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Program perumahan rakyat ini kemudian berakhir, ketika penyaluran kredit pembangunan rumah (KPR) sulit diperoleh. Dari 40.000 unit rumah susun yang terjual hanya 2.000 unit atau 5%-nya saja, yang diperoleh melalui mekanisme kredit (Kusno, 2012). Hal ini menunjukkan program 1000 *tower* salah sasaran.

IV. KONDISI EKSISTING PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI INDONESIA

Kenyamanan tempat tinggal merupakan tuntutan dasar yang harus dipenuhi semua orang. Kenyamanan merupakan komponen yang dapat merefleksikan secara langsung bagaimana tingkatan kualitas hidup masyarakat pada suatu wilayah. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dapat diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang sehat dan bersih (*good and healthy environment*) serta akses yang mudah dalam memperoleh kebutuhan hidupnya (*economic viability*). Maka dapat dikatakan bahwa kenyamanan merupakan puncak dari komponen-komponen pembentuk kualitas hidup itu merupakan salah satu arti dari kualitas hidup itu sendiri (Duxbury, 2000).

Fenomena permukiman yang terjadi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Wirymartono (1995) menilai bahwa permukiman memiliki tipe di antaranya: 1) Permukiman terencana (*Government owned*), dengan ciri layanan dan prasarana terencana secara baik dan dihuni oleh 10% masyarakat berpenghasilan tinggi, 2) Permukiman tua (*the Old forms/legal kampung*) ciri dibangun oleh masyarakat sendiri, bentuk permukiman adalah kampung yang merupakan karakteristik permukiman awal di Indonesia, dibangun berdasarkan swadaya mandiri oleh masyarakat, dan 3) Permukiman informal (*Squatter settlement*) yaitu permukiman dihuni masyarakat marginal, tanpa perencanaan dan tanpa pelayanan yang memadai. Karakteristik tersebut menurut Siswono (2004) dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: (1) letak geografis suatu permukiman; (2) perkembangan penduduk yang tinggi; (3) perangkat kelembagaan; (4) swadaya dan peranserta masyarakat; (5) kondisi sosial dan budaya; (6) kondisi ekonomi dan keterjangkauan masyarakat; (7) keterbatasan sarana dan prasarana; (8) kondisi pertanian; (9) ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai faktor tersebut ternyata sangat mempengaruhi pembangunan perumahan pada dua dekade terakhir. Program 1000 Tower pada masa pemerintahan SBY-JK yang dimulai pada tahun 2006 dan berakhir tahun 2010 dapat dikatakan mengalami kegagalan. Sementara tidak ada satupun kebijakan nyata di sektor perumahan rakyat setelah itu, pemerintah terus dituntut untuk segera menyediakan perumahan yang angkanya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan rumah tangga. Semakin banyak kebutuhan perumahan maka semakin besar pula pos anggaran pembiayaan yang harus dikeluarkan pemerintah. Kegagalan tersebut semakin tampak di akhir kepemimpinan SBY Budiono, ketika sektor perumahan bukan merupakan perhatian utama pemerintah. *Backlog* kebutuhan perumahan meningkat dua kali lipat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, menunjukkan mandegnya kebijakan perumahan yang pro-rakyat.

Harapan positif kembali muncul pada saat Jokowi JK terpilih sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Nawacita yang diusungnya secara eksplisit menyebutkan program rumah kampung deret dan rumah susun murah yang disubsidi. Harapan akan tersedianya perumahan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia kembali muncul. Skema pengembangan perumahan rakyat yang pro-rakyat yang dilandasi semangat keadilan dan pemerataan harus didukung oleh seluruh pemangku kebijakan. Pemerintah daerah, pengembang, sektor perbankan, dan masyarakat perlu menekankan tujuan bersama dalam mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan.

V. RUMAH SUSUN, ALTERNATIF STRATEGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERKELANJUTAN

Undang-undang tentang Rumah Susun nomor 20 tahun 2011 memberikan definisi, Rumah Susun sebagai bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan

yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Di sisi lain, secara tegas disebutkan bahwa penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk: (a) terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; (b) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan; (c) mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh; (d) mengarahkan pengembangan kawasan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif; (e) memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat, terutama bagi MBR; (f) memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan; (g) terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi MBR; dan (h) memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

Rumah susun berdasarkan tujuan pengembangannya dapat diklasifikasikan menjadi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial. Rumah susun umum diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus. Rumah susun negara merupakan upaya negara untuk menyediakan rumah bagi pegawai negeri atau untuk menunjang kinerja tugas pajabat. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk tujuan komersial. Kebutuhan pengembangan rumah susun yang mendesak untuk menjawab permasalahan kebutuhan rumah dan mengatasi permasalahan rumah kumuh adalah rumah susun umum. Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kebutuhan rumah perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Bagaimanapun kondisi pengembangan rumah susun saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah masih berharap besar pada pengembangan hunian vertikal, sebagai solusi untuk membangun kembali dan mengatasi permasalahan permukiman kumuh. Oleh karena itu ungkapan atau kritik tentang rumah susun tidak seharusnya menjadi kendala upaya pemerintah untuk mengembangkan rumah susun. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu solusi untuk dapat mengurai masalah perkotaan selain rumah kumuh, salah satu yakni kemacetan.

Kota-kota besar di Indonesia saat ini menghadapi permasalahan semrawutnya manajemen transportasi. Hal ini terjadi karena penduduk yang berkegiatan di pusat kota banyak yang tinggal di pinggiran maupun di luar wilayah perkotaan. Para penglaju atau *commuters* ini tentu memberikan andil yang besar terhadap kemacetan dan memberikan beban yang berat bagi sarana transportasi. Pengembangan rumah kumuh di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan dapat mengurangi jumlah penduduk yang melakukan mobilitas dari pusat kota ke pinggiran atau sebaliknya. Jarak yang dekat antara tempat tinggal dan tempat bekerja akan meringankan beban sarana dan prasarana transportasi, baik dari penggunaan armada maupun kepadatan jalur transportasi.

Pengembangan rumah susun dalam perkembangan wilayah merupakan salah satu strategi untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ketersediaan lahan perkotaan yang terbatas dan harga yang begitu tinggi menjadi kendala bagi rumah tangga kurang mampu untuk dapat mengakses rumah tinggal secara mandiri. Inisiasi penyediaan rumah susun yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni dan memiliki legalitas hukum yang lengkap. Keuntungan lain pengembangan rumah susun tentu saja terkait dengan efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Pengembangan lahan secara vertikal memiliki keuntungan terkait dengan pemanfaatan lahan dengan menekan koefisien dasar bangunan (KDB) namun dapat menampung lebih banyak jumlah penduduk. Pemanfaatan lahan dapat dilakukan lebih intensif untuk pengembangan fasilitas pelayanan maupun ruang terbuka hijau.

Pengembangan rumah susun di Indonesia tidaklah lepas dari kendala dan permasalahan yang meliputi aspek sosial masyarakat, aspek budaya, aspek pengelolaan, hingga aspek kebijakan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Program pengembangan rumah susun sesungguhnya merupakan jawaban ruwetnya penataan perkotaan pemerintah kota dan masalah penyediaan rumah oleh pemerintah pusat (Kusno,2012). Namun masalah rumah susun menjadi semakin rumit ketika pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak sinergi dalam menjalankan program.

Rumah susun sebagai pengganti rumah di permukiman kumuh, pada umumnya dianggap sebagai pengembangan atau perbaikan kampung. Rumah susun yang dibangun dengan semboyan “membangun tanpa menggusur” pada awal tahun 80 an, akhirnya menggusur juga, karena penghuni permukiman kumuh merasa tidak cocok tinggal di rumah susun. Hubungan kekerabatan dan aktivitas ekonomi informalnya tidak tepat bahkan tidak dapat ditempatkan di rumah susun. Mungkin karena pada awal pembangunan rancangan rumah susun kurang mempertimbangkan perilaku masyarakat di permukiman kumuh. Akhirnya rumah susun pengganti rumah kumuh menjadi barang diperjual-belikan hak penggunaannya, dan secara evolutif penghuni rumah susun beralih pada lapisan masyarakat lebih atas. Proses perubahan penghuni dan pengalihan hak ini terus terjadi di pembangunan rumah susun yang dimaksudkan sebagai pengganti permukiman kumuh.

Strategi pembangunan rumah susun secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui: (a) pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat dengan merealisasikan Program 1 juta rumah; (b) penyediaan lahan perumahan melalui mekanisme *land banking*; (c) libatkan masyarakat melalui pembangunan rumah partisipatif; (d) pembangunan perumahan diorientasikan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan; (e) menetapkan pembiayaan pembangunan perumahan secara murah dan terjangkau masyarakat; (f) berbagi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Agenda pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat melalui program 1 juta rumah perlu diimplementasikan dengan konsisten. Program kerja pada sektor perumahan rakyat yang tertuang dalam visi dan misi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi merupakan langkah yang sangat tepat dan strategis. Pengembangan kampung deret dan rumah susun bersubsidi menjadi jawaban permasalahan perumahan selama ini. Skema pengembangan rumah susun yang terjangkau dan berwawasan lingkungan menjadi syarat terwujudnya kualitas hidup masyarakat Indonesia. Agenda strategis tersebut kemudian tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dengan target peningkatan kualitas standar hidup 40 persen penduduk kelas bawah. Pengembangan perumahan yang terjangkau dan layak huni dalam lima tahun diharapkan mampu mengurangi *backlog* kebutuhan rumah hingga tersisa lima juta rumah saja pada tahun 2019. Tentu saja realisasi program ini harus ditindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang tepat dan operasional oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta didukung kejasama sektor perbankan, pengembang, dan masyarakat.

Pengembangan satu juta rumah merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan agar segera dapat mengurai permasalahan perumahan rakyat. Tentu dibutuhkan terobosan baru untuk dapat mengatasi mensukseskan program ini agar tidak hanya berakhir menjadi

sekedar janji politik saja. Hambatan yang mungkin dihadapi dari program ini tentu saja dan yang paling utama adalah ketersediaan lahan. Lahan sifatnya stagnan sedangkan masyarakat sebagai pemanfaat lahan cenderung terus meningkat baik jumlah maupun jenis kegiatannya. Strategi pengembangan rumah secara vertikal atau pengembangan rumah susun merupakan salah satu strategi optimalisasi lahan yang dapat menjadi pilhan bagi pemerintah. Meskipun ditemui berbagai masalah dan kegagalan dalam pengembangannya, namun hal tersebut tidak mengurangi fakta bahwa rumah susun sangat efektif untuk dapat menyediakan jumlah rumah yang banyak dengan memanfaatkan lahan yang lebih sempit. Optimalisasi lahan menjadi kebijakan yang dapat menjadi jawaban permasalahan wilayah, tidak hanya kekurangan rumah tempat tinggal, namun juga permukiman kumuh dan illegal, hingga konversi lahan pertanian di perdesaan.

Pemerintah daerah harus segera merencanakan lokasi-lokasi yang memenuhi syarat baik teknis maupun non teknis untuk pembangunan rumah susun dan dituangkan dalam rencana tata ruang (RDTR maupun RTRW). Alokasi lahan dalam tata ruang ini memang relevan untuk menjawab kebutuhan ruang untuk perumahan bagi penduduk untuk jangka waktu 20 tahun sesuai dengan masa berlaku dokumen tata ruang. Tercantumnya arahan lokasi untuk pengembangan rumah susun akan menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah. Amanat tata ruang ini juga tentu saja dapat menciptakan sinergitas dan meminimalisir konflik antar pemerintah dengan pemerintah pusat daerah dalam melakukan implementasi kebijakan.

Agenda penyediaan lahan melalui mekanisme *land banking* atau membentuk lembaga bank tanah merupakan salah satu solusi agar pembangunan perumahan rakyat atau rumah susun dapat segera direalisasikan. Pemenuhan kebutuhan lahan selama ini menjadi kendala utama pemerintah dalam upaya pembangunan perumahan rakyat. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih belum efektifnya atau bahkan belum adanya cadangan lahan yang dimiliki oleh pemda. Bank tanah merupakan suatu bentuk manajemen pertanahan yang menyediakan lahan untuk pembangunan dan manajemen wilayah. Mekanisme kerja bank tanah terbukti sukses untuk mendukung pembangunan perumahan dan mengendalikan perkembangan kota di berbagai negara seperti Belanda, Swedia, dan Perancis. Indonesia sebenarnya sudah menyadari pentingnya mekanisme bank tanah sejak tahun 1980an, dengan munculnya wacana untuk membentuk lembaga bank tanah namun memang hingga saat ini belum ada tanda-tanda nyata dari kebijakan ini (Limbong, 2014).

Bank tanah dapat dilakukan dengan menghimpun lahan dari masyarakat, lahan yang terlantar maupun lahan milik negara. Perolehan lahan dapat dilakukan melalui mekanisme pembiayaan secara mandiri oleh pemda, yakni pemda membeli lahan dari masyarakat menggunakan dana APBD. Pembelian lahan dapat dilakukan secara bertahap maupun langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun, pembiayaan bank tanah juga dapat dilakukan melalui kemitraan pemda dengan BUMD maupun swasta. Pembelian lahan ini diutamakan adalah pada lahan-lahan yang sudah direncanakan sebagai lokasi pengembangan perumahan dalam rencana tata ruang.

Lahan yang diakumulasi melalui bank tanah kemudian dapat disewakan atau diusahakan dengan pihak pengembang perumahan. Pemerintah mendapatkan keuntungan dari biaya jual beli pada transaksi perumahan, alokasi pajak keuntungan dari transaksi tanah, dan alokasi kenaikan tambahan dalam pajak properti. Keuntungan secara non ekonomis juga akan diterima oleh pemerintah seperti kemudahan dalam memperoleh lahan untuk pembangunan, pengendalian pasar lahan, mengendalikan monopoli lahan oleh pemilik modal, dan menciptakan keadilan sosial terkait penguasaan lahan. Rakyat dapat merasakan kehadiran negara ketika mereka mendapatkan hak-haknya sesuai amanat undang-undang dasar 1945 termasuk hak memperoleh tempat tinggal.

Agenda meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan pengembangan rumah susun. Masyarakat sebagai penerima manfaat dalam proses perencanaan hingga pengelolaan menjadi poin penting keberlanjutan program ini. Selama ini banyak cerita penolakan masyarakat untuk menempati rumah susun karena berbagai alasan, mulai dari lokasi rumah susun yang jauh dari tempat tinggal, sarana dan prasarana wilayah yang tidak memadai, hingga desain rumah susun yang kurang diminati. Permasalahan tersebut dapat diatasi jika masyarakat yang diproyeksikan akan menempati rumah susun dilibatkan sejak awal perencanaan.

Pembangunan rumah susun perlu memperhatikan jarak lokasi rumah susun dengan lokasi kegiatan penduduk seperti tempat bekerja, tempat bersekolah dan sebagainya. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk turut serta dalam mendesain kawasan kaitannya dengan desain kawasan dan kebutuhan sarana dan prasarana, seperti taman, RTH, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya. Pengembangan rumah susun juga harus tetap mengakomodasi interaksi sosial penghuninya. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengelolaan rumah susun dengan membentuk organisasi kemasyarakatan RT dan RW. Pengelolaan berbasis masyarakat ini diharapkan mampu menjawab permasalahan sosial terkait dengan keamanan lingkungan rumah susun, interaksi sosial antar penghuni maupun penyelewengan pemanfaatan rumah susun.

Aspek keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan wilayah menjadi agenda strategis yang tidak boleh ditinggalkan oleh pemerintah. Pembangunan perumahan di wilayah perkotaan menambah kepadatan permukiman perkotaan hingga melebihi daya dukung dan daya tampung. Kondisi ini dibuktikan dengan kondisi lingkungan yang tidak nyaman karena rendahnya proporsi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ketersediaan RTH yang memadai sesuai dengan standar merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Fakta bahwa penurunan luas RTH di kota-kota besar di Indonesia karena lajunya pemanfaatan lahan patut menjadi perhatian dalam pengembangan perumahan. Pengembangan perumahan secara vertikal melalui rumah susun menawarkan kelebihan dalam hal pemanfaatan lahan. Pengembangan rumah susun dengan satuan luas lahan atau koefisiesnd asar bangunan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan hunian tapak memberi peluang untuk menyediakan rumah lebih banyak namun tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan yakni ketersediaan RTH.

Pemerintah perlu segera menyiapkan mekanisme pembiayaan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagai sasaran utama penerima manfaat rumah susun. Konsumen rumah susun pada umumnya adalah kelas pekerja dan masyarakat yang bekerja di sektor informal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pemasaran rumah susun yang tepat sasaran dan tidak kembali dikuasai oleh kelompok kelas menengah ke atas seperti pada periode sebelumnya. Kredit jangka panjang merupakan salah satu kebijakan yang perlu diambil sebagai strategi pembiayaan. Pemerintah dapat memberlakukan kredit selama 20 tahun hingga 30 tahun, agar nominal angsuran dapat ditekan. Tentu saja hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan sektor perbankan.

Pemerintah perlu memberikan jaminan kepada semua pembeli rumah susun agar dapat terlayani oleh perbankan, melalui kredit perumahan tanpa agunan atau tanpa jaminan. Penjaminan secara kelompok atau biasa disebut jaminan sosial juga dapat diimplementasikan. Hal ini bertujuan agar rumah susun mudah diakses dan prosedur administratif tidak menjadi penghalang distribusi rumah susun.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaca dari kegagalan program pengembangan rumah susun pada periode yang lalu, pemerintah harus mengembalikan semangat program ini sebagai program yang strategis, bukan hanya kebijakan yang populis. Agenda yang harus segera diwujudkan adalah pembagian peran dan kewenangan bagi *stakeholder* yang terlibat. Pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta harus menyamakan visi dan misi terkait dengan semangat penyediaan perumahan rakyat. Keberhasilan program pengembangan perumahan memang sangat bergantung pada kerjasama antar *stakeholder*. Masing-masing pihak harus dapat melaksanakan kewajiban dan perannya masing-masing.

Pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan utama melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum memiliki kewajiban terkait dengan alokasi anggaran pembangunan perumahan rakyat dan rumah susun. Alokasi subsidi perumahan rakyat harus secara jelas dan sistematis mendapatkan pos penganggaran dalam APBN setiap tahunnya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk dapat menyediakan lahan yang sesuai untuk pengembangan rumah susun baik dari segi lokasi maupun luasan yang memadai. Penyediaan lahan untuk rumah susun diambil dari pencadangan lahan atau dapat dilakukan dengan mekanisme bank tanah daerah.

Stakeholder yang tidak kalah penting dalam pembangunan rumah susun adalah pihak *developer* atau pengembang. Pengembang dalam hal ini memiliki kepentingan ekonomis untuk dapat mengambil keuntungan dari pembangunan rumah susun. Jumlah kebutuhan rumah susun yang begitu besar tentu saja menjadi peluang bagi pengembang dan dapat menjadi ruang investasi yang menjanjikan. Konsumen rumah susun yang terutama adalah masyarakat berpenghasilan rendah memang menghendaki pembiayaan dan ringan dan berjangka panjang. Namun hal tersebut tidaklah mengurangi potensi investasi dari sektor rumah susun ini.

Sektor perbankan merupakan elemen penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan rumah susun, terutama terkait dengan pembiayaan dan penyaluran kredit pembangunan perumahan. Daya beli masyarakat yang rendah bukan menjadikan alasan bagi sektor perbankan untuk mengabaikan potensi keuangan pada program perumahan rakyat. Jumlah kebutuhan unit perumahan yang begitu besar menyimpan potensi yang besar disamping resiko yang besar pula. Perlu integrasi kebijakan pembiayaan antara pemerintah dan perbankan agar kredit yang dikucurkan memberikan kemudahan dan keterjangkauan bagi masyarakat.

Masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki peran yang sentral dalam keberhasilan program pengembangan rumah susun. Sisi positif rumah susun harus dikedepankan sebagai hunian yang tidak kalah baiknya dengan rumah tapak. Realitas lahan yang semakin langka dan harga yang tinggi perlu menjadi pertimbangan bahwa rumah susun merupakan solusi terbaik untuk pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan hingga pengelolaan rumah susun merupakan kunci terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis.

B. Saran

Rumah susun merupakan solusi penyediaan perumahan rakyat yang saat ini paling rasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dikaji dari berbagai aspek baik pemanfaatan lahan, pembiayaan, maupun keberlanjutan lingkungan, rumah susun memberikan penawaran terhadap pembangunan perumahan yang adil, nyaman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshory, Ch. Nasruddin dan Sudarsono, 2008. *Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- BAPPENAS. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019: Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional*. Jakarta: BAPPENAS.
- Butters, C. 2003. Sustainable Human Settlements Challenges for CSD, working paper in *The 12th Session of the Commission on Sustainable Development (CSD 12)*. NABU. New York.
- Chapin, F. Steward, and Kaiser, Edward J, 1979. *Urban Land Use Planning*. Chicago: University of Illinois Press.
- Dimyati, Moh, tt. *Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Perkotaan*. Kementerian Pekerjaan Umum, diunduh dari http://penataanruang. pu.go.id/bulletin/upload/data_artikel/edisi5g.pdf
- Drakakis-Smith, David. 1981. *Urbanization, Housing and the Development Process*. New York: St. Martin's Press.
- Duxbury J. M., Abrol, I. P, Bronson K. F., and Gupta R. K. 2000. Long-term soil fertility experiments in rice-wheat cropping systems. *RiceWheat Consortium Paper Series No. 6. RiceWheat Consortium for the Indo-Gangetic Plains*, New Delhi. 171 pp.
- Hammond, C. W., 1985. *Elements of Human Geography*. London: McDonald and Evans.
- Haughton, G. C., David. 2004. *Region, Spatial Strategies and Sustainable Development*. New York: Routledge.
- Hudson, F. R. G. S., 1970. *A Geography of Settlements*. London: McDonald and Evans Ltd.
- Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2011. *Undang-undang Republik Indonesia. No.1. Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jakarta: Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kirmanto, D., 2005. *Peran Ruang Publik Dalam Pengembangan Sektor Properti dan Kota*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Kusno, A., 2012. Politik Ekonomi Perumahan Rakyat dan Utopia Jakarta. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kuswantojo, T., Rosnarti, D., Effendi, V., Eko, R., Sidi, P., 2005. *Perumahan dan Permukiman Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Lefebvre, H., 1991. *The Production of Space*. Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- Limbong, B., 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Munasinghe, M. and Shearer, Walter, editor. 1995. *Defining and Measuring Sustainability: The Biophysical Foundation*. The UN University and The World Bank.
- Munck, R., 2007. *Globalisation and Contestation*. New York: Routledge.
- Muta'ali, L., 2013. *Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif-Teknis)*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Pacione, M., 2009. *Urban Geography: A Global Perspective, Third Edition*. London: Routledge.
- Rapoport, A., 1969. *House, Form and Culture*. New York: Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs.
- Ritohardoyo, Su. 2000. *Geografi Permukiman: Pengertian, Klasifikasi, Perumahan dan Pola Permukiman*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Roberts, B. K., 2003. *Landscapes of Settlement: Prehistory to Present*. London: Routledge.
- Sutaryono, 2013. *Kontestasi dan Marjinalisasi Petani: Realitas Petani Negeri Agraris*. Sidoarjo: Zifatama.
- Undang Undang No. 26. Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang. Jakarta: Kantor Sekretariat Negara Republik.

- Undang Undang No. 1. Tahun 2011, Tentang Perumahan dan Permukiman, Jakarta: Kantor Sekretariat Negara Republik.
- Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kantor Sekretariat Negara Republik.
- Yudohusodo, S., 1994, *Rumah Untuk Segala Rakyat*, Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Yunus, H. S., 1987. Geografi Permukiman dan Beberapa Permasalahan Permukiman di Indonesia, *Makalah Pidato Pengukuhan Jabatan Lektor Kepala*, Yogyakarta: Fak. Geografi UGM.
- _____, 2007. *Subject Matter dan Metode Penelitian Geografi Permukiman Kota 2007*. Yogyakarta: Fakultas Geografi.
- _____, 2008. *Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

MUHAMMADIYAH DAN MASYUMI DI YOGYAKARTA, 1945-1960¹

Suwarno

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
E-mail: suwarnopurwokerto@yahoo.com

Abstrak

Dalam periode 1945-1960, Muhammadiyah dan Masyumi memiliki hubungan yang sangat erat baik secara nasional maupun lokal di wilayah Yogyakarta. Bagi Muhammadiyah, Masyumi merupakan wadah saluran aspirasi politiknya, sementara bagi Masyumi, Muhammadiyah telah menjadi anggota istimewa yang sangat penting. Artikel ini merupakan bagian dari disertasi yang terfokus pada pembahasan mengenai relasi Muhammadiyah dan Masyumi di Yogyakarta, kiprah politik para tokoh Muhammadiyah yang menjadi aktivis Masyumi, dan keterlibatan Muhammadiyah dalam perjuangan Masyumi memenangkan pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang meliputi empat langkah, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 1945-1960 di Yogyakarta, Muhammadiyah merupakan gerakan sosial-keagamaan yang sebagian besar anggotanya terlibat dalam Partai Islam Masyumi. Ada adagium di kalangan warga Muhammadiyah pada waktu itu bahwa Masyumi sebagai tempat berjuang, sedangkan Muhammadiyah sebagai tempat beramal. Di Yogyakarta, sebagian besar tokoh Masyumi merupakan anggota Muhammadiyah. Kiprah politik para tokoh Masyumi yang berasal dari Muhammadiyah cukup besar dalam pemerintahan dan parlemen. Keterlibatan Muhammadiyah secara organisasi ataupun melalui anggota yang menjadi tokoh Masyumi dalam Pemilu, baik Pemilu 1951, 1955 maupun 1957 membuat Masyumi berkembang sebagai salah satu partai yang diperhitungkan dalam arena politik di Yogyakarta.

Kata kunci: Muhammadiyah, Masyumi, Yogyakarta, politik

MASYUMI AND MUHAMMADIYAH IN YOGYAKARTA, 1945-1960

Abstract

In the period of 1945-1960, Muhammadiyah and Masyumi have a very close relationship, both nationally and locally in the region of Yogyakarta. For Muhammadiyah, Masyumi was a container of channel their political aspirations, while for Masyumi, Muhammadiyah has been a special member of very importance. This article is part of a dissertation focused on the discussion of the relationship Masyumi and Muhammadiyah in Yogyakarta, political contribution of their leaders who had became Masyumi activists, and Muhammadiyah's involvement in the fight Masyumi win the election. The method used in this research is the method of history, which includes four steps: heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results showed that in the period 1945-1960 in Yogyakarta, Muhammadiyah was a socio-religious movement most of whose members were involved in Islamic Party Masyumi. There was a adage among residents of Muhammadiyah at the time that Masyumi as a place to struggle, while Muhammadiyah as a charity containe. In Yogyakarta, the majority of the Muhammadiyah members were Masyumi figures. The political contribution of Masyumi's political leaders came from Muhammadiyah was quite large in the government and parliament. The involvement of Muhammadiyah, institutionally or personally members have been prominent figures in Masyumi had made the Islamic party grew as a party has bargaining position in political arena at Yogyakarta, in particular at general election of 1951, 1955 and 1957.

Keywords: Muhammadiyah, Masyumi, Yogyakarta, politics

I. PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-20, di Yogyakarta terdapat tiga organisasi yang memiliki pengaruh kuat dalam memajukan pendidikan modern dengan tidak melupakan akar sosio-kultural. Pertama, Budi Utomo (BU), sekalipun BU berdiri di Jakarta pada 1908, namun setahun kemudian pusatnya pindah ke Yogyakarta, dengan peran penting Mas Ngabehi Wahidin

Naskah masuk : 25 Juli 2015, revisi I : 15 Agustus 2015, revisi II : 25 Agustus 2015, revisi akhir : 30 Agustus 2015

¹ Artikel ini merupakan bagian dari Disertasi penulis pada Program Ilmu-ilmu Humaniora (Sejarah) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Soedirohoesodo, seorang pegawai kesehatan. Kedua, Muhammadiyah yang didirikan oleh Mas Ngabehi Muhammad Darwis atau Ketib Amin Haji Ahmad Dahlan pada 1912. Ketiga, Taman Siswa yang berdiri pada 1922 dengan tokoh utamanya Ki Hajar Dewantara, seorang kerabat Paku Alaman. Melalui prakarsa ketiga tokoh dan organisasinya masing-masing tersebut, telah menjadikan Yogyakarta sebagai “pusat perkembangan kebudayaan dan pendidikan nasional” (Suwarno, 1994: 66).²

Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara.³ Ia ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dengan kata lain, Kyai Dahlan ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur'an dan al-Hadits. Berkennaan dengan itu, sejak awal K.h.Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, melainkan organisasi yang lebih bergerak di bidang agama, sosial dan pendidikan. Sekalipun demikian, ia tidak anti-politik sebagaimana ditunjukkan oleh keterlibatannya menjadi anggota Budi Utomo (BU)⁴ sejak 1909, Jam'iyyat al Khair pada 1910, dan Sarekat Islam (SI) dalam 1911.⁵

Orientasi Muhammadiyah mengalami perubahan ke arah yang lebih politis di bawah kepemimpinan K. H. Mas Mansur (1937-1942). Salah satu latar belakang yang mendasari perubahan orientasi itu adalah terjadinya kevakuman dalam arena politik pergerakan kebangsaan pasca penangkapan dan pembuangan para tokoh pergerakan seperti Soekarno ke Ende, Flores, dan Moh. Hatta ke Boven Digul. Selain itu, ada desakan dari internal warga Muhammadiyah yang menghendaki Muhammadiyah lebih berperan dalam panggung politik nasional. Alasan lain, Mas Mansur merupakan tokoh yang memiliki kepribadian lebih melihat keluar (*outward looking*), sebaliknya kepribadian K.H. Ahmad Dahlan lebih cenderung melihat ke dalam (*inward looking*).

Dalam masa kepemimpinan Mas Mansur, Muhammadiyah tidak lagi sekedar mengembangkan dakwah Islamiyah dan memperluas sayap organisasi ini ke seluruh Indonesia, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah membuat Muhammadiyah menjadi organisasi yang semakin diperhitungkan baik di kalangan umat Islam sendiri, maupun juga di kalangan kaum nasionalis dan pemerintah kolonial Belanda. Kepeloporan Mas Mansur dalam membidani lahirnya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada 1937 dan memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia (PII) pada bulan Desember 1938, serta keterlibatannya dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) tahun 1939 dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI) tahun 1941 menunjukkan kiprah Muhammadiyah yang cukup besar dalam pergerakan kebangsaan Indonesia (Suwarno, 2010: 58-60).

² Sartono Kartodirdjo menyebut Yogyakarta pada awal abad ke-20 diliputi oleh semangat perubahan sosial dan kebangkitan nasional guna menjawab tantangan modernisasi. Tantangan tersebut berusaha dijawab melalui kehadiran tiga organisasi, yakni Budi Utomo (BU), Muhammadiyah dan Taman Siswa. Ketiganya memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Bedanya, BU merupakan semacam gerakan etno-nasionalisme yang dimotori oleh kaum priyayi intelektual, Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi keagamaan untuk mengantisipasi tantangan modernisasi di kalangan kaum religius muslim perkotaan, dan Taman Siswa sebagai gerakan untuk menyelamatkan dan mengadaptasikan budaya Jawa di tengah derasnya arus modernisasi untuk kalangan priyayi dan rakyat Jawa pada umumnya. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Multi-dimensi Pembangunan Bangsa dan Etos Nasionalisme Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 103-113.

³ Weinata Sairin menyebut Muhammadiyah sebagai “pengembang dan pengembang gagasan Kiyai Ahmad Dahlan.” Baca selengkapnya dalam Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 50.

⁴ BU yang sampai sekarang dipandang sebagai pelopor kebangkitan nasional didirikan oleh para siswa STOVIA Jakarta seperti Soetomo, Soeradjji, dan beberapa teman yang lain setelah mendapatkan masukan dan saran dari dr. Wahidin Soedirohoesodo pada 20 Mei 1908. Bahkan kantor pusat BU kemudian dipindah ke Yogyakarta agar dekat dengan rumah tinggal dr. Wahidin dan karena Yogyakarta merupakan lambang kesatuan Jawa. Lihat Anonim, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Boedi Oetomo*, (Jakarta: Direktorat Publikasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan RI, 1995), hlm. 9-19.

⁵ Menurut Alwi Shihab, keterlibatan Kiyai Dahlan dalam tiga organisasi tersebut adalah karena Kiai Dahlan sangat tertarik dengan intelektualisme keagamaan yang dikembangkan oleh Jami'at al Khair, revivalisme kebudayaan yang dilakukan oleh BU, dan antusiasme politik yang digairahkan oleh SI. Baca Alwi Shihab, *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 113.

Peran Muhammadiyah dalam konteks kehidupan sosial-politik pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) dan pasca-kemerdekaan, khususnya masa Revolusi Fisik (1945-1949) relatif cukup besar. Peran tersebut dapat dirumuskan dalam empat indikator sebagai berikut (Abror, 2010: 42-46). *Pertama*, saat Jepang menduduki Indonesia berlaku kebiasaan *seikirei*, yakni penghormatan kepada kaisar Jepang, *Tenno Heika*, dengan cara membungkuk seperti gerakan ruku' dalam shalat ke arah matahari terbit. Ki Bagus Hadikusumo selaku Ketua Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah periode 1942-1953, menganggap *seikirei* mengarah kepada *syirik* (perbuatan menyekutukan Allah), sehingga beliau tidak mau melakukan hal itu. Akibatnya, beliau dipanggil untuk menghadap Kepala Badan Intelijen Jepang di Yogyakarta, Kolonel Tsuda. Di depan Kolonel Tsuda, Ki Bagus mempertahankan pendapatnya untuk tidak melakukan *seikirei* karena alasan keagamaan, dan ternyata pihak Jepang mau memahami.⁶

Kedua, keterlibatan secara aktif beberapa tokoh Muhammadiyah dalam persiapan menjelang kemerdekaan Indonesia. Sebagai contoh, K.H. Mas Mansur termasuk dalam jajaran empat tokoh serangkai yang mewakili bangsa Indonesia pada 1944 bersama dengan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Ki Bagus Hadikusumo ikut diundang oleh Kaisar Jepang ke Tokyo pada bulan Februari 1945 bersama-sama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ki Bagus Hadikusumo dipandang sebagai salah seorang tokoh yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, yakni sebagai anggota *Chuo Sangi In* (parlemen), anggota *Dokuritsu Zyuni Tyo-sakai* (Badan Penyelidik Usaha persiapan Kemerdekaan) dan anggota *Dokuritsu zyuni I-inkai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan). Tokoh Muhammadiyah yang lain, K.H. Abdul Kahhar Muzakkir, dikenal sebagai salah seorang penanda tangan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945.⁷

Ketiga, Muhammadiyah terlibat secara aktif dalam upaya mendirikan Partai Islam Masyumi pada 7-8 November 1945 saat berlangsungnya Kongres Umat Islam yang diadakan di Gedung Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Beberapa tokoh Muhammadiyah yang aktif sebagai pengurus atau pimpinan Partai Masyumi, antara lain: Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Abdul Kahhar Muzakkir, K.H. Faqih Usman, Mr. Kasman Singodimedjo, HAMKA, dan H.A. Malik Ahmad. Secara organisatoris, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi bersama-sama dengan organisasi Islam lainnya seperti PSII, PERSIS, NU, PERTI, dan lain sebagainya (Syaifullah, 1997: 141-142).

Keempat, ikut terlibat secara aktif dalam usaha mempertahankan dan membela kemerdekaan, khususnya di wilayah Yogyakarta. Setelah Belanda melancarkan agresi militer I pada bulan Juli 1947, para ulama Muhammadiyah di Yogyakarta bermusyawarah untuk membentuk laskar Angkatan Perang Sabil (APS) guna melawan Belanda. Susunan pimpinan APS adalah Ki Bagus Hadikusumo (Penasihat), K.H. Mahfudh (Imam), K.H. Hadjid (Ketua), dan K.H. Ahmad Badawi sebagai Wakil Ketua (Abror, 2010: 45).

Pasca agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, APS keluar dari Kota Yogyakarta dan ikut melancarkan perang gerilya bersama dengan kekuatan-kekuatan yang lain, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Markas APS di Sonosewu pernah diserbu oleh pihak

⁶ Sebenarnya tokoh Muhammadiyah yang berani menentang kebiasaan sekeirei tidak hanya Ki Bagus Hadikusuma, tetapi juga Haji Rasul dan K.H. Mas Mansur. Haji Rasul, yang nama aslinya Haji Amrullah, ayah HAMKA, dalam pertemuan ulama dari seluruh Jawa di Bandung pada 1943 yang dipimpin oleh Kolonel Horie, di mana Haji Rasul akan dipromosikan sebagai pemimpin ulama tidak mau melakukan sekeirei ketika semua yang hadir melakukannya. Pada pertemuan tanggal 23 Juli 1943 di kantor Pendidikan Jakarta yang dihadiri oleh Prof. Ozaki, Ir. Soekarno dan K.H. Mas Mansur, K.H. Abdul Kahhar Muzakkir, R. H. Adnan, dan Ny. Siti Nurdjannah, Mas Mansur menyatakan bahwa umat Islam setuju bekerja sama dengan oihak Jepang dengan syarat Jepang tidak menghina agama Islam. Lihat Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hlm. 155-157.

⁷ Deliar Noer menyebut pengangkatan K.H. Mas Mansur dalam jajaran Empat Tokoh Serangkai bersama dengan Bung Karno, Bung Hatta dan Ki Hajar Dewantara, sebagai "perkembangan yang unik dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kenyataan itu menunjukkan bahwa kaum nasionalis dan pihak Jepang sangat memahami betapa pentingnya kedudukan umat Islam dalam panggung politik Indonesia. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 24.

Belanda sehingga menimbulkan korban di pihak APS sebanyak 13 orang gugur mati syahid. Di antara yang gugur, adalah Zuhri (anak Ki Bagus Hadikusumo), Wildan (anak K.H. Muchtar), dan Jarid (putra dari K.H. Hadjid). Sementara yang selamat, antara lain Mohammad Diponegoro, yang belakangan dikenal sebagai sastrawan dan redaktur majalah Suara Muhammadiyah (Abror, 2010: 46).

Sampai saat ini masih sangat sedikit penelitian yang mengkaji relasi antara Muhammadiyah dengan Masyumi, apalagi pada tingkat lokal seperti halnya di Yogyakarta. Pada tingkat nasional, ada dua penelitian yang dapat disebutkan di sini. Pertama, tesis Syaifulullah (1997) yang menyimpulkan tiga pola relasi Muhammadiyah dan Masyumi: akrab dan mesra (1945-1955), renggang (1956-1959), dan akhir relasi (1960). Kedua, kajian Insan Fahmi Siregar (2008) menyoroti peran Masyumi dalam pemerintahan, yang menunjukkan adanya tiga pola sikap, yakni: sebagai partai yang kritis (1945-1949), partai pemerintah (1950-1956), dan sebagai partai oposisi (1957-1959).

Pada tingkat lokal Yogyakarta, kiranya perlu disebutkan dua buah penelitian yang menyinggung relasi antara Muhammadiyah dengan Masyumi, khususnya di daerah Kotagede. Pertama, kajian Mitsuo Nakamura (1983) mengenai pergerakan Muhammadiyah di Kotagede pada awal 1970-an dengan judul: "Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin," Meskipun kajian Nakamura lebih bernuansa antropologis ketimbang historis dengan memetakan aktivitas anggota-anggota Muhammadiyah dalam perdagangan dan industri, namun ia menyinggung partai Masyumi yang sebagian besar didukung oleh anggota-anggota Muhammadiyah. Pada 1950-1960 an, Nakamura mengemukakan fenomena kemerosotan Partai Masyumi dan perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin menonjol (Nakamura, 1983: 128-129). Kedua, penelitian Amini (2011) yang memperdalam kajian Nakamura dengan fokus semakin dominannya PKI di Kotagede yang notabene merupakan daerah santri dan basis massa Muhammadiyah serta pendukung Masyumi dalam tahun 1950-1960an.

Dalam kajian ini, diikuti pemikiran yang dikembangkan oleh Alfian bahwa Muhammadiyah telah memainkan tiga peran sekaligus, yaitu sebagai pembaru keagamaan, agen perubahan sosial, dan sebagai kekuatan politik. Indikator utama Muhammadiyah sebagai pembaru keagamaan tampak pada karakter Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* (pemurnian agama sekaligus pembaruan dalam pengamalan keagamaan). Sebagai agen perubahan sosial ditunjukkan dengan mengembangkan pendidikan yang mengantarkan sistem dan metode baru. Sementara sebagai kekuatan politik, indikator utamanya tampak dari perkembangan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) yang semakin menonjol (Alfian, 1989: 5-6). Namun demikian, berbeda dengan kajian Alfian (1989: 6) yang mengamati Muhammadiyah sebagai kekuatan politik dari sudut pandang sebagai kelompok kepentingan, penulis lebih melihat Muhammadiyah dari kacamata sebagai bagian dari partai politik, dalam hal ini Masyumi karena posisi Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi.

Tulisan ini akan difokuskan pada relasi Muhammadiyah dan Masyumi dalam periode 1945-1960, khususnya di wilayah Yogyakarta. Relasi di antara keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Partai politik Islam Masyumi merupakan wadah saluran aspirasi politik resmi Muhammadiyah. Sementara itu, Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi menjadi pendukung dan tulang punggung utamanya. Di samping itu, akan dibahas sejauh mana kiprah para tokoh Muhammadiyah yang sekaligus menjadi aktivis Masyumi dalam pemerintahan dan parlemen. Terakhir, akan dipaparkan keterlibatan Muhammadiyah dalam perjuangan memenangkan Masyumi lewat pemilu, yakni Pemilu 1951, 1955 dan 1957.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah

merupakan prosedur untuk menguji dan menganalisis rekaman-rekaman tertulis sezaman yang dilakukan secara cermat dan kritis (Gottschalk, 1985: 32). Penulis menggunakan metode sejarah tersebut untuk menganalisis dan merekonstruksi relasi Muhammadiyah dan Masyumi di wilayah Yogyakarta dalam periode 1945-1960. Lebih jauh, metode sejarah untuk menganalisis dan merekonstruksi relasi Muhammadiyah Masyumi di Yogyakarta itu ditempuh melalui empat langkah, sebagai berikut: *heuristik*, kritik, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 1990: 89-90).

Dalam *heuristik*, sedapat mungkin penulis lebih banyak memanfaatkan bahan-bahan dokumenter yang berkaitan dengan Muhammadiyah, Masyumi, dan keadaan sosial-politik Yogyakarta sejak tahun 1945 hingga 1960. Pada langkah kritik, bahan-bahan dokumenter yang telah dikumpulkan dipilih dan dipilah dengan menguji aspek otentisitasnya (kritik ekstern) dan kredibilitas isinya (kritik intern). Selanjutnya, pada langkah interpretasi, penulis melakukan analisis dan sintesis, proses menjabarkan dan sekaligus menghimpun temuan-temuan yang telah disaring lewat kritik ekstern dan kritik intern. Terakhir, pada langkah historiografi, penulis berupaya merekonstruksi relasi Muhammadiyah Masyumi di Yogyakarta dalam periode 1945-1960 dalam bentuk tulisan yang bermakna.

II. RELASI MUHAMMADIYAH DAN MASYUMI

Masyumi merupakan partai Islam yang lahir pada 7 November 1945 di Yogyakarta. Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya Masyumi pada 7 November 1945 sangat berdekatan dengan keluarnya Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945. Maklumat tersebut memberikan kebebasan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik yang akan memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat (Anonim, 1951a: 7). Tempat kelahiran Masyumi di Gedung Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta telah menunjukkan besarnya sumbangsih Muhammadiyah dalam kelahiran Masyumi, dan belakangan Muhammadiyah menjadi tulang punggung Masyumi. Kantor pusat Masyumi pun berada di Yogyakarta sejak 7 November 1945 hingga 1 Februari 1950 baru dipindahkan ke Jakarta (Anonim, 1951a: 7).

Kelahiran Masyumi itu diputuskan dalam Kongres Muslimin Indonesia yang berlangsung di Madrasah Mua'limin Muhammadiyah Yogyakarta. Ada dua keputusan kongres: *pertama*, mendirikan Masyumi yang diikrarkan atau dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, dan *kedua*, Masyumi sebagai wadah saluran aspirasi dan kepentingan resmi yang akan memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia (Syaifullah, 1997: 141-142).

Keanggotaan Masyumi mencakup dua kategori, yakni: perseorangan, dan organisasi sebagai anggota istimewa. Anggota perseorangan minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah, memiliki hak suara, namun tidak dibenarkan merangkap sebagai anggota partai lain. Sementara anggota istimewa memiliki hak untuk memberikan nasihat atau saran. Gagasan untuk membedakan sifat keanggotaan Masyumi secara perseorangan dan organisasi itu didasari oleh pemikiran agar umat Islam terwakili dan anggota Masyumi bertambah banyak (Noer, 2000: 52; Syaifullah, 1997: 142).

Anggota Masyumi kategori organisasi sebagai anggota istimewa, pada awalnya (1945) hanya meliputi empat organisasi, yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Ummat Islam. Muhammadiyah termasuk aliran pembaru, NU tradisional, dan dua yang terakhir termasuk tradisional dalam urusan agama namun bersikap

modern dalam soal dunia.⁸ Belakangan, dua organisasi yang terakhir itu melakukan fusi pada 1951 menjadi Persatuan Ummat Islam Indonesia. Setelah empat organisasi yang menjadi anggota istimewa Masyumi itu, kemudian menyusul Persatuan Islam (Persis) pada 1948 dan Al Irsyad dalam tahun 1950. Dua organisasi Islam di wilayah Sumatera Utara, Al Jamiyyatul Washliyah dan Al-Ittihadiyah juga masuk menjadi anggota istimewa Masyumi (Noor, 2000: 52).⁹

Perkembangan partai Masyumi periode 1945-1950 tergolong pesat. Hingga akhir 1950, tercatat ada 237 cabang, 1080 anak cabang, dan 4982 ranting Masyumi di seluruh Indonesia. Jumlah anggota Masyumi saat itu sekitar 10 juta orang. Namun selepas keluarnya Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)¹⁰ pada tahun 1947 dan disusul kemudian NU dalam tahun 1952, perkembangan Masyumi cenderung statis. Berkaitan dengan keluarnya PSII dan NU tersebut, maka Masyumi tidak dapat disebut lagi sebagai satu-satunya partai politik Islam yang mewadahi, menyalurkan aspirasi dan kepentingan umat Muslim.

Susunan pengurus Partai Masyumi dalam tahun 1950, pasca-Muktamar ke-5 di Jakarta, meliputi empat bagian sebagai berikut. Bagian I Muktamar, dipimpin oleh Dr. Soekiman sebagai ketua, dibantu oleh dua orang, yaitu: Wakil Ketua I Mr. Kasman Singodimedjo, dan Wakil Ketua II Mr. Jusuf Wibisono. Bagian II Dewan Partai yang dipimpin oleh Dr. Soekiman sebagai Ketua, Wakil Ketua I Mr. Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua II Mr. Jusuf Wibisono, dan dibantu oleh anggota sebanyak 58 orang. Bagian III, Pimpinan Partai yang mencakup dua sub-bagian Dewan Politik dan Dewan Organisasi. Dewan Politik diketuai oleh Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Ketua I, Mr. Mohammad Roem sebagai Wakil Ketua II, dibantu oleh 9 orang anggota. Dewan Organisasi terdiri atas, Prawoto Mangkusasmito sebagai Ketua dan dibantu oleh 7 orang anggota. Bagian IV, Sekretaris Pimpinan Partai terdiri atas K. Taufiqurrahman sebagai Sekretaris Umum, dibantu oleh Moh. Ngali Atmodiwigirjo sebagai Sekretaris Departemen Organisasi, Sjarif Usman sebagai Sekretaris Departemen Penerangan, dan Djamaruddin Nagum sebagai Kepala Departemen Keuangan (Anonim, 1951: 27-29).

Struktur kepengurusan Partai Masyumi dari 1950 hingga awal 1951 mencakup tiga bidang. *Pertama*, Fraksi Masyumi di parlemen yang jumlahnya mencapai 48 orang. *Kedua*, anggota Masyumi yang menjabat sebagai menteri dalam Pemerintahan RI (4 orang, yakni: Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri, Mr. Mohammad Roem sebagai Menteri Luar Negeri, Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan dan K.H. Wachid Hasjim sebagai Menteri Agama). *Ketiga*, anggota Masyumi yang diutus ke luar negeri sebagai duta besar, yakni Hadji Rasjidi sebagai duta besar RI di Mesir. Disebutkan nama-nama anggota Masyumi yang terkemuka sebanyak 7 orang, yakni: Dr. Helmi, Mr. Soebardjo, Ir. Pangeran Noor, Dr. Djamaruddin, Kahar Mudzakir, Gaffar Ismail, dan Mr. Kasmat (Anonim, 1951: 30).

⁸ Gerakan Islam dimasukkan dalam kategori aliran pembaru (pembaruan) karena berusaha melakukan *Tajdid* (pemurnian sekaligus pembaruan) dalam pengamalan keberagamaan yang didasarkan pada Al Quran dan As-Sunnah, menjauhkan diri dari tradisi yang dianggap mengandung unsur takhayul, bid'ah dan khurafat (TBKh), mengajurkan *ijihad* (penalaran untuk memecahkan persoalan), dan berupaya mewujudkan keselarasan dengan kehidupan modern (peradaban Barat). Biasanya aliran pembaru (pembaruan) dipengaruhi oleh gagasan-gagasan dari para tokoh pembaru Mesir seperti Al-Afghani, Abduh dan Rasyid Ridha. Sementara aliran tradisionalis menolak semua yang ditawarkan oleh aliran pembaru (pembaruan) karena berusaha kukuh mempertahankan tradisi Islam yang sudah ada. Lihat dalam Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara (Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 3-7.

⁹ Deliar Noer sama sekali tidak menyebut PSII sebagai anggota istimewa Masyumi. Namun, Syaifullah menyebutnya.

¹⁰ Asal muasal PSII adalah dari Sarekat Islam (SI) yang berdiri pada 1912 sebagai transformasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada 1911. SI sebagai gerakan massa, setelah mencapai masa kejayaannya pada 1915 dengan jumlah anggota diperkirakan sekitar 3 juta orang, SI harus mengalami persaingan internal dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berdiri pada 1920 dan awalnya berkembang dari SI Cabang Semarang. Pada 1923, SI melakukan usaha konsolidasi partai yang berakibat merosotnya pamor SI, dan selanjutnya pada 1927 SI berubah menjadi PSII. Dalam tahun 1932, PSII mengalami perpecahan dengan lahirnya Partai Islam Indonesia (PARI) yang dipimpin oleh Dr. Soekiman. Berikutnya, dalam tahun 1936, setelah HOS Tjokroaminoto wafat pada 1934, PSII pecah lagi menjadi dua PSII lama yang tetap bergerak secara non-kooperatif, dengan PENYEDAR yang bersifat kooperatif dan dipimpin oleh Agoes Salim. Lihat dalam Anonim, *Kepartaian ... , op. cit.*, hlm. 32-34.

31). Dari 7 orang anggota Masyumi yang terkemuka itu, ada dua orang yang berasal dari Yogyakarta dan keduanya merupakan tokoh Muhammadiyah, yakni Kahar Mudzakir dan Mr. Kasmat.

Pola relasi Muhammadiyah dan Masyumi yang berlaku baik secara nasional maupun lokal, mengutip Syaifulah (1997: 190-221), mengikuti tiga tahap. *Pertama*, relasi yang akrab dan mesra (1945-1955). Pola yang pertama ini dibagi lagi dalam dua tahap: 1. lima tahun awal [1945-1950], relasi Muhammadiyah dan Masyumi sudah mesra namun energi keduanya sebagian besar dihabiskan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI dari tangan Belanda; 2. lima tahun yang kedua [1950-1955], relasi Muhammadiyah dan Masyumi bertambah mesra. Terdapat tiga tanda mengenai hal ini, yakni: (1) jumlah orang Muhammadiyah dalam kepengurusan Masyumi di atas 50 %, dan sumbangan Muhammadiyah dalam jabatan Kabinet yang dipimpin oleh atau koalisi dengan Masyumi cukup berarti.;¹¹ (2) sumbangan Muhammadiyah dalam merumuskan konsep ikatan Masyumi dengan anggota istimewa sebagaimana diputuskan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1951 dan (3) keterkaitan yang sangat erat dalam pemikiran Muhammadiyah dan Masyumi, terutama dalam aspek politik dan masyarakat. Jika Muhammadiyah bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Islam, maka Masyumi bertujuan untuk mewujudkan tegaknya Islam dalam kehidupan politik kenegaraan. Bedanya, Masyumi berkiprah dalam lapangan politik, sementara Muhammadiyah bekerja dalam lapangan masyarakat (Syaifulah, 1997: 191-193).¹²

Terkait dengan tujuan Masyumi tersebut, maka Masyumi dapat dikategorikan sebagai gerakan Islamis yang berpegang pada Islamisme,¹³ sekalipun Masyumi bukan gerakan yang pertama. Agus Salim dapat dianggap sebagai tokoh Islamis pertama yang berusaha secara sistematis dan tersurat menghubungkan Islam dengan masalah politik yang dihadapi bangsa dan negaranya. Agus Salim-lah yang memberikan warna Islam pada gerakan Sarekat Islam (SI) (Elson, 2007: 231).

Dominasi politik Muhammadiyah dalam kepengurusan Masyumi, mulai tampak sejak tahap pertama (1945-1955), relasi keduanya yang akrab dan mesra. Tepatnya dalam masa lima tahun yang kedua (1950-1955), khususnya setelah NU keluar dari keanggotaan istimewa Masyumi. Muhammadiyah tampil menjadi kekuatan utama dan bahkan menjadi tulang punggung Masyumi, baik dalam lingkup nasional maupun lokal seperti halnya di Yogyakarta.

Kedua, pola relasi renggang sebagai hasil dari Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1956. Pada sidang tanwir Muhammadiyah di Kaliurang itu, muncul empat corak pemikiran: (1) menginginkan agar Muhammadiyah memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai politik, yang disuarakan oleh aktivis politik Muhammadiyah yang tidak puas dengan Masyumi; (2) menghendaki Muhammadiyah memisahkan diri dari Masyumi namun tetap

¹¹ Contoh, dalam Kabinet Mohammad Natsir (1950-1951), Muhammadiyah hanya mendapatkan jatah 1 menteri. Selanjutnya dalam Kabinet Sukiman (1951-1952), Muhammadiyah memperoleh jatah 3 menteri, dan puncaknya masa Kabinet Wilopo, Muhammadiyah mendapatkan 4 jabatan menteri. Syaifulah tidak menyebut nama menteri yang berasal dari Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah yang menjadi menteri pada Kabinet Mohammad Natsir adalah Mr. Mohammad Roem yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dalam Kabinet Sukiman, tiga menteri berasal dari Muhammadiyah, yaitu: Dr. Sukiman Wirjosandjojo sebagai Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Subardjo, dan Menteri Sosial Mr. Samsuddin. Berikutnya, dalam Kabinet Wilopo, empat menteri dari Muhammadiyah, yakni: Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito, Menteri Dalam Negeri Mr. Mohammad Roem, Menteri Pertanian Mohammad Sardjan, dan Menteri Agama K.H. Fakih Usman. Lihat dalam Susan Finch and Daniel S. Lev, *Republic of Indonesia Cabinets, 1945-1965*, (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Department of Asian Studies Cornell University, 1965), p. 24-28.

¹² Muhammadiyah bekerja dalam lapangan masyarakat lantaran kedudukannya sebagai organisasi atau gerakan Islam, *Tajdid* (pemurnian dan pembaruan), serta *Dakwah Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* (ajakan untuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan).

¹³ Islamisme, mengutip RE Elson, dipahami sebagai penggunaan atau penghikmatan politik yang didasarkan pada Islam di atas semua yang lain. RE Elson menyebut SI di bawah HOS Tjokroaminoto belum dapat disebut sebagai gerakan Islamis meskipun sudah merupakan kekuatan politik yang berpengaruh. Alasannya, SI masih menghadapi masalah meningkatnya oposisi pemerintah kolonial, soal kepercayaan Muslim, dan soal mempertahankan Islam dalam masyarakat multibudaya dan multiagama. Lihat RE Elson, "Islam, Islamism, The Nation and The Early Indonesian Nationalist Movement," in *Journal of Indonesian Islam*, Volume 01, Number 02, December 2007, pp. 231, and 250-251.

sesuai dengan *khittah*-nya sebagai gerakan Islam, *tajdid* dan dakwah *amar ma'ruf wanahi munkar*, sementara untuk urusan politik diserahkan secara personal; (3) menginginkan Muhammadiyah memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai politik yang ikatannya dengan Masyumi dalam bentuk federasi; dan (4) menginginkan agar hubungan Muhammadiyah dan Masyumi tetap berlangsung seperti biasa karena tujuan Muhammadiyah dan Masyumi sejalan (Syaifullah, 1997: 194-198).

Ketiga, pola akhir relasi karena pembubaran Masyumi tahun 1960 dan Muhammadiyah berusaha menyelamatkan diri dari stigma yang melekat pada Masyumi sebagai partai terlarang karena dianggap terlibat dalam peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).¹⁴ Bahkan, Muhammadiyah diketahui telah menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa (Dr. Hc.) kepada Bung Karno dalam ilmu filsafat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.¹⁵

Pola relasi yang dikemukakan oleh Syaifullah tidak sepenuhnya benar. Pola kedua yang menyatakan bahwa relasi Muhammadiyah dan Masyumi renggang itu lebih bersifat teoritis ketimbang praktis. Dalam kenyataannya, relasi antara Muhammadiyah dan Masyumi di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta, sejak partai ini berdiri (1945) dan Muhammadiyah menjadi salah satu anggota istimewanya, tetap akrab dan mesra hingga bubar (1960). Pola relasi yang akrab dan mesra antara Muhammadiyah dengan Masyumi tidak berakhir pasca Pemilu 1955 sebagaimana sinyalemen Syaifullah.

Adanya saling ketergantungan dan identifikasi diri antar-orang atau aktivis Muhammadiyah dan Masyumi tetap berlangsung hingga Masyumi bubar tahun 1960. Bahkan, menurut pendapat Mutiah Amini (2011), dalam studi kasusnya di Kotagede, pembubaran Masyumi telah membuat para aktivis politik Masyumi kembali lagi ke Muhammadiyah sebagai basis awalnya. Baik anggota Masyumi maupun Muhammadiyah sama-sama berprinsip “Muhammadiyah tempat beramal, dan Masyumi tempat berjuang”. Dapat dikatakan amat jarang anggota dan simpatisan Masyumi yang pindah ke partai lain atau keluar dari Muhammadiyah, kecuali karena takut kehilangan jabatan sehingga ada beberapa kepala desa Masyumi yang pindah ke NU,¹⁶ sebagaimana juga pernah disinggung oleh Nakamura (1983: 129).

III. KIPRAH POLITIK TOKOH-TOKOH MUHAMMADIYAH AKTIVIS MASYUMI DALAM PEMERINTAHAN DAN PARLEMEN

Dominasi politik Muhammadiyah dalam Masyumi juga dapat dianalisis dengan mencermati peran politik Masyumi dalam pemerintahan, terutama melalui kiprah para

¹⁴ Pemberontakan PRRI yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein pecah pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumater Barat. Kehadiran beberapa tokoh Masyumi seperti Muhammad Natsir dan Syafrudin Prawiranegara dalam proklamasi PRRI telah menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno, dank arena pengaruh kuat PKI, akhirnya Presiden mengeluarkan Keppres No. 200/1960 tanggal 17 Agustus 1960 yang memberikan waktu satu bulan kepada pimpinan Masyumi untuk membubarkan Masyumi sebelum ditetapkan sebagai partai terlarang. Sebenarnya pimpinan Masyumi seperti Prawoto Mangkusasmito telah memberikan pembelaan bahwa pembentukan PRRI inkonstitusional dan kehadiran beberapa tokoh Masyumi di Padang bukan atas nama Masyumi. Namun penjelasan Prawoto diabaikan oleh PKI dan tidak didengar oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya baca dalam Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Jilid 2*, (Bandung: Salamadami Pustaka Semesta, 2010), hlm. 377-379.

¹⁵ Gelar Dr. Hc. yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada Bung Karno dalam bidang filsafat, yakni ilmu kalam atau ilmu tauhid merupakan gelar ilmiah. Pemberian gelar itu didasari oleh pertimbangan dan penghargaan kepada beliau atas karya-karyanya baik pidato atau karangan, misalnya tentang penggalian api Islam, seruan ijihad dan anti-taqlid, pentingnya rasio untuk mempertebal iman, kesempurnaan sifat Tuhan yang tidak terbatas dua puluh, dan penggalian Pancasila yang menyertakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Baca selengkapnya dalam Muhammad Djaldan Badawi (penyalin), *Buku Putih Muhammadiyah Kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1962-1965 dan 1965-1968*, (Yogyakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2001), hlm. 26-27.

¹⁶ Fenomena semacam itu dapat dikatakan merupakan anomali atau penyimpangan. Lihat Mutiah Amini, “Komunitas di Kota Santri: Politik Lokal Kotagede pada 1950-1960-an,” dalam Sita van Bemmelen dan Remco Raben (penyunting), *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan KITLV, 2011), hlm. 283.

tokohnya. Mengutip Insan Fahmi Siregar (2008:20), peran politik Masyumi dalam pemerintahan sepanjang 1945-1960 dapat dibagi dalam tiga pola. *Pertama*, pola Masyumi sebagai partai yang bersikap kritis kepada pemerintah yang berlangsung selama masa Revolusi Fisik (1945-1949). Dalam beberapa kabinet yang terbentuk, sebenarnya terdapat kader partai yang dilibatkan untuk duduk sebagai menteri, namun secara kepartaian, Masyumi tidak dilibatkan. Mereka tidak mewakili partai, dan hanya atas nama pribadi.¹⁷

Mengutip Deliar Noer (1983:14), M. Rasyidi berjasa besar dalam pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946. Uniknya, usulan pembentukan Kementerian Agama datang dari tokoh-tokoh Masyumi yang duduk dalam Komite Nasional Indonesia (KNI) Banyumas, seperti K.H. Abu Dardiri, S. K.H. Soleh Su'ady dan Sukosos Wirjosaputro. Khusus mengenai K.H. Abu Dardiri, beliau adalah Konsul Muhammadiyah Wilayah Banyumas.¹⁸ Usulan tersebut kemudian disetujui oleh para anggota KNI Pusat, dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah dan berhasil dikabulkan oleh Menteri Agama.

Kedua, pola Masyumi sebagai partai pemerintah pada masa Demokrasi Liberal. Pola ini berlangsung sejak 1950 sampai 1956, mulai dari Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Burhanuddin Harahap, dan Ali II, minus Kabinet Ali I. Dalam pola ini, kader-kader partai Masyumi yang sebagian besar merupakan kader Muhammadiyah duduk dalam pemerintahan, baik pada pos perdana menteri, wakil perdana menteri maupun pos kementerian. Pada masa Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi, Pemilu untuk DPR dan konstituante dapat berjalan dengan baik (Siregar, 2008: 22-25).

Ketiga, pola ketika Masyumi menjadi partai oposisi pada masa transisi menuju masa Demokrasi Terpimpin yang berlangsung dari tahun 1957 hingga 1959. Jatuhnya Kabinet Ali II dan disusul terbentuknya Kabinet Karya di bawah Perdana Menteri Juanda menandai masa transisi menuju Demokrasi Terpimpin. Hal ini karena Kabinet Juanda menunjukkan pola *Zaken Kabinet* yang lebih menitikberatkan pada kecakapan dan keahlian para menteri. Sementara pembentukan Kabinet dalam zaman Demokrasi Liberal lebih mengedepankan pada perimbangan kekuatan partai politik di dalam parlemen. Sementara sikap oposisi Masyumi tampak pada penolakannya terhadap konsep *Zaken Kabinet* dan selanjutnya konsep Demokrasi terpimpin yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno (Siregar, 2008: 25-28).¹⁹ Kesan Masyumi sebagai partai oposisi berimbang pada Muhammadiyah yang dianggap sebagai bagian dari Masyumi, termasuk dalam gerbong partai oposisi.

Tampaknya, tiga pola peran politik partai Masyumi tersebut lebih berlaku di tingkat pusat, dan kurang relevan untuk skala lokal seperti di Yogyakarta. Hal itu karena, di Yogyakarta sejak 1945-1960, partai Masyumi selalu dilibatkan di dalam parlemen daerah ataupun di pemerintahan. Sebagai contoh, Ketua DPR DIY yang pertama dipegang oleh kader Masyumi sekaligus anggota Muhammadiyah, Wiwoho Purbohadijoyo, dan kemudian menjadi Sekretaris Pemerintah Daerah DIY (Suwarno, P. J., 1994: 450). Demikian pula,

¹⁷ Analisis tersebut ditujukan pada Masyumi secara nasional dalam perspektif kekuasaan politik. Lihat Insan Fahmi Siregar, "Pasang Surut peran Politik Masyumi Dalam Pemerintahan (1945-1960)", dalam *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 35, No. 1, Juni 2008, hlm. 20-21. Contoh, dalam Kabinet Syahrir sebagai kabinet pertama, kader Masyumi yang berasal dari Muhammadiyah, M. Rasyidi, duduk sebagai Menteri Agama. Tokoh intelektual Muhammadiyah ini lahir di Kotagede, Yogyakarta, 20 Mei 1915. Pendidikan dasarnya ditempuh di Sekolah Muhammadiyah Kotagede dan Kweekschool Muhammadiyah Ngabean. Rasyidi kemudian melanjutkan belajar di Sekolah Al-Irsyad di Lawang, Malang, Jawa Timur. Sementara pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beberapa karya tulisnya menunjukkan bahwa beliau tokoh intelektual Muslim dan Muhammadiyah yang mumpuni. Mengenai riwayat hidup dan karya-karya tulis Prof. Dr. M. Rasyidi, selengkapnya baca Muh. Syamsuddin, Prof. Dr. H.M. Rasjidi *Pemikiran dan Perjuangannya*, (Yogyakarta: Aziziah, 2004), terutama hlm. 28-46, dan hlm. 53-86.

¹⁸ Mengenai proses pembahasan usulan pembentukan Kementerian Agama dalam KNI Banyumas dan biografi singkat K.H. Abu Dardiri, lihat dalam Suwarno dan Asep Daud Kosasih, *Relasi Agama dan Negara Dalam Skala Lokal Dinamika Politik Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UMP Press, 2014), hlm. 51-52, dan 81-85.

¹⁹ Mengutip Anhar Gonggong, ada dua partai yang paling tegas menyatakan penolakan terhadap konsepsi Presiden Soekarno mengenai Demokrasi Terpimpin, yakni Masyumi yang dimotori oleh Muhammad Natsir, dan Partai Katholik yang dipimpin oleh I.J. Kasimo. Keduanya adalah kawan demokratis yang sangat akrab. Demokrasi Terpimpin dianggap tidak sesuai dengan alam kemerdekaan yang bermartabat. Lihat Anhar Gonggong, "Kasimo: Politik Bermartabat", dalam *Majalah Basis*, Nomor 11 12, Tahun Ke-59, 2010, hlm. 34-35.

dalam kedudukan sebagai pimpinan DPR DIY dan DPR Kotapraja Yogyakarta, serta sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sejak awal kemerdekaan hingga akhir masa Demokrasi Liberal, selalu ada kader Partai Masyumi yang notabene merupakan anggota Muhammadiyah duduk pada jabatan pimpinan ketiga lembaga tersebut.

Pada tingkat nasional, terdapat daftar nama anggota Konstituante dari Fraksi Masyumi yang berasal dari dan merupakan anggota Muhammadiyah (terlampir). Dari daftar tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dicermati. *Pertama*, penggunaan istilah saudara di depan nama anggota Muhammadiyah yang duduk dalam Dewan Konstituante dari Masyumi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ajaran agama Islam berupa egalitarianisme (persamaan semua orang di hadapan Allah dan hukum) telah diterapkan baik oleh Muhammadiyah maupun oleh Masyumi.

Kedua, daftar nomor 31 tidak ada karena setelah nomor 30 langsung nomor 32, berarti anggota Muhammadiyah yang duduk dalam Dewan Konstituante dari Masyumi bukan 43 orang melainkan 42 orang. Temuan penelitian ini bahwa anggota Dewan Konstituante yang berasal dari Muhammadiyah sebanyak 42 orang sebagai bagian dari Fraksi Partai Islam Masyumi dalam Dewan Konstituante sebanyak 112 orang (37,5 %) sekaligus untuk mengoreksi hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syaifullah bahwa anggota Masyumi di Dewan Konstituante yang berasal dari Muhammadiyah berjumlah 21 orang (18,75 %).²⁰ Perbedaan temuan itu karena penelitian Syaifullah mengambil sumber dari buku karangan Bajasut (1972). Sementara sumber yang digunakan penulis adalah bahan dokumenter berupa arsip yang tersimpan di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengenai daftar anggota Konstituante yang berasal dari Muhammadiyah.

Ketiga, beberapa anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota konstituante mewakili Masyumi dan berasal dari Yogyakarta, antara lain: Amelz, Prof. R.H. Kasmat, A.R. Baswedan, Prof. H.A. Kahar Muzakkir, R.H. Hadjid, dan Muh. Hasbi Assidiqy. Amelz berasal dari Aceh yang kemudian tinggal di Yogyakarta dan menjadi anggota aktif Masyumi. Yang menarik dari tokoh ini, ia pernah menulis buku mengenai tokoh puncak Sarekat Islam (SI) dalam tahun 1952 berjudul *HOS Tjokroaminoto dan Perjuangannya* (Jakarta: Bulan Bintang).²¹ Prof. R.H. Kasmat sudah dijelaskan di atas, demikian pula dengan Prof. H.A. Kahar Muzakkir. Jadi, yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah A.R. Baswedan dan R.H. Hadjid.

Pada saat terbentuknya BPUPKI, AR Baswedan termasuk salah satu anggota BPUPKI yang mewakili komunitas Arab. Setelah Indonesia merdeka, AR Baswedan pernah menjadi anggota KNIP, dan puncaknya menjadi Menteri Muda Penerangan dalam Kabinet Syahrir I. Beliau kemudian menjadi anggota Konstituante sampai Masyumi bubar. Selanjutnya, AR Baswedan menetap di Yogyakarta, tinggal di Taman Yuwono Nomor 19, dan aktif dalam aktivitas dakwah sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Cabang Yogyakarta.²²

²⁰ Menurut Syaifullah, anggota Konstituante dari Fraksi Masyumi yang berjumlah 112 orang, ada sebanyak 21 orang dari Muhammadiyah, yakni: (1) Muhammad Sardjan, (2) K.H. Fakih Usman, (3) Mr. H. Kasmat, (4) Dr. Kusnadi, (5) Dr. H. Sukiman Wirjosandjojo, (6) Kamka, (7) Prawoto Mangkusasmito, (8) Prof. A. Kahar Muzakir, (9) Mr. H. Kasman Singodimedjo, (10) K. Taufiqurrahman, (11) Ahmad Dasuki, (12) E. Sutoleksono, (13) Amelz, (14) Mr. Djamaluddin Datuk Singomangkuto, (15) K.H. Ahmad Azhari, (16) Zainal Abidin Su'aeb, (17) A.R. Sutan Mansur, (18) Abdul Malik Ahmad, (19) Oesman Ralibi, (20) K.R.H. Hadjid, dan (21) K.H. Asnawi Hadisiwoyo. Periksa Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 174.

²¹ Periksa Daftar Pustaka dalam Ahmad Mansur Suryanegara, *Api* ..., op. cit., hlm. 558. Penulis tidak berhasil melacak keberadaan buku jilid I larya Amelz tersebut, namun bisa mendapatkan buku jilid II dengan judul sedikit berbeda, *H.O.S. Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1952).

²² AR Baswedan juga pernah menjadi wartawan, penyair, dan penulis yang cukup produktif. Beberapa karya AR Baswedan yang telah dibukukan, antara lain: (1) *Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab*, dicetak tahun 1934; (2) *Debat Sekeliling PAI*, dicetak tahun 1939; (3) *Rumah Tangga Rasulullah*, diterbitkan tahun 1940 oleh Bulan Bintang; (4) *Buah Pikiran dan Cita-cita AR Baswedan*, diterbitkan oleh Sekjen PAI, Salim Maskati; dan (5) *Menuju Masyarakat Baru (Cerita Toneel dalam 5 Bagian)*. Baca Suratmin, *Abdul Rahman Baswedan Karya dan Pengabdiannya*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989), hlm. 103-109, 123, dan 170.

Sebagai salah seorang tokoh Masyumi yang menonjol, AR Baswedan dikenal sangat dekat, akrab dan bersahabat baik dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Hamka, Buya AR Sutan Mansur, AR Fachruddin, Daris Tamim, dan A. Mukti Ali. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah anggota Muhammadiyah. Pengakuan AR Baswedan sendiri dalam sebuah tulisan di *Suara Muhammadiyah* (SM) tahun 1971 menunjukkan bahwa pada masa mudanya dia pernah aktif di Muhammadiyah dan sampai tulisannya dimuat di SM itu masih tetap sebagai warga Muhammadiyah. Lebih jauh, AR Baswedan menuturkan pengalamannya aktif di Muhammadiyah sebagai berikut:

“Sedjak berusia lk. 16 tahun, penulis sudah tertarik kepada Muhammadiyah dan tumbuh dalam Muhammadiyah dengan pertama kali ikut dalam Majlis Tabligh Muhammadiyah di Surabaya jang ketika itu dipimpin oleh alm. KH Mas Mansur jang selanjutnya menjadi sahabat akrab dari penulis”(SM, 1971:12).²³

Kahar Mudzakir memang lebih dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Namun, beliau pernah menjadi Ketua Partai Masyumi Cabang Yogyakarta (Tashadi, 1986: 27). Tampaknya, jabatan tersebut disandang oleh Abdul Kahar Mudzakkir sejak awal keberadaan Masyumi hingga tahun 1950-an. Pengganti selanjutnya sebagai Ketua Masyumi Cabang Yogyakarta adalah Mr. R.H. Kasmat (Anonim, 1953: 45).²⁴

Nama lengkap Kahar Mudzakir adalah Abdul Kahar Mudzakkir. Tokoh ini dilahirkan pada 16 Nopember 1907 di Kotagede. Aktivitas politiknya mulai dikenal sejak dia menjadi anggota Pengurus Besar Partai Islam Indonesia (PII) tahun 1938-1942, dan anggota Majelis Rakyat Indonesia (MRI), 1941-1942. Pada masa pendudukan Jepang, antara tahun 1942-1943, Abdul Kahar Mudzakkir adalah Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai pegawai pegawai militer pemerintah Jepang di Yogyakarta. Pada 1943-1945, dia diangkat sebagai pegawai markas besar militer Jepang di Jakarta, dan pada 1944 diangkat sebagai akting Direktur Departemen Agama Pemerintah Militer Jepang (*Gun Seikambu Syumubu Zicho*) mewakili K. H. Hasyim Asy'ari (Tashadi, 1986: 23-25, dan 63).

Perjuangan politik Abdul Kahar Mudzakir mencapai puncaknya dalam tahun 1945. Pada waktu itu, dia telah tampil menjadi anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan yang kemudian berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.²⁵ Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*), oleh Mr. Moh. Yamin disebutnya sebagai “*Gentlement Agreement*” karena merupakan bentuk kompromi dan jalan keluar dari munculnya dua kubu (Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler) dalam BPUPKI ketika membahas persoalan mengenai dasar negara (Tashadi, 1986: 25-26).²⁶

R.H. Hadjid dikenal sebagai salah seorang pemimpin Muhammadiyah yang pernah menjadi murid langsung K.H. Ahmad Dahlan dan anggota Konstituante hasil Pemilu 1955 dari Fraksi Masyumi dan mewakili basis konstituen Yogyakarta. Tokoh ini dikenal sebagai

²³ A.R. Baswedan, “Kepada Buja A.R. St. Mansur Kepada Bapak A.R. Fachruddin,” dalam *Suara Muhammadiyah* (SM), Nomor 16-17, Tahun Ke-51, 1971, hlm. 12. Suratmin sebagai penulis biografi AR Baswedan juga tidak mengetahui bahwa AR Baswedan adalah anggota Muhammadiyah.

²⁴ Dalam sumber yang lain, Ketua Masyumi Cabang Yogyakarta disebut sebagai Ketua Masyumi Daerah Yogyakarta. Partai Islam Masyumi Yogyakarta beralamat di Jalan Ngadiwinatan No. 40 Yogyakarta, Ketua Daerah dijabat oleh Mr. R.H. Kasmat, dan Ketua Cabang dijabat oleh Muridan Noto. Periksa Anonim, *Manakah Tempatnya?*, (Jogjakarta: Djawatan Penerangan Kotapradja, 1953), hlm. 45.

²⁵ Anggota Panitia Sembilan terdiri atas: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Moh. Yamin, Abikusno Tjokrosujoso, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Mudzakkir, Mr. Achmad Subardjo, dan K.H. Wachid Hasjim. Piagam Jakarta menjadi embrio Pembukaan UUD 1945 karena di dalamnya terdapat Pancasila yang berisi lima sila seperti Pancasila sekarang. Perbedaannya terletak pada sila pertama, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi terdapat tujuh kata setelah kata Ketuhanan.” Lihat naskah Piagam Djakarta itu dalam Anonim, *Lahirnya Pantja-Sila dan Undang-Undang Dasar 1945 berikut Piagam Djakarta*, (Djakarta: Tridjaja, 1947), hlm. 47-48.

²⁶ Perimbangan kekuatan politik nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler, menurut Ahmad Syafii Maarif, yang mengutip hasil pengamatan Prawoto Mangkusamito, dalam BPUPKI hanya sekitar 20 % (15 dari 62 anggota) yang benar-benar mewakili aspirasi umat Islam. Baca Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 88. Sementara dalam Panitia Sembilan, perimbangan itu menjadi 4 : 5 (44 %).

seorang alim yang mumpuni, dan seorang guru di *Kweekschool Muhammadiyah Yogyakarta* yang mampu memberikan tuntunan dan keteladanan bagi para guru Muhammadiyah. R. H. Hadjid telah menulis buku yang dimaksudkannya sebagai semacam pedoman mengajar bagi para guru sekolah Muhammadiyah baik laki-laki maupun perempuan,²⁷ buku kumpulan surat dan ayat yang diajarkan oleh K. H. Ahmad Dahlan berjudul *Pelajaran KHA Dahlan 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat Al-Quran* (2005). Perjuangannya pada masa Revolusi Fisik atau Perang Kemerdekaan RI (1945-1949), menunjukkan kecintaannya kepada tanah air Indonesia, dengan cara ikut berjuang mengangkat senjata dan menjadi Ketua Angkatan Perang Sabil (APS).²⁸

Selanjutnya, anggota Konstituante dari Masyumi dan berasal dari Yogyakarta adalah Muh. Hasbi Assidiqy, yang lebih dikenal sebagai penulis buku-buku, khususnya mengenai fiqh dan tafsir.²⁹ Muh. Hasbi Assidiqy lahir di Lhokseumawe Aceh pada 10 Maret 1904. Tokoh ini lebih dikenal sebagai tokoh otodidak karena pendidikannya lebih banyak dihabiskan dari satu *dayah* (semacam pesantren) ke *dayah* yang lain. Mulai aktif di Muhammadiyah sejak pindah ke Kutaraja, Banda Aceh, pada 1933. Lima tahun kemudian (1938), Muh. Hasbi Assidiqy terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Kutaraja. Selanjutnya ia menjadi Konsul Muhammadiyah Aceh dari 1943 sampai 1946. Dalam tahun 1951, tokoh ini pindah dan menetap di Yogyakarta. Sejak pindah ke Yogyakarta, bakat menulis Muh. Hasbi Assidiqy meningkat pesat. Beberapa karya monumentalnya ialah *Tafsir An-Nur* (30 jilid) yang selesai ditulisnya tahun 1961, kemudian *Mutiara Hadits* (8 jilid) selesai tahun 1968, dan Koleksi *Hadits Hukum* (11 jilid) yang selesai naskahnya tahun 1971. Beliau juga aktif menulis artikel di beberapa majalah dan surat kabar seperti *Suara Muhammadiyah*, *Panji Masyarajat*, *Hikmah*, *Al-Djami'ah*, dan *Sinar Darussalam*. Muh. Hasbi Assidiqy dapat dianggap sebagai tokoh penggagas Fiqh Indonesia.³⁰

Beberapa kader Masyumi yang pernah duduk dalam keanggotaan DPRD dan Dewan Pemerintahaan Daerah (DPD) DIY serta Kotapraja Yogyakarta diketahui merupakan anggota Muhammadiyah. Mereka antara lain: Wiwoho Purbohadijoyo yang pernah menjadi Ketua DPRD DIY pertama dan dikenal sebagai pendiri Partai Islam Indonesia (PII) tahun 1938. Beberapa kader yang lain adalah Wazir Nurie, Mr. Kasmat, Moh. Mawardi, Dalhar Maksoem, dan Hammam Hasjim. Berikut ini adalah riwayat hidup singkat dari lima kader Masyumi sekaligus anggota Muhammadiyah selain Wiwoho Purbohadijoyo.

Wazir Nurie merupakan tokoh Muhammadiyah yang tinggal di Jalan Mawar Nomor 55 Yogyakarta. Tokoh ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1903. Pendidikan yang ditempuhnya di Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Juru Rawat dan *Hollands Inlandsche School* (HIS). Pada saat riwayat hidupnya ditulis, 23 September 1953, MH. Wazir Nurie menjabat sebagai wakil Ketua DPD Kotapraja Yogyakarta dan anggota DPR DIY. Antara tahun 1951-1953, MH. Wazir Nurie terpilih sebagai Ketua Majelis Perwakilan Daerah (MPD)

²⁷ Beruntung penulis bisa mendapatkan buku karangan R.H. Hadjid, *Guru Tabligh*, (Poerbolinggo, Boekhandel Persatuan, Jilid II, Cetakan II, 1934). Sayangnya buku jilid I tidak penulis dapatkan. Ada hal yang sangat menarik dari buku tersebut bahwa menurut R.H. Hadjid, sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru tabligh, yakni guru yang sekaligus dapat mendakwahkan Islam, meliputi 4 sifat: (1) tetap dalam menjalankan sesuatu atau istiqamah, (2) mempunyai hati sayang dan belas kasihan, (3) lemah lembut, dan (4) cerdik serta pandai. Baca *ibid.*, hlm. 5.

²⁸ Perjuangan R.H. Hadjid pada Perang kemerdekaan dapat dibaca dalam Tim Penulis, *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), terutama Bab IV, hlm. 43-76.

²⁹ Hasbi Assidiqy adalah guru besar Islam yang sangat produktif menghasilkan karya tulis dalam bentuk buku. Namun, penulis hanya dapat menemukan dua buku yang ditulisnya dalam tahun 1950-an. Pertama, *Sedjarah Kehakiman dalam Pemerintahan Islam*, (Medan: Toko Buku Islamijah, 1950); dan kedua, *Beberapa Rangkaian Ajat (Untuk Pelajaran Tafsir bagi Sekolah Permulaan)*, (Bandung: Alma'arif, 1952). Tampaknya karya Mohd. Hasbi Assidiqy sebagian besar ditulisnya dalam tahun 1970-an.

³⁰ Baca dalam Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasananya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 3, 13-15, 36-38, dan 55. Buku tersebut diolah dari karya disertasi penulisnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN, sekarang Universitas Islam Negeri [UIN]) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hal yang unik dan menarik adalah penulisnya merupakan anak kandung dari Muh. Hasbi Assidiqy. A. Mukti Ali menyebut karya Nourouzzaman Shiddiqi itu sebagai “bakti kepada ilmu” sekaligus “bakti kepada ayah”. Lihat A. Mukti Ali, “Sambutan”, dalam *ibid.*, hlm. vii-viii.

Muhammadiyah Yogyakarta, setingkat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) pripinsi. Sampai tahun 1950, MH. Wazir Nurie adalah sekretaris Masyumi wilayah Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 1951, beliau diangkat sebagai Wakil Ketua Masyumi wilayah Yogyakarta. Dalam tahun 1952-1953, MH. Wazir Nurie menjabat sebagai pimpinan Masyumi Cabang Yogyakarta. Sejak 1950, beliau juga anggota DPR DIY dari Fraksi Masyumi yang kemudian terpilih sebagai anggota DPD Propinsi DIY Seksi II. Ada hal yang menarik mengenai beliau soal pengalaman dalam masyarakat dan keterangan keluarga. Pada soal pengalaman dalam masyarakat disebutkan beberapa pekerjaan beliau, antara lain: berdagang, mengajar, mubaligh, sopir, dan karyawan percetakan. Sementara pada soal keterangan keluarga disebutkan istri beliau Hj. Siti Dachirah, anak 5 orang, serta yang menjadi tanggungan beliau lainnya adalah ibu sendiri, ibu mertua dan 2 orang *chadam* (pembantu).³¹

Perihal Mr. Kasmat dapat dikemukakan bahwa beliau dilahirkan pada 5 Mei 1908 di Kotagede Yogyakarta. Alamat tempat tinggal di Kotabaru Yogyakarta. Ketika riwayat hidup singkat beliau ditulisnya sendiri pada 1 Agustus 1951 untuk keperluan dokumentasi dari Pengurus Besar (P.B.) Muhammadiyah, beliau bekerja sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Kota Yogyakarta sekaligus sebagai anggota DPRD DIY. Pekerjaan sambilan lainnya adalah sebagai pengacara (advocat) dan dosen Universitas Islam Indonesia (UII). Saat itu beliau termasuk dalam anggota PB Muhammadiyah. Dalam Partai Masyumi, Mr. Kasmat yang merupakan seorang ahli hukum lulusan Universitas Leiden Belanda, posisinya sebagai Wakil Ketua Masyumi wilayah Yogyakarta.³²

Ada sebuah catatan menarik dari kiprah Mr. Kasmat dalam kedudukan beliau sebagai Wakil Ketua KPPP (Kantor Pemilihan Pusat Provinsi) DIY pada Pemilu 1951. Beliau memberikan penjelasan mengenai kejahatan Pemilu. Dalam penjelasan itu, salah satunya beliau mengutip pasal 151 UU No. 7 Tahun 1950 yang berisi larangan untuk mengaku dirinya sebagai orang lain karena dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan. Untuk mengatasi hal itu, beliau membolehkan orang menggunakan “nama paraban” bagi orang yang memiliki nama sama atau mirip. “Nama paraban” itu terkadang sangat lucu kedengarannya. Misalnya, Dibjo-Djangkrik, Sudibjo-Gareng, Kromo-Dangkluk, Sastro-Leong, Sastro-Pringis, dan lain sebagainya.³³

Moh. Mawardi adalah anggota DPR DIY dari Fraksi Masyumi sejak 1950. Tokoh Muhammadiyah ini terpilih sebagai anggota DPD Seksi I bersama dengan Sugijopranto (Seksi I, Fraksi PPDI), Susanto (Seksi III, Fraksi Buruh/Tani), Mr. Kasmat (Seksi IV, Masyumi), dan dr. Sahir (PNI, Seksi V).³⁴

Dalhar Maksoem merupakan anggota DPR Kotapraja Yogyakarta yang berasal dari Fraksi Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Pada 1953, anggota DPR Kotapraja Yogyakarta berjumlah 50 orang berasal dari 12 fraksi, meliputi: Masyumi (11 orang), PNI (11 orang), Katholiek (7 orang), Parkindo (4 orang), GPII (4 orang), Murba (5 orang), PSII (1 orang), Gabungan Rukun Kampung (2 orang), Perwari (2 orang), Partai Wanita Rakyat (1 orang), PGRI (1 orang), dan CHTH (1 orang). Dalhar Maksoem kemudian terpilih sebagai anggota DPD Kotapraja Yogyakarta bersama dengan Wazir Nurie (Masyumi), Mohammad Djumali (PNI), Prodjohandoko (PNI), dan R.C. Tjiptosumarto (Katholiek) (Anonim, 1953):

³¹ Riwayat hidup Wazir Nurie yang warna-warni itu dapat dibaca dalam *Arsip Tjataatan Pokok untuk dokumentasi Pengurus Besar Muhammadiyah* atas nama H. MH. Wazir Nurie.

³² *Arsip Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah berupa Tjataatan Pokok Ketua/Anggauta PB Muhammadiyah tahun 1951*. Tidak perlu dibuat heran jika penggunaan istilah wilayah, daerah dan bahkan cabang digunakan untuk posisi yang sama dalam kepengurusan partai politik.

³³ Penjelasan Mr. R.H. Kasmat itu dapat dilihat pada Anonim, *Mimbar Pemilihan Umum Sekitar Pemilihan Umum di Djokjakarta*, (Djakarta: Kementerian Penerangan RI, 1951b), hlm. 46-47.

³⁴ Panitia Redaksi, *Ulang Tahun Ke-1 D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta*, (Yogyakarta: Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, 1952), hlm. 18 dan 56. Penulis tidak berhasil mendapatkan riwayat hidup Moh. Mawardi.

20-22).³⁵

Sementara Hammam Hasjim juga dikenal sebagai anggota DPR DIY dari Fraksi Masyumi sejak 1950. Beliau dikenal sebagai anggota DPD DIY yang dalam tahun 1958 ikut menjadi anggota delegasi pemerintah DIY pada acara Konferensi Pendahuluan Antar Daerah Swatantra I se-Indonesia di Jakarta tanggal 24-27 Juni 1958.

IV. KETERLIBATAN MUHAMMADIYAH DALAM PERJUANGAN MASYUMI MEMENANGKAN PEMILU

Sebagai anggota istimewa Masyumi, tentu saja hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi sangat dekat. Kedekatan hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi di Yogyakarta, antara lain dapat ditengok dari keadaan tahun 1954, di mana Kantor Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) DIY yang dipimpin oleh H. Wazir Nurie bersebelahan dengan Kantor Pimpinan Daerah Masyumi DIY yang dipimpin oleh Sunarjo Mangunpuspito, yakni Ngadiwinatan 39 dan Ngadiwinatan 40.³⁶ Beberapa lembaga dakwah yang berada di bawah naungan (*underbouw*) Masyumi dan berkantor yang sama dengan Masyumi antara lain: Front Pemuda Islam Indonesia (FPII) pimpinan Djazim Hamidi, Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) pimpinan AR Fachruddin, Sekolah Tinggi Islam Indonesia (STII) pimpinan Nur Ali Tjahjopuspito, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) pimpinan Achid Masduki (Mulkhan, 1992: 14). Penulis meyakini bahwa baik pimpinan Masyumi maupun beberapa lembaga dakwah yang menjadi *underbouw*-nya Masyumi di atas seluruhnya merupakan aktivis organisasi Muhammadiyah. Sementara itu, organisasi otonom (*ortom*) Muhammadiyah yang berkantor sama dengan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) DIY adalah Pemuda Muhammadiyah. Organisasi otonomi lain seperti Aisyiyah yang dipimpin oleh Ibanah Mochtar dan Nasiyatul Aisyiyah (NA) pimpinan Siti War'ijah berkantor di Kauman Yogyakarta (Mulkhan, 1992: 14).

Abdul Munir Mulkhan juga mencatat ada delapan penerbitan berupa surat kabar dan majalah yang dikelola oleh ummat Islam di Yogyakarta dalam tahun 1950-an dari 39 penerbitan yang ada di wilayah DIY. Dari delapan penerbitan Islam itu seluruhnya dicetak oleh Penerbit Persatuan dan Universitas Islam Indonesia (UII). Untuk Penerbit Persatuan diketahui merupakan amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah, sedangkan UII dapat diketahui bahwa sebagian besar pendirinya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Berikut daftar surat kabar dan majalah Islam dalam tahun 1950-an.

³⁵ Yang menarik, GPII meskipun bukan partai politik karena ia merupakan organisasi masyarakat yang dikenal sebagai *underbouw* Masyumi, ikut menempatkan wakilnya di parlemen kota Yogyakarta. Baik Masyumi maupun GPII, anggotanya sebagian besar berasal dari anggota atau warga Muhammadiyah.

³⁶ Dalam perkembangan kemudian, jalan Ngadiwinatan berganti nama menjadi Jalan K.H. Ahmad Dahlan. Lihat Lampiran nama-nama jalan di Yogyakarta pada masa Hindia Belanda dan masa Kemerdekaan, dalam Nurhajarini, dkk., *Yogyakarta dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa*, (Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012), hlm. 166.

Tabel 1. Surat Kabar dan Majalah Islam di Wilayah DIY Tahun 1950-an

No	Nama Surat Kabar/ Majalah	Penerbit	Pemimpin Redaksi	Keterangan Terbit
1.	Suara Muhammadiyah	PP Muhammadiyah	M.J. Anies	Mingguan
2.	Nusa Putera	Badan Penerbitan Nusa Putera	A.R. Baswedan	Dwi mingguan
3.	Suara 'Aisyiyah	PP 'Aisyiyah	St. A. Dahlan	Bulanan
4.	Sinar	Sinar Kaum Muda Muhammadiyah	Dja'far S.	Bulanan
5.	Pantjaran	Majelis Tabligh PP Muhammadiyah	Djarnawi HK	Bulanan
6.	Tunas	Pelajar Islam Indonesia (PII)	H.A. Halim	Bulanan
7.	Melati	Hizbul Wathan (HW) Cabang Yogyakarta	Bisron	Bulanan
8.	Bahtera	Sarikat Siswa SGHA	Moh. Thahir Harun	Bulanan

Sumber: Mulkhan (1992:14)

Dalam tiga kali pemilihan umum (pemilu) di Yogyakarta pada masa Demokrasi Liberal, yakni Pemilu 1951, 1955 dan 1957, Muhammadiyah baik secara organisatoris ataupun secara perorangan melalui para tokohnya ikut terlibat dalam perjuangan untuk memenangkan Masyumi.

1. Pemilu 1951

Salah satu bukti dukungan kuat Muhammadiyah terhadap perjuangan Partai Islam Masyumi, terutama menjelang Pemilu 1951, adalah keluarnya anjuran dari pengurus Majelis Perwakilan PB Muhammadiyah MPD Yogyakarta kepada cabang dan ranting Muhammadiyah seluruh daerah Yogyakarta agar membantu perjuangan Masyumi dalam Pemilu 1951 yang diorganisasikan dalam komando dan siasat dari KAPU Masyumi, memilih jago pemilih yang akan diajukan, dan menyediakan jago untuk DPR DIY mewakili kepentingan Masyumi (*Suara Muhammadiyah*, Radjab 1370 H / April 1951: hlm. 152).

Hasil Pemilu 1951 sebagai pemilu pertama yang dapat dianggap sebagai “percobaan demokrasi” bagi rakyat Yogyakarta dapat dilihat pada data berikut.

1. Masyumi mendapatkan suara 2753
2. PPDI mendapatkan suara 1115
3. PKABT mendapatkan suara 878
4. PNI mendapatkan suara 659
5. Partai Katholik mendapatkan suara 354
6. SSPP mendapatkan suara 314
7. PIR mendapatkan suara 311.

Sumber: Anonim, (1951b:24 - 25).

Dari hasil Pemilu 1951 tersebut diperoeh komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY sebagai berikut.

Tabel 2. Pembagian Kursi DPRD DIY Hasil Pemilu 1951

No	Nama Partai	Banyaknya Kursi yang Didapat dalam pembagian							Jumlah Kursi yang Diperoleh
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1.	Masyumi	16	-	1	-	-	-	1	18
2.	PPDI	6	-	-	1	-	-	-	7
3.	PKABT	5	-	-	-	-	-	-	5
4.	PNI	3	1	-	-	-	-	-	4
5.	Partai Katholik	2	-	-	-	-	-	-	2
6.	SSPP	1	-	-	-	1	-	-	2
7.	PIR	1	-	-	-	-	1	-	2
	Jumlah	34	1	1	1	1	1	1	40

Sumber: Anonim, (1951b:69).

Tampaknya, kemenangan Masyumi yang meraih mayoritas suara dalam pemilu 1951 (45 %) disebabkan oleh faktor partai ini lebih diuntungkan dengan sistem Pemilu yang bertingkat. Sebab dengan melalui Pemilu bertingkat, elit tokoh Masyumi yang menjadi wali pemilih atau jago lebih menarik untuk dipilih oleh rakyat pemilih ketimbang tokoh di luar Partai Masyumi. Elit tokoh Masyumi di Yogyakarta yang didominasi oleh anggota Muhammadiyah dan tergolong kaum santri yang terpelajar dinilai paling dapat menguasai massa.³⁷ Selain itu, dalam Pemilu 1951 Masyumi juga masih mendapatkan dukungan dari Nahdlatul Ulama (NU) yang baru keluar dari Masyumi pada 1952.

Sebenarnya, sistem pemilu bertingkat yang diterapkan dalam Pemilu 1951 banyak menuai protes. Sebagian besar partai atau kumpulan partai yang mengikuti Pemilu 1951 merasa tidak puas bahkan kecewa, misalnya PNI, PIR, Partai Katholik, dan Parkindo. Hanya Masyumi yang merasa puas dan menilai Pemilu 1951 sudah berjalan dengan baik. Selain faktor keuntungan sistem Pemilu 1951, kemenangan Masyumi juga didorong oleh organisasi NU yang pada saat itu masih menjadi anggota istimewa Masyumi.

2. Pemilu 1955

Hasil Pemilu 1955 untuk wilayah DIY dengan memperhitungkan jumlah penduduk dan jumlah pemilih, dapat ditunjukkan dari tabel di bawah ini

Tabel 3. Jumlah Penduduk, Jumlah Pemilih dan Perolehan Suara 5 Besar Partai Politik Pemilu 1955 untuk DPR Pusat

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih	Partai Peserta Pemilu				
				(1) PKI	(2) PNI	(3) Gerinda	(4) Masyumi	(5) NU
1.	Kotapraja Yogyakarta	243.276	137.830	43.842	21.839	611	18.027	2.387
2.	Sleman	485.895	245.313	36.655	47.353	38.646	30.805	27.634
3.	Bantul	430.560	249.815	34.770	41.138	23.554	38.151	38.436
4.	Kulonprogo	307.903	166.613	12.527	45.671	17.320	23.777	20.501
5.	Gunungkidul	477.708	251.298	101.351	34.159	51.168	16.180	5.802
	Jumlah total	1.945.342	1.050.869	229.145	180.160	131.299	127.540	94.760

Sumber: Soetarto (editor), (2009:136).

³⁷ Itu merupakan penilaian resmi pemerintah. Setelah Masyumi, yang paling bisa menguasai massa adalah PPDI. Hal itu wajar karena para lurah anggota PPDI hampir setiap hari bertemu dengan rakyat dan mereka memiliki kekuatan dan pengaruh untuk ditaati oleh massa. Mereka relatif lebih terpelajar dibanding rakyat yang menjadi bawahannya. Lihat Anonim, *Mimbar Pemilihan Umum ...*, op. cit., hlm. 80.

Kemudian untuk kotapraja Yogyakarta, hasil Pemilu 1955 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.³⁸

Tabel 4. Perolehan suara 5 Besar Pemilu 1955 untuk DPR

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Partai				
		(1) PKI	(2) PNI	(3) Masyumi	(4) Partai Katholik	(5) NU
1.	Gedongtengen	4253	1959	707	439	216
2.	Djetis	4526	2866	949	369	256
3.	Mergangsan	3667	1873	2035	461	141
4.	Mantra Djeron	3276	1539	833	478	221
5.	Gondomanan	2278	1116	2508	404	171
6.	Kraton	2950	2229	1636	714	120
7.	Ngampilan	2323	1577	2506	319	207
8.	Tegalredjo	3590	1879	213	368	267
9.	Gondokusuman	4614	2840	1209	997	345
10.	Wirobradjan	2398	1020	781	281	54
11.	Umbulhardjo	1714	700	1039	120	68
12.	Kotagede	2079	261	1364	24	78
Jumlah total		37665	19859	15780	4974	2144

Sumber: Harian *Suara Umat*, 13 Desember 1955.

Mengacu data di atas, ada beberapa catatan yang menarik untuk dikemukakan. Pertama, PKI menang di 10 dari 12 kecamatan atau *kemantren*, yakni di Gedongtengen, Djetis, Mergangsan, Mantri Djeron, Kraton, Tegalredjo, Gondokusuman, Wirobradjan, Umbulhardjo, dan bahkan di Kotagede yang notabene dikenal sebagai basis Muhammadiyah. Kedua, PNI meskipun menempati posisi kedua, namun tidak memenangkan perolehan suara di kecamatan manapun. Ketiga, Masyumi sekalipun menduduki peringkat ketiga tetapi menang di dua kecamatan, yakni Gondomanan dan Ngampilan. Fakta ini menunjukkan besarnya pengaruh Muhammadiyah yang berasal dari Kauman yang berada di Kecamatan Ngampilan. Keempat, Partai Katholik menempati posisi keempat dan bahkan perolehan suaranya jauh di atas NU yang menduduki peringkat kelima.

Tampaknya, suara yang diperoleh Masyumi sangat dipengaruhi oleh kehadiran Muhammadiyah. Muhammadiyah banyak memiliki amal usaha, terutama di bidang pendidikan, yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memobilisasi dukungan. Pada 1955, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Yogyakarta dapat ditunjukkan sebagai berikut: 14 cabang, 84 ranting, 1 PKU, 1 rumah yatim, 74 SR, 15 SMP, 1 Muallimin, 1 Muallimat, 1 Darul Ulum, 3 SGA, 3 SGB, 3 SMA, 1 Wustho, di samping beberapa Madrasah (*Surat Kabar Suara Ummat*, 1 Desember 1955).

Berkenaan dengan itu, dalam peringatan atau milad Muhammadiyah yang ke-43, Sri Sultan HB IX pada 30 November 1955 menyatakan bahwa Muhammadiyah diperlukan oleh masyarakat Indonesia semuanya. Faktor pendukung utamanya adalah karena Muhammadiyah telah memberikan sumbangsih yang besar dalam lapangan pendidikan, sosial, agama, dan kesehatan. Kenyataan tersebut tidak dapat dianggap sepi atau dapat dilupakan begitu saja (*Surat Kabar Suara Ummat*, 1 Desember 1955).

³⁸ Hasil tersebut masih sementara, tetapi sudah di atas 87 % suara yang masuk, jadi tidak akan ada perubahan yang berarti.

Hasil Pemilu 1955, sekalipun merupakan pemilu nasional, ternyata telah dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun DPRD Peralihan DIY dalam tahun 1956 sebagai kelanjutan dari DPRD DIY hasil Pemilu 1951 dengan masa kerja hingga tahun 1956. Komposisi DPRD Peralihan DIY yang selaras dengan hasil Pemilu 1955, tampak sebagai berikut: PKI sebagai partai pemenang pemilu mendapatkan 10 kursi, PNI 8 kursi, Gerinda 6 kursi, Masyumi 6 kursi, NU 4 kursi, dan ada lima partai yang masing-masing memperoleh 1 kursi, yakni PIR, Partai Katholik, IPKI, PRN, serta Partai Buruh. Masa jabatan DPRD Peralihan DIY ditetapkan sejak 24 Desember 1956 hingga 17 Naret 1958 (*Statistik Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1950-1956*, 1957: 15).

Sementara komposisi anggota DPD DIY yang dipimpin oleh Sri Paduka (SP) Sultan HB IX sebagai Ketua dan SP Pakualam VIII sebagai wakil ketua adalah: BPH Surjodiningrat dari Gerinda (Seksi I), R. Moch. Hammam Hasjim dari Masyumi (Seksi II), Sutrisno dari PKI (Seksi III), Sunarjohadi dari PNI (Seksi IV), dan H.M. Irsjad dari NU (Seksi V) (*Statistik Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1950-1956*, 1957: 15).

3. Pemilu 1957

Persebaran perolehan kursi di DPR Daerah di lingkungan wilayah Propinsi DIY sebagai hasil Pemilu 1957 dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 5. Perolehan Kursi Anggota Parlemen Kabupaten-Kota DIY Hasil Pemilu 1957³⁹

Asal Partai	Kota Yogyakarta	Sleman	Bantul	Kulonprogo	Gunungkidul
PKI	11	8	8	5	18
PNI	4	7	6	8	3
Gerinda	-	6	3	4	8
Masyumi	3	5	6	6	2
NU	1	5	5	4	1
Lain-lain	7	3	8	3	3
Total kursi	25	34	35	30	35

Sumber: Soetarto (editor), (2009:139).

Mencermati data di atas, PKI mampu meraih suara terbanyak dan mengalahkan rival-rivalnya, terutama PNI, Masyumi dan Gerinda. Dalam analisis harian *Kedaulatan Rakyat* (KR, 30 Oktober 1965), kemenangan PKI di Yogyakarta menandakan bahwa pada saat itu PKI berhasil mendapatkan dukungan yang besar dari rakyat, khususnya dari kalangan petani dan buruh. Kehidupan sosial-ekonomi dua kalangan rakyat ini memang kurang baik dan dapat dikatakan paling menderita. Sementara itu, PKI menawarkan program-program yang sangat menjanjikan mereka untuk memperbaiki nasibnya. Tidak heran bila kondisi hidup yang buruk dan janji-janji yang baik itu memudahkan petani dan buruh berada di bawah pengaruh PKI.

Ada catatan yang penting mengenai usaha menyatukan kekuatan politik umat Islam guna menghadapi kampanye Pemilu 1957. Pada 2 Juli 1957 berlangsung acara serah terima pengurus pimpinan Masyumi wilayah DIY dari tangan R. Sunarjo Mangunpuspito kepada A.K. Muzakkir.⁴⁰ Acara serah terima kepemimpinan Masyumi tersebut berlangsung di balai pertemuan Masjid Agung Alun-alun Utara Yogyakarta, dan dipimpin oleh Ahmad Basuni.

³⁹ Ada sumber lain yang menyatakan bahwa perolehan kursi PKI dari seluruh perwakilan DPRD propinsi, kabupaten dan kota di wilayah DIY adalah 64 kursi, PNI 37 kursi, Masyumi 29 kursi, dan Gerinda 28 kursi. Lihat dalam Tim Penyusun, *Pemberontakan G 30 S/PKI 1965 di Yogyakarta dan Sekitarnya*, Yogyakarta: Dinas Sosial Propinsi DIY Proyek Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Bangsa, 2000), hlm. 3-4. Sementara dari data tabel 5 jika dihitung menunjukkan perolehan PKI 50 kursi, PNI 28 kursi, Gerinda 21 kursi, Masyumi 22 kursi, dan NU 16 kursi.

⁴⁰ Tampaknya itu merupakan periode kepemimpinan Prof A.K. Muzakkir yang kedua setelah menjabat sebagai Ketua Masyumi DIY dalam tahun 1951.

Dalam acara itu, ada tiga pembicara kunci, yakni: A.K. Muzakkir selaku Ketua Masyumi DIY yang baru, Mr. H. Kasmat sebagai anggota Konstituante, dan Achid Masduki selaku Ketua Fraksi Masyumi dalam DPRD DIY.⁴¹

A.K. Muzakkir menekankan bahwa semua partai Islam yang ada, terutama di wilayah DIY adalah Masyumi, NU dan PSII, pasti memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan kalimat Allah dan menjunjung tinggi agama Islam. Sehubungan dengan itu, A.K. Muzakkir mengajak kepada partai Islam yang ada untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, mengadakan kampanye bersama, jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka diupayakan agar tidak ada gesekan, dan tidak saling serang-menyerang. Ajakan Prof. A.K. Muzakkir untuk mengadakan kampanye bersama adalah sebagai berikut:

“Kalau dapat dilakukan kampanje bersama antara Masjumi, NU dan PSII, maka partai Islam akan mentjapai kemenangan jang besar” (Surat Kabar *Abadi*, 3 Juli 1957).

H. Kasmat sebagai anggota Konstituante dari Fraksi Masyumi menjelaskan secara singkat perjuangan Masyumi dalam Konstituante. Beliau mengharapkan dukungan dan kerjasama agar Masyumi dan partai-partai Islam yang lain dapat mewujudkan amanat umat Islam Indonesia dalam pembentukan konstitusi Negara yang berdasarkan Islam. Selanjutnya, Achid Masduki selaku Ketua Fraksi Masyumi di DPRD DIY juga memaparkan perjuangan dan hasil kerja Masyumi yang cukup banyak bagi rakyat dan daerah Yogyakarta, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan *honger odem* (HO), pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya (Surat Kabar *Abadi*, 3 Juli 1957).

V.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa relasi Muhammadiyah dan Masyumi sudah terjalin sejak partai Islam tersebut didirikan pada 7 November 1945. Bahkan Muhammadiyah telah berjasa karena menyediakan tempat, yakni Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, untuk penyelenggaraan Kongres Umat Islam dan pendirian Masyumi. Selanjutnya, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi. Pasca keluarnya NU dari Masyumi tahun 1952, dominasi politik Muhammadiyah terhadap Masyumi sangat besar, kalau tidak boleh dikatakan menentukan. Hal ini karena Muhammadiyah tampil menjadi tulang punggung utama Masyumi. Keadaan ini terjadi baik dalam tingkat nasional maupun wilayah seperti halnya di DIY. Di kalangan warga Muhammadiyah muncul adagium bahwa “Masyumi tempat berjuang di arena politik, sementara Muhammadiyah tempat beramal di arena dakwah.”

Kiprah tokoh-tokoh Masyumi yang notabene merupakan anggota Muhammadiyah telah memberikan sumbangan yang besar bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Beberapa tokoh Masyumi dan anggota Muhammadiyah yang berasal dari Yogyakarta, di antaranya: H.M. Rasyidi, H.A. Kahar Muzakkir, A.R. Baswedan, Amelz, R.H. Kasmat, R.H. Hadjid, dan Muh. Hasbi Assidiqy.

Di wilayah DIY, tokoh-tokoh Masyumi yang berasal dari Muhammadiyah telah ikut aktif baik dalam pemerintahan (DPD) DIY dan Kotapraja Yogyakarta maupun dalam parlemen (DPRD). Beberapa dari mereka yang peranannya menonjol adalah Wiwoho Purbohadijoyo, Wazir Nurie, Mr. Kasmat, Moh. Mawardi, Dalhar Maksoem, dan Hammam Hasjim.

⁴¹ Selengkapnya hasil pertemuan Masyumi itu, periksa dalam Surat Kabar *Abadi*, 3 Juli 1957, dengan judul : “Masjumi-NU-PSII Pasti Menang Dengan Gerakan Kampanje Bersama untuk Pemilihan Umum DPRD”.

Dalam tiga kali perhelatan atau pesta demokrasi pada masa Demokrasi Liberal di wilayah DIY, yakni Pemilu 1951, 1955 dan 1957, Muhammadiyah baik secara organisatoris maupun secara personal telah memberikan dukungan kepada Masyumi. Dukungan itu terutama berupa anjuran agar warga Muhammadiyah lebih memilih Masyumi daripada partai yang lain.

B.Saran

Dokumentasi mengenai sejarah Muhammadiyah, dalam perspektif politik, terutama dalam kaitannya dengan Masyumi di wilayah Yogyakarta masih sangat sedikit atau langka. Bahkan historiografi mengenai sejarah Muhammadiyah yang ditinjau dari aspek politik untuk wilayah DIY juga hampir belum pernah dilakukan secara akademis. Berkenaan dengan itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-DIY, khususnya melalui Majelis Pustaka, hendaknya memiliki program untuk menyusun historiografi Muhammadiyah, dalam berbagai aspek tidak hanya politiknya, tetapi juga aspek yang lain seperti dakwah, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H.M. Muchlas. 2010. *Muhammadiyah Persamaan dan Kebersamaan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Alfian. 1989. *Muhammadiyah The Political Behavior of Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, A. Mukti, 1997. "Sambutan", dalam Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amelz, 1952. *H.O.S. Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya*. Djakarta: Bulan Bintang..
- Amini, Mutiah, 2011. "Komunis di Kota Santri: Politik Lokal Kotagede pada 1950 1960-an," dalam Sita van Bemmelen dan Remco Raben. (penyunting). *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan KITLV.
- Anonim, 1947. *Lahirnya Pantja-Sila dan Undang-Undang Dasar 1945 berikut Piagam Djakarta*. Djakarta: Tridjaja.
- Anonim, 1951a. *Kepartaian di Indonesia*. Djakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- _____, 1951b. *Mimbar Pemilihan Umum Sekitar Pemilihan Umum di Djokjakarta*. Djakarta: Kementerian Penerangan RI.
- Anonim, 1953. *Mana Tempatnya?*. Jogjakarta: Djawatan Penerangan Kotapradja.
- Anonim, 1995. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Boedi Oetomo*. Jakarta: Direktorat Publikasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan RI
- Arsip Arsip Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah berupa Tjatatan Pokok Ketua/Anggauta PB Muhammadiyah Tahun 1951*.
- Arsip Pengurus Besar Muhammadiyah* Yogyakarta tersimpan di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan kode RA 32b.
- Arsip Tjatatan Pokok untuk dokumentasi Pengurus Besar Muhammadiyah atas nama H. MH. Wazir Nurie*.
- Badawi, M. D., (penyalin), 2001. *Buku Putih Muhammadiyah Kebijaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1962 1965 dan 1965 1968*. Yogyakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Baswedan, A. R., 1971. "Kepada Buja A.R. St. Mansur Kepada Bapak A.R. Fachruddin," dalam *Suara Muhammadiyah (SM)*, Nomor 16 17, Tahun Ke-5.
- Benda, H. J., 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Elson, R. E., 2007. "Islam, Islamism, The Nation and The Early Indonesian Nationalist Movement," in *Journal of Indonesian Islam*, Volume 01, Number 02, December.
- Finch, S. and Daniel S. Lev, 1965. *Republic of Indonesia Cabinets, 1945 1965*. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Department of Asian Studies Cornell University.
- Gonggong, A., 2010. "Kasimo: Politik Bermartabat", dalam *Majalah Basis*, Nomor 11 12, Tahun Ke-59.
- Gottschalk, L., 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hadjid, R. H., 1934. *Guru Tabligh*. Jilid II. Poerbolinggo: Boekhandel Persatuan.
- Harian Suara Umat*, 13 Desember 1955.
- Kartodirdjo, S., 1999. *Multi-dimensi Pembangunan Bangsa dan Etos Nasionalisme Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Maarif, A. S., 1988. *Islam dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Mulkhan, A. M., 1992. *Direktori Lembaga Dakwah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1991 1992 (Sebuah Petunjuk Praktis)*. Yogyakarta: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah / Khotbah Agama Islam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Nakamura, M., 1983. *Bulan sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede*, Yogyakarta. Terjemahan Yusron Asrofie. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noer, D., 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945 1965*. Bandung: Mizan.
- Nurhajarini, dkk., 2012. *Yogyakarta dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Panitya Redaksi, 1952. *Ulang Tahun Ke-1 D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta*. Yogyakarta: Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta.
- Sairin, W., 1995. *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Shiddiqi, N., 1997. *Fiqh Indonesia Pengagas dan Gagasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, A., 1998. *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Siregar, I. F., 2008. "Pasang Surut peran Poltiik Masyumi Dalam Pemerintahan (1945 1960)", dalam *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 35, No. 1, Juni.
- Soetarto, E., (editor), 2009. *Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat dan Yang Dilupakan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Statistik Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1950-1956*. Jogjakarta: Sekretariat Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, 1957.
- Surat Kabar Abadi*, 3 Juli 1957.
- Suratmin, 1989. *Abdul Rahman Baswedan Karya dan Pengabdianya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Suryanegara, A. M., 2010. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Suwarno, 2010. *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara (Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwarno dan Asep Daud Kosasih, 2014. *Relasi Agama dan Negara Dalam Skala Lokal Dinamika Politik Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UMP Press.
- Suwarno, P. J., 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Yogyakarta: Kanisius.

- Syaifullah, 1997. *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syamsuddin, M., 2004. *Prof. Dr. H.M. Rasjidi Pemikiran dan Perjuangannya*. Yogyakarta: Aziziah.
- Tim Penulis, 2000. *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Penyusun, 2000. *Pemberontakan G 30 S/PKI 1965 di Yogyakarta dan Sekitarnya*. Yogyakarta: Dinas Sosial Propinsi DIY Proyek Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Bangsa.